

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
MADRASAH BERBASIS NILAI-NILAI PESANTREN
(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak
Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**



Oleh:

**Khamilatul Husna
NIM. 212217035**

**PROGRAM MAGISTER PRODI MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Khamilatul Husna**, NIM. 212217035, Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “**Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah Berbasis Nilai-Nilai Pesantren (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Darul Huda)**” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dengan kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan atau ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan hukum.

Ponorogo, 23 April 2020

Pemulis

A green rectangular stamp with the text "TERAI TEMPEL" at the top, "KELASIFIKASI" in the middle, and "6000" at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

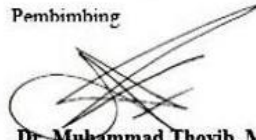
Khamilatul Husna

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Khamilatul Husna, NIM 212217035 dengan judul: **“Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah Berbasis Nilai-Nilai Pesantren (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Darul Huda)”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 16 April 2020

Pembimbing



Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd
NIP. 19840404200901012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/AK-SURU/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website : www.iainponorogo.ac.id Email : pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Khamilatul Husna, NIM. 212217035**, Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan judul: “Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah Berbasis Nilai-Nilai Pesantren (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Darul Huda)” telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

Penguji	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Nur Kolis, Ph.D NIP. 197106231998031002 Ketua Sidang		26 Mei 2020
2	Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag. NIP. 197402041998032009 Penguji Utama		18/05/2020
3	Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd NIP. 19840404200901012 Pembimbing/ Penguji 2		22/05/2020
4	Yusmicha Ulya Afif, M.Pd.I NIDT. 2016081040 Sekertaris		22/05/2020

Ponorogo, 22 Mei 2020

Direktur Pascasarjana,



Dr. Aksin M. Ag.
NIP 197407012005011004

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamilatul Husna
NIM : 212217035
Program Studi : MPI
Judul Tesis : Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah Berbasis Nilai-Nilai Pesantren (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Darul Huda)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Juni 2020

Penulis


Khamilatul Husna

ABSTRAK

Pemerintah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sebagai respon terhadap berbagai permasalahan mutu Indonesia. Namun hal ini memerlukan upaya internal lembaga pendidikan, terutama madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada ilmu umum dan ilmu agama serta adanya pelestarian nilai-nilai pesantren di dalamnya. Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari proses penjaminan mutu internal madrasah mulai dari penetapan standar mutu, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu dengan dilandasi nilai-nilai pesantren yang tertanam di seluruh komponen madrasah. Studi dilakukan di MA Darul Huda Mayak Ponorogo. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui penelitian studi kasus berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Studi ini menemukan bahwa penetapan standar mutu MA Darul Huda mengacu pada SNP yang disesuaikan dengan visi misi dan kondisi madrasah. Pada pemetaan mutu, madrasah melakukan EDM untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman dan rekomendasi yang tepat. Perencanaan pemenuhan mutu disusun berdasarkan hasil pemetaan mutu dalam bentuk RKM dan RKTm dalam berisi sasaran mutu, program, indikator keberhasilan penanggung jawab dan jadwal kegiatan serta sumber pendanaan dan anggaran. Pemenuhan mutu dirancang oleh penanggung jawab kegiatan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan, teknis kegiatan, jadwal dan rincian anggaran. Evaluasi pemenuhan mutu didasarkan pada laporan terkait pelaksanaan kegiatan dan hasilnya, kendala serta rekomendasi untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Nilai-nilai pesantren yang tertanam pada diri pemangku kepentingan madrasah memberikan pengaruh pada jalannya SPMI.

ABSTRACT

The government implements a quality assurance system in response to various Indonesian quality problems. However, this requires an internal effort by educational institutions, especially madrasas as educational institutions that focus on general and religious knowledge as well as the preservation of the values of pesantren in them. This paper aims to study the internal quality assurance process of madrasah starting from setting quality standards, quality mapping, quality fulfillment planning, quality fulfillment, and evaluating quality fulfillment based on pesantren values embedded in all madrasah components. The study was conducted at MA Darul Huda Mayak Ponorogo. This study adopts a qualitative approach through case study research based on data collected through interviews, observations, and document analysis. This study found that the establishment of MA Darul Huda quality standards refers to SNPs that are adjusted to the vision and mission and conditions of the madrasah. In quality mapping, madrasah conduct EDM to identify strengths, weaknesses, opportunities, threats and appropriate recommendations. Quality fulfillment planning is prepared based on the results of quality mapping in the form of RKM and RKTm in containing quality objectives, programs, indicators of success of the person in charge and schedule of activities as well as funding and budget sources. Quality fulfillment is designed by the person in charge of activities by forming an activity implementation team, technical activities, schedule and budget details. Evaluation of quality fulfillment is based on reports related to the implementation of activities and results, constraints and recommendations for improvement of subsequent activities. The values of pesantren that are embedded in madrasah stakeholders influence the running of SPMI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menjadi bagian penting dalam suatu negara karena pendidikan merupakan proses pematangan hidup. Begitu pentingnya pendidikan maka sangatlah diperlukan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang di dalamnya termuat proses pematangan kualitas peserta didik yang berusaha dikembangkan dengan merubah peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mampu, menjadi berdaya guna, menjadi jujur, menjadi benar serta berakal dan beriman.¹

Pendidikan bermutu inilah yang ingin dicapai Indonesia. Namun dalam mencapai pendidikan bermutu banyak masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan seperti sertifikasi guru yang belum diatasi dengan baik, kurangnya pemahaman dan penghayatan guru sertifikasi terhadap tugasnya, ujian nasional yang belum dipetakan dengan baik, kurikulum pendidikan yang masih pro dan kontra,

¹ Dedy Mulayazana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 2

sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar sampai permasalahan manajemen yang belum sesuai dengan teori manajemen. Hal itu menjadikan mutu pendidikan rendah.

Mutu pendidikan dilihat dari mutu tenaga pengajar dan mutu lulusan yang diterima kerja atau yang diterima di tingkat pendidikan selanjutnya. Lulusan yang baik dihasilkan dari pengelolaan pendidikan yang baik. Hal ini berarti perlu adanya manajemen mutu yang baik yang perlu dilakukan oleh seluruh penyelenggara pendidikan termasuk madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Tumbuhnya madrasah yang belum menampakkan peningkatan manajemen mutu yang baik menjadikan kualitas masih sulit diharapkan peningkatan mutu madrasah secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa madrasah berdiri tanpa perencanaan yang matang.²

Di antara manajemen mutu yang baik salah satunya adalah sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu adalah sistem yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dari awal proses agar memenuhi spesifikasi tertentu. Spesifikasi tertentu ini menunjukkan adanya standar produk.³ Dalam pendidikan Indonesia standar ini merupakan standar

² Deden Makbuloh, *Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 10-14

³ Ridwan Abdulah Sani et.al., *Penjaminan Mutu Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 6

nasional pendidikan. SNP ditetapkan pemerintah sebagai upaya dalam penjaminan mutu. Indonesia memiliki delapan SNP yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan. Inilah upaya pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan yang disebut sebagai sistem penjaminan mutu eksternal.

Dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan, satuan pendidikan tak terkecuali madrasah seharusnya memenuhi standar yang sudah ditetapkan namun masih banyak yang belum memenuhi standar pendidikan nasional. Di Jawa Timur seharusnya 14.345 lembaga yang terakreditasi namun hanya 10.173 lembaga yang terakreditasi.⁴ Dilihat dari hasil akreditasi secara nasional terhadap 51.979 sekolah dan madrasah tingkat SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA dan sederajat yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM), madrasah dan sekolah yang terakreditasi dengan peringkat B sebesar 55,31% dan peringkat A 20,51%. Selain itu, masih terdapat sekolah dan madrasah

⁴Harian Bhirawa, *BAN S/M Minta Sekolah Tuntaskan Akreditasi*, <http://harianbhirawa.com/2018/11/ban-sm-minta-sekolah-tuntaskan-akreditasi/>, 14 November 2018

yang tidak terakreditasi, bahkan tercatat 705 yang tutup.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu masih jauh dari harapan. Di sisi lain kurangnya akreditasi yang dicapai atau belum terlaksananya akreditasi yang baik akan mengurangi nilai lembaga sebagai sekolah/ madrasah yang bermutu di mata konsumen (wali murid).

Ukuran sekolah yang dikatakan bermutu dalam pandangan pengguna/ penerima manfaat pada umumnya di antaranya sekolah memiliki akreditasi A, lulusan diterima di perguruan tinggi terbaik, hasil UN yang baik dan lainnya.⁶ Dalam rangka menjadi lembaga yang bermutu sangat perlu penjaminan mutu baik eksternal maupun internal. Penjaminan mutu internal perlu diberlakukan oleh lembaga pendidikan terutama madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan dua keilmuan yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Lebih khusus lagi dalam penelitian ini adalah madrasah berbasis pesantren yang tak hanya mengembangkan dua keilmuan namun juga berusaha mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai pesantren yang dianutnya.⁷

⁵Media Indonesia, *55% Sekolah dan Madrasah Terakreditasi B*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/204145-55-Sekolah-Dan-Madrasah-Terakreditasi-B>, 31 Agustus 2019

⁶ Ridwan Abdullah Sani et.al, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 1

⁷ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 81-87

Penjaminan mutu secara eksternal tidak akan berhasil jika madrasah sebagai satuan pendidikan tidak berupaya menjamin mutu internalnya dan hal ini merupakan kewajiban bagi setiap satuan pendidikan. Disamping itu madrasah juga akan kesulitan untuk mencapai SNP sesuai harapan pemerintah jika madrasah tidak memiliki sistem penjaminan mutu internal yang baik. Hal ini akan menimbulkan beberapa dampak negatif diantaranya madrasah tidak akan dipercaya oleh wali murid sebagai konsumen sebagai lembaga yang mampu mendidik generasi bangsa sehingga menyebabkan madrasah mengalami penurunan siswa bahkan sampai madrasah ditutup. Selain itu, hal ini akan menambah beban pemerintah dalam menjamin mutu nasional yang mengarah pada peningkatan mutu yang mengakibatkan munculnya pandangan negatif negara-negara lain terhadap Indonesia sebagai negara yang menyatakan secara tegas dalam ideologinya bahwa mencerdaskan bangsa sebagai salah satu tujuannya.

Saat ini madrasah berbasis pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua diharapkan tidak hanya mampu bertahan tetapi juga harus mampu menghadapi tantangan zaman. Jika bertahan tidak mampu bagi madrasah maka madrasah akan sulit menghadapi tantangan zaman. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki harapan

untuk mampu bersaing dan tetap eksis dapat diwujudkan melalui sistem jaminan mutu internal. Sistem jaminan mutu internal ini perlu dikembangkan berkaitan dengan potensi kekuatan yang dimiliki yang mengarah pada kebutuhan nyata terhadap mutu secara substansial.⁸

Madrasah berbasis nilai-nilai pesantren dalam penyelenggaraan pendidikannya akan memasukkan nilai-nilai pesantren di antaranya nilai kemandirian, kebersamaan dan moralitas. Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung akan membantu berjalannya penjaminan mutu internal. Prinsip penjaminan mutu internal yang dimiliki pemangku kepentingan madrasah akan lebih kuat dengan adanya nilai-nilai pesantren sehingga berjalannya penjaminan mutu tersebut akan lebih baik. Beberapa tata nilai yang dapat dijadikan dalam menjalankan penjaminan mutu adalah, kejujuran, kepercayaan, keunggulan, komitmen, kompetisi, kredibilitas, kemandirian dan akuntabilitas. Esensi dari tata nilai ini menjadi falsafah yang dianut sistem penjaminan mutu yang mengarah pada keunggulan menurut customer.⁹

Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan tiap-tiap madrasah misalnya penerapan sistem penjaminan mutu

⁸ Deden Makbulloh, *Pendidikan Islam dan Sistem Pejaminan Mutu*, 89

⁹ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, 7

madrasah negeri akan berbeda dengan madrasah yang berbasis pesantren, penerapan sistem penjaminan mutu madrasah yang berbasis pesantren ini juga akan berbeda antara yang pesantren modern dengan pesantren yang mengusung konsep salafiyah. Sistem penjaminan mutu internal yang meliputi penetapan standar, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pemenuhan mutu, dan evaluasi mutu merupakan pedoman penjaminan mutu dari BAN-SM bagi lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah. Namun dalam penerapannya di sekolah dan madrasah akan berbeda-beda.

Dalam buku sistem penjaminan mutu internal yang disusun oleh Ridwan A. Sani et.al. dijabarkan bahwa sistem penjaminan mutu internal dapat dilakukan dengan langkah berikut, yaitu: menetapkan standar yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan serta kondisi satuan pendidikan yang didasarkan prioritas, melakukan pemetaan mutu dengan menentukan indikator mutu, menyusun instrumen, mengumpulkan data EDS dan menganalisisnya serta menetapkan akar masalah, menyusun rencana pemenuhan mutu yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator yang melibatkan seluruh stakeholder yang didasarkan pada analisis EDS dengan menggunakan alat bantu manajemen, mengimplementasikan pemenuhan mutu dengan

menetapkan penanggung jawab program, alokasi pendanaan yang disesuaikan dengan kondisi serta melakukan pelaporan program dan melakukan evaluasi pemenuhan mutu dengan menyusun rencana evaluasi, membuat indikator dan instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi dan penyusunan rekomendasi.¹⁰

Sistem penjaminan mutu internal berbasis pesantren ini juga yang dilakukan MA Darul Huda Mayak sebagai madrasah yang berada dalam lingkungan pesantren yang masih kental dengan nilai-nilai pesantren salafiyah. Madrasah ini dengan sistem penjaminan mutunya mengalami peningkatan murid dari tahun ke tahun (pada tahun 2013 siswa berjumlah 1892, tahun 2017 jumlah siswa 2323, di tahun 2018 siswa berjumlah 2422) serta mampu menjaga eksistensinya dibandingkan madrasah dengan basis yang sama di Ponorogo. MA Darul Huda dianggap memiliki kurikulum yang lengkap oleh masyarakat karena tak hanya mengembangkan ilmu umum dan agama tetapi juga membekali peserta didik untuk berguna di masyarakat dan jenjang selanjutnya seperti program penilaian ibadah amaliyah, karya tulis ilmiah dan muatan lokal kaligrafi

¹⁰ Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan* (Tangerang: Tsmart Printing, 2018) 32-35

dan pengajian sebagai ciri khas MA Darul Huda yang dimasukkannya dalam kurikulum.

Salah satu bentuk keberhasilan dari sistem penjaminan mutunya adalah mendapat penghargaan sebagai Madrasah Aliyah dengan jumlah siswa terbanyak yang diterima di PTKIN lewat jalur SPAN-UM-PTKIN¹¹ dan hasil nilai UAMBNBK yang membanggakan dengan menduduki peringkat di 10 besar teratas di kabupaten Ponorogo dari tiga jurusan peminatan yang ada dan 2 teratas seprovinsi.¹² Selain itu, madrasah selalu menargetkan bahwa siswa siswinya harus lulus 100 % dan hal sudah dibuktikan namun di beberapa kasus madrasah ini terpaksa tidak meluluskan karena siswa siswinya belum memenuhi kriteria khusus dari madrasah yaitu akhlaqul karimah.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa madrasah tersebut bermutu jika dilihat dari banyak lulusan yang diterima di pendidikan lanjut dan prestasinya. Dalam hal ini jika madrasah tidak memiliki penjaminan mutu yang baik tentu hal tersebut juga akan sulit dicapai.

¹¹ MA Darul Huda, MA Darul Huda dengan Siswa Terbanyak yang Diterima pada Jalur SPAN-UM-PTKIN, <http://www.darulhudamayak.net/ma-darul-huda-dengan-siswa-terbanyak-yang-diterima-pada-jalur-span-um-ptkin/>, 14 Mei 2020

¹² MA Darul Huda, MA Darul Huda Dominasi 10 Peringkat Teratas UAMBNBK Se-Ponorogo, <http://darulhudamayak.net/ma-darul-huda-dominasi-10-peringkat-teratas-umbnbk-se-ponorogo/>, 14 Mei 2020

¹³ Wawancara dengan Ustadz Umar Salim, 7 Januari 2019

Dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas sistem penjaminan mutu berbasis pesantren dengan studi kasus di Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak dalam tesis yang berjudul Sistem Penjaminan Mutu Madrasah berbasis Nilai-nilai Pesantren (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan standar mutu madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak?
2. Bagaimana pemetaan mutu (EDS) madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak?
3. Bagaimana perencanaan pemenuhan mutu madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak?
4. Bagaimana pemenuhan mutu madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak?
5. Bagaimana evaluasi pemenuhan mutu madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mendiskripsikan penetapan standar mutu madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak

2. Mendiskripsikan pemetaan mutu (EDS) madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak
3. Mendiskripsikan penyusunan rencana pemenuhan mutu madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak
4. Mendiskripsikan pelaksanaan pemenuhan mutu madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak
5. Mendiskripsikan evaluasi pemenuhan mutu madrasah berbasis pesantren di MA Darul Huda Mayak

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mutu pendidikan dalam mengembangkan penjaminan mutu sekolah dan madrasah terkhusus bagi madrasah berbasis pesantren yang saat ini sedang berkembang di Indonesia sehingga dengan terjaminnya mutu madrasah dan sekolah diharapkan mutu pendidikan terus meningkat.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi madrasah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak madrasah agar mampu mengembangkan mutu yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat di zaman modern 4.0 serta menambah bahan acuan dalam merumuskan program-program dalam rangka penjaminan mutu madrasah.
- b. Bagi kepala madrasah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kepala madrasah dalam menjadikan lembaga yang bermutu dan merubah *mind set* seluruh *stakeholder* ke arah mutu yang jelas dan menerapkan paradigma manajemen yang baik.
- c. Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat merubah mind set para guru dan siswa untuk terfokus pada mutu yang lebih baik dan sesuai kebutuhan zaman.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menegaskan pada seluruh masyarakat bahwa Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan pelayanannya guna mewujudkan karakter bangsa yang mengamalkan nilai-nilai keislaman khususnya madrasah yang berbasis pesantren.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang sistem penjaminan mutu internal masih jarang dilakukan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Harli dalam tesis yang berjudul “Manajemen Mutu Berbasis Pesantren: Studi Kasus di SMA An Nur 2 Bululawang Malang” yang fokus pada perencanaan mutu, implementasi mutu, dan implikasi mutu berbasis pesantren. Hasil dari penelitian tersebut adalah perencanaan mutu dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan perencanaan dengan mengumpulkan data kemudian dianalisis untuk menentukan mutu yang ingin dicapai, dan merencanakan pencapaian mutu dengan berlandaskan SNP. Implementasi manajemen mutu dilakukan dengan beberapa program yaitu meliputi program unggulan, harian, mingguan, dan semesteran. Implikasi manajemen mutu tersebut di antaranya peningkatan *output* dan *outcome* pendidikan, terbentuknya konsensus peningkatan mutu, kedisiplinan guru semakin meningkat dan lainnya. Letak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ada pada konten yang dibahas yaitu manajemen mutu berbasis pesantren dengan terfokus pada perencanaan mutu, pelaksanaan mutu dan dampak mutu. Sedangkan penelitian ini membahas pada penjaminan mutunya sehingga secara teori penelitian ini lebih

spesifik dari penelitian yang dilakukan oleh Harli karena dalam manajemen mutu terdiri dari beberapa komponen meliputi perencanaan, peningkatan, kontrol/ pengendalian dan penjaminan mutu. Selain itu, bentuk lembaga yang menjadi lokasi penelitian juga berbeda karena SMA dan MA adalah bentuk lembaga yang berbeda. Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang mutu.

Penelitian lain yang pernah dilakukan terkait hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Nikmah dengan judul Pengelolaan Madrasah Berbasis Nilai Pesantren (studi kasus di MTs. Al-Islam Joresan Ponorogo) membahas tentang nilai-nilai pesantren yang dikembangkan di lembaga tersebut, pengelolaan guru berbasis nilai pesantren dan pengelolaan kurikulumnya. Hasil penelitian tersebut nilai pesantren yang ditanamkan di pesantren tersebut adalah nilai esensial seperti keikhlasan, kesederhanaan dan lainnya. Dalam pengelolaan guru madrasah tersebut melakukan perencanaan guru berbasis nilai pesantren, merekrut guru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai pesantren, menyeleksi, melakukan pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, dan kompensasi yang disesuaikan dengan pengabdian. Pengelolaan kurikulum di madrasah tersebut adalah perencanaan kurikulum yang disesuaikan

dengan nilai pesantren, pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan meningkatkan mutu proses pembelajaran, dan evaluasi yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan dan kemudian diadakan perbaikan dan peningkatan pendidikan dan pengajaran. Perbedaan penelitan tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah tema pembahasan yang membahas pengelolaan pendidikan sedangkan penelitian ini membahas tentang tema yang lebih spesifik pada sistem penjaminan mutu internal madrasah. Kesamaan penelitian terletak pada bentuk lembaga yang diteliti yaitu madrasah berbasis pesantren dengan nilai-nilai pesantren di dalamnya. yaitu madrasah berbasis pesantren dengan nilai-nilai pesantren di dalamnya.

Artikel yang ditulis oleh Siti Roskina Mas juga membahas terkait penjaminan mutu yang tersusun dalam jurnal manajemen pendidikan yang berjudul “Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan MAN”. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Standar Acuan Minimal yang tertuang dalam visi dan misi, target dan standar minimal seluruh bidang di madrasah telah menjadi standar utama pada penjaminan mutu kurikulum dan proses belajar mengajar, kesiswaan, ketenagaan guru, fasilitas dan asrama. Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Siti Roskina adalah sama-sama membahas penjaminan mutu tetapi hanya membahas seputar

visi dan misi serta standar yang ditetapkan madrasah dalam menjamin mutu. Dan terbatas pembahasan tersebut menjadi salah satu perbedaannya dengan penelitian ini. Bentuk lembaga yang dijadikan lokasi penelitian adalah MAN yang berbeda dengan madrasah berbasis nilai-nilai pesantren.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yang menggunakan kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali data mengenai sistem penjaminan mutu internal melalui wawancara. Peneliti juga akan melakukan observasi guna melihat sikap dan perilaku peserta didik, suasana rapat guru dan budaya yang dilestarikan di madrasah guna melihat nilai-nilai pesantren yang tercermin dalam diri mereka. Dokumentasi juga dilakukan guna mendapatkan data mengenai sistem penjaminan mutu melalui manual mutu, prosedur mutu, petunjuk kerja dan dokumen pendukung yang ada.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan pemahaman mendalam pada konteks waktu dan situasi yang

bersangkutan, yang dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa manipulasi dengan jenis data kualitatif. Proses penelitian ini dilakukan dengan mengamati kehidupan orang, berinteraksi dengannya, berusaha memahami bahasa serta pemahaman mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dengan waktu yang cukup lama.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan langsung terjun ke lapangan guna melakukan pengamatan secara mendalam pada beberapa kegiatan yang ada di lapangan dan berinteraksi dengan pelaku pendidikan yang berkompeten dalam tema yang diangkat peneliti dan menemukan data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang ingin dijawab oleh peneliti.

Studi kasus merupakan penelitian yang mempelajari seorang individu, kelompok atau lembaga yang dianggap memiliki atau mengalami kasus tertentu secara intensif.¹⁵ Studi kasus merupakan penelitian yang berusaha mengeksplorasi sebuah kasus dari beberapa rentang waktu dengan mengumpulkan data secara mendalam dan detail yang membutuhkan sumber-

¹⁴Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 39.

¹⁵ *Ibid.*, 50.

sumber informasi yang banyak dengan konteks yang kaya.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang disusun dalam konsep studi kasus. Dalam hal ini, peneliti akan menguak kasus yang berkaitan dengan penjaminan mutu internal yang dikombinasikan dengan nilai-nilai pesantren yang ada. Peneliti berfokus pada sistem penjaminan mutu internal terjadi pada sebuah lembaga pendidikan mulai dari penetapan standar, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pemenuhan mutu dan evaluasi pemenuhan mutu yang di ekspor secara intensif, terperinci dan mendalam.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif akan menempatkan peneliti sebagai instrumen atau alat peneliti sehingga kehadiran peneliti sangat penting. Peneliti kualitatif adalah *human instrument* yang menetapkan fokus penelitian, menentukan informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menafsirkannya dan menyimpulkan atas temuannya.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan hadir langsung ke lapangan untuk mencatat informasi, menganalisis, memotret dan menggambarkan situasi sosial yang diteliti sehingga data

¹⁶ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 70.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 222.

menjadi lebih jelas dan bermakna. Peneliti akan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan responsif dalam memproses data, mengklarifikasi data dan mengikhtisarkannya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak Kabupaten Ponorogo. Lokasi penelitian ini dipilih karena masalah yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan kasus penjaminan mutu yang ada di madrasah tersebut. MA Darul Huda merupakan madrasah yang berada dalam naungan yayasan pondok pesantren Darul Huda dengan metode *Salafiyah Haditsah*. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pendidikan berbasis pesantren yang melestarikan tradisi dan nilai-nilai kepesantrenan, Selain itu, Madrasah Aliyah Darul Huda dikenal memiliki jumlah murid yang besar namun juga memiliki prestasi yang baik dan *outcome* yang baik yang terbukti dengan diterimanya penghargaan sebagai Madrasah dengan jumlah siswa terbanyak yang diterima di perguruan tinggi Islam melalui jalur SPAN-UM-PTKIN serta siswa- siswinya menduduki peringkat 10 teratas di tingkat Madrasah sekabupaten. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa madrasah memiliki penjaminan mutu yang baik. Sehingga dengan adanya penjaminan mutu yang baik dan nilai-nilai pesantren yang muncul di madrasah

tersebut menunjukkan bahwa madrasah ini dirasa sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian.

4. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sebuah data mentah yang dikumpulkan peneliti melalui observasi dan wawancara dari sumber utama secara langsung untuk kepentingan penelitian dan data tersebut merupakan data baru sebelumnya tidak ada.¹⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala madrasah sebagai narasumber utama, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, dan sekretaris atau staf administrasi madrasah sebagai pihak utama dalam melakukan penjaminan mutu. Sumber data sekunder adalah data yang dikutip oleh peneliti dari sumber tersedia yang berkaitan dengan kepentingan penelitian melalui studi dokumentasi.¹⁹ Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari dokumen sistem penjaminan mutu seperti manual mutu, prosedur mutu, petunjuk kerja dan dokumen pendukungnya jika ada dalam bentuk data evaluasi diri madrasah, rencana kerja madrasah dan rencana kerja tahunan madrasah yang sudah tersusun secara sistematis meliputi delapan komponen

¹⁸ Azuardi Juliandi, *Metodologi Penelitian* (Medan: Umsu Press, 2014) 65

¹⁹ *Ibid*, 65

SNP. Selain itu, data hasil observasi yang dilakukan peneliti juga menjadi sumber data penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. *Pertama*, Observasi merupakan pengalaman dan pencatatan yang sistematis pada gejala yang muncul pada objek penelitian.²⁰ Dalam observasi, peneliti akan melihat bagaimana proses penjaminan mutu melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan secara rutin oleh MA Darul Huda dari proses KBM dan penilaian semester, program-program ciri khas MA Darul Huda, situasi pertemuan resmi, lingkungan MA Darul Huda, sistem informasi MA Darul Huda serta nilai-nilai pesantren yang membudaya dilingkungan MA Darul Huda melalui sikap yang ditunjukkan oleh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

Kedua, Wawancara yaitu komunikasi antara dua orang yang meliputi seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang narasumber dengan mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu.²¹ Jenis wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin

²⁰Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 129.

²¹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 180.

merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Hal yang perlu dilakukan pewawancara adalah hanya membuat beberapa pokok masalah yang ingin diteliti. Pada prosesnya pewawancara akan mengutarakan pertanyaan sesuai situasi yang ada namun pewawancara harus memiliki pedoman *interview* agar tetap berada pada arah yang dituju.²² Peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok permasalahan dan mengembangkan pertanyaan sesuai situasi dan batasan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber Kepala Madrasah sebagai narasumber utama, Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum dan sekretaris madrasah berkaitan langsung dengan pembahasan penelitian ini. Cara yang dilakukan dengan kepala sekolah digunakan untuk menggali kebijakan penjaminan mutu yang meliputi serangkaian proses penjaminan mutu dari menetapkan standar sampai evaluasi pemenuhan mutu serta menggali kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan kepala madrasah terhadap kendala tersebut dan hal-hal yang mendukung proses penjaminan mutu yang ada dalam proses tersebut.

²² Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 85

Wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala madrasah bagian kurikulum digunakan untuk menggali informasi terkait standar yang telah diberlakukan dan bagaimana proses penjaminan mutu berjalan dari menetapkan standar sampai dengan evaluasi pemenuhan mutu. Wawancara yang dilakukan pada staf administrasi atau sekretaris madrasah untuk menggali tentang proses penjaminan mutu dan pendokumentasiannya pada tiap tahapan penjaminan mutu beserta pelaku, teknik dan media dalam penjaminan mutu.

Ketiga, Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental seseorang.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi evaluasi diri madrasah dan program kerja sekolah baik jangka pendek dan menengah. Dokumen sistem penjaminan mutu ini diperlukan untuk mengungkap keadaan mutu dan prioritas mutu madrasah, data program dan kegiatan mutu madrasah yang dilaksanakan dalam pemenuhan mutu, standar mutu, dan sasaran mutu madrasah serta pembiayaan madrasah. Dokumen program kerja madrasah digunakan untuk mengetahui rencana strategis dalam penjaminan mutu madrasah.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 240.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dalam mereduksi data dari sumber observasi peneliti menyusun dan menarasikan data data yang diamati dilapangan ke dalam tabel berbentuk laporan hasil observasi. Tabel tersebut kemudian disesuaikan dengan tema-tema yang dibutuhkan untuk kemudian dijadikan paparan data. Ini juga dilakukan pada data hasil wawancara peneliti menarasikan seluruh data dari hasil wawancara terlebih dahulu kemudian disusun berbentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara tersebut kemudian dipilih data-data yang sesuai dengan topik yang sedang di susun kemudian disajikan dalam paparan data. Untuk data dokumentasi peneliti akan menyeleksi data penting yang berhubungan dengan topik penelitian.
- b. Dalam menginterpretasi data, peneliti akan bertanya langsung tentang penggunaan beberapa istilah asing yang ditemukan di lapangan dalam data observasi, wawancara maupun dokumentasi.
- c. Pada tahap penyajian data, peneliti akan menyajikan data secara sistematis dan utuh sehingga memudahkan peneliti

dalam memahami dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini penyajian data disusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain.

- d. Dalam memverifikasi dan membuat kesimpulan peneliti akan menyesuaikan dengan kondisi nyata sehingga kesimpulannya akan valid.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas ini berkaitan dengan masalah kualitas data dan ketepatan metode yang dipergunakan dalam penelitian.²⁴ Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan:

a. Pengamatan yang tekun

Pengamatan yang tekun merupakan pengamatan yang dilakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini, perekaman kepastian data dan urutan peristiwa dilakukan secara pasti dan sistematis serta deskripsi data akan lebih akurat.²⁵ Peneliti akan menginterpretasi dengan berbagai cara secara konsisten dalam menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber.

²⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 78.

²⁵ *Ibid*, 272.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses penguatan bukti dari beberapa individu berbeda, jenis data dalam deskripsi, serta beberapa tema pada penelitian kualitatif.²⁶ Teknik triangulasi dilakukan antar sumber data antar teknik pengumpulan data dan antar pengumpul data. Peneliti akan mencocokkan data yang ditemukan dari satu sumber kepada sumber lain. Apabila terdapat kesamaan data maka peneliti akan menempatkan data tersebut pada paparan data. Apabila tidak ditemukana kesamaan data maka peneliti akan mengkonfirmasi kembali kepada narasumber pertama untuk memvalidasi data tersebut.

c. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan.

Setelah peneliti menarasikan dan menyusun hasil wawancara dalam bentuk laporan, peneliti akan membawa laporan tersebut kepada informan untuk mengecek laporan hasil wawancara yang kemudian jika informan membenarkan maka peneliti akan memasukkannya ke dalam paparan data.

²⁶ Ibid, 82.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam enam bab yang saling berkaitan, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, dan lainnya sebagai dasar pemikiran peneliti.

Bab II berkaitan tentang kajian teori mengenai sistem penjaminan mutu yang akan membahas sistem penjaminan mutu dan sistem penjaminan mutu berbasis pesantren dengan mengadopsi dari teori sistem penjaminan mutu.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab IV akan memaparkan data temuan yang ada di lapangan yaitu penetapan standar mutu, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu serta nilai-nilai pesantren yang tertanamkan MA Darul Huda Mayak

Bab V akan menganalisis data temuan di lapangan berdasarkan teori tentang sistem penjaminan mutu internal madrasah dan nilai-nilai pesantren yang tercermin didalamnya..

Keseluruhan laporan penelitian akan diakhiri dengan bab VI yaitu penutup, yang berisi kesimpulan serta saran-saran.



BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MADRASAH BERBASIS NILAI-NILAI PESANTREN

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah

1. Makna Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah

a. Mutu

Mutu berarti derajat/ tingkat keunggulan suatu produk barang maupun jasa. Produk tersebut dapat berupa *tangible* ataupun *intangibile*. Mutu juga dapat dikaitkan dengan gairah dan harga diri. Mutu memiliki pengertian yang beragam yang bergantung pada barang yang dihasilkan, dipakai, dan anggapan orang. Dalam definisi modern mutu adalah sesuatu yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Dalam arti konvensional mutu adalah karakteristik suatu produk. Dalam konsep dasar mutu, mutu merupakan segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena sesungguhnya tidak ada proses yang sempurna.¹

Menurut Arcaro, mutu dapat diartikan derajat variasi standar tertentu dan mengarah pada biaya yang rendah. Menurut Daming, mutu adalah pemecahan untuk mencapai

¹ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 54.

kesempurnaan terus-menerus. Menurut Juran mutu dimaknai sebagai sebuah kesesuaian penggunaan atau tepat untuk dipakai.

Mutu terkadang dimaknai dalam konsep absolut artinya mutu dapat disamakan dengan sifat baik, cantik, dan benar. Produk-produk bermutu merupakan sesuatu yang sempurna dengan biaya mahal. Dalam konteks tersebut mutu digunakan untuk menunjukkan status tertentu dan status kepemilikan barang yang orang lain tidak mampu memilikinya. Dalam kaitannya pendidikan, konsep mutu adalah hal yang mewah karena hanya sebagian kecil institusi yang mampu memberikan pendidikan bermutu tinggi.²

Menurut Crosby menjelaskan bahwa mutu merupakan kesesuaian individu terhadap persyaratan/tuntutan. Menurut Ishikawa mutu adalah kepuasan pelanggan sehingga pengertian mutu tidak dapat dipisahkan dari kepuasan pelanggan. Menurut Goetsch dan Davis mutu merupakan kondisi dinamis terkait produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. Sehingga dari beberapa pendapat di atas mutu merupakan keadaan yang

² Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, 54-55.

sesuai dan melebihi harapan pelanggan sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan.³

Mutu merupakan kemampuan produk atau jasa yang mampu mencukupi kebutuhan atau harapan pelanggan. Pelanggan produk atau jasa dapat berupa pelanggan internal maupun eksternal. Dalam pendidikan, yang disebut pelanggan internal tersebut adalah siswa sedangkan pelanggan eksternal adalah masyarakat dan dunia industri.⁴

Secara umum, mutu dapat disimpulkan dengan kesesuaian produk baik jasa maupun barang terhadap harapan atau kebutuhan pelanggan yang memerlukan perbaikan terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan dengan biaya yang rendah.

b. Madrasah

Madrasah merupakan satuan pendidikan baik itu tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan ilmu agama Islam saja, ataupun mengajarkan gabungan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan yang mengajarkan ilmu umum berbasis ajaran Islam. Di dalam dunia pendidikan madrasah yang mengajarkan ilmu agama 100% adalah madrasah diniyah. Sedangkan

³ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrsi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta: 2015), 304-305.

⁴ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu* (Bandug: Refika Aditama, 2016), 6-7.

madrasah yang memberikan materi umum merupakan madrasah formal yang dapat mengeluarkan ijazah diakui negara yang berdiri dilingkungan pesantren atau masyarakat muslim.⁵

Madrasah merupakan isim makan dari kata *darasa-yadrusu-darsan wa durusan wa dirasatan* yang memiliki arti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan using, melatih dan mempelajari.⁶ Menurut Muhaimin sebagaimana yang dikutip oleh Zainal Arifin madrasah adalah tempat meningkatkan kecerdasan peserta didik, memberikan pengetahuan, menghilangkan kebodohan, serta mengasah ketrampilan yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik.⁷

Menurut Sutrisno yang dikutip Zainal Arifin madrasah didirikan dengan tujuan mengumpulkan keunggulan yang ada di pesantren dan sekolah. Namun madrasah saat ini tertinggal dengan pesantren yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama Islam dan tertinggal dengan sekolah dalam ilmu umumnya.

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 20-19.

⁶ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 397.

⁷ Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 26.

Hal ini yang mengharuskan madrasah berbenah diri kembali pada tujuan awalnya.⁸

Madrasah memiliki bermacam-macam tipe di antaranya madrasah negeri, madrasah swasta, madrasah pada pesantren dan lainnya. Tipe madrasah yang terlahir dari pesantren ini sejalan dengan beberapa tipe pesantren menurut Manfred Ziemek yang memiliki 5 tipe, yaitu pesantren yang hanya memiliki sarana masjid beserta rumah kiai, pesantren yang memiliki sarana masjid, rumah kiai dan asrama, pesantren yang memiliki masjid, rumah kiai, pondok, dan madrasah, pesantren yang memiliki masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan program ketrampilan, dan pesantren yang memiliki tiga sarana utama, program ketrampilan, sekolah umum dan perguruan tinggi.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya madrasah negeri dan madrasah swasta namun ada pula madrasah yang berbasis pesantren yang merupakan madrasah yang didirikan dilingkungan pesantren dan memiliki nilai-nilai pesantren di dalamnya.

Madrasah merupakan lembaga yang mewakili dua hal yaitu: sejarah dan ideology karena telah melahirkan banyak

⁸ Ibid, 27-28.

⁹ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Islam Assalam Surakarta* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2011), 175-181.

tokoh besar bangsa dan mengawal serta memperjuangkan ajaran Islam.¹⁰ Madrasah memiliki kekhasan berupa penyajian mata pelajaran agama Islam namun juga memiliki perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan madrasah. Hal ini terjadi karena suasana madrasah mengandung perwujudan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan lembaga, kehidupan moral yang beraktualisasi, dan manajemen yang professional, terbuka dan aktif dalam masyarakat.¹¹

Madrasah merupakan lembaga pendidikan dalam naungan Kementrian Agama. Madrasah mengalami berbagai perubahan bentuk guna meningkatkan daya saing dipentas global di antaranya:¹²

- 1) Madrasah negeri. Madrasah ini adalah madrasah milik pemerintah yang dimaksudkan untuk menjadi *pilot project* madrasah swasta.
- 2) Madrasah wajib belajar. Madrasah ini diperkenalkan di tahun 1958 sampai 1959 yang ditujukan untuk kalangan petani dan pedagang. MWB ini memberikan 25% porsi untuk ilmu agama, 75 % pengetahuan umum sekaligus diberikan ketrampilan saat peserta didik mencapai kelas 5 sampai kelas 8.

¹⁰ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 69.

¹¹ Ibid, 70.

¹² Ibid, 81-87.

- 3) Madrasah pada pondok pesantren. Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pesantren sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat. Pesantren tersebut merupakan pesantren dengan model *khalafiyah* atau pondok pesantren modern dengan menggabungkan dua sistem dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu pesantren dan sekolah dengan tetap mempertahankan ciri khas masing-masing. Madrasah ini memiliki kegiatan yang berbeda dengan madrasah konvensional yaitu program keagamaan yang bertujuan membentuk peserta didik yang berwawasan ilmu keagamaan yang luas berbasis pesantren.
- 4) Madrasah keagamaan. Madrasah ini memiliki kurikulum 70% agama dan 30 % untuk materi umum.
- 5) Madrasah program ketrampilan. Madrasah ini merupakan madrasah yang diberi program ekstrakurikuler dengan berbagai bidang keilmuan seperti menjahit, reparasi elektronik, dan otomotif.
- 6) Madrasah model. Madrasah ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kualitas dibidang sains dan matematika.
- 7) Madrasah terpadu. Madrasah ini menyelenggarakan MI, MTs., MA dalam satu lokasi sebagai satu kesatuan sekolah.

c. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Mutu terlahir dari banyak faktor salah satunya sistem penjaminan mutu. Sistem ini akan mengawal mutu dan bertanggung jawab dalam mendistribusikan output lembaga pendidikan.¹³ Sistem sendiri menurut Ludwig Von Bartalafy yaitu seperangkat unsur yang berkaitan satu sama lain di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Antol Rapo Rot merupakan sekumpulan kesatuan dan perangkat yang berhubungan satu sama lain. Sedangkan menurut L. Ackof adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik terdiri dari beberapa bagian dan saling bergantung satu sama lain.¹⁴

Sistem dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang meliputi dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berinteraksi untuk memenuhi tujuan tertentu. Sistem dari beberapa sudut pandang dapat dikategorikan sebagai sistem abstrak (sistem berbentuk pemikiran yang tidak tampak secara fisik), sebagai sistem alamiah (sistem yang terjadi melalui proses alam), sebagai sistem tertentu dan tak tentu (sistem yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi), dan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka sistem yang tidak berhubungan

¹³ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 6.

¹⁴ Ondi Saondi, *Membangun Manajemen Pendidikan Berbasis Sistem Informasi*, 169.

dengan lingkungan luar dan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar).¹⁵

Dalam Permendiknas nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu menyebutkan bahwa penjaminan mutu adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.¹⁶ Menurut Edward Sallis, jaminan mutu merupakan sebuah metode untuk menghasilkan produk yang terhindar dari cacat dan kesalahan. Sistem yang menjamin mutu barang atau jasa adalah sistem penjaminan mutu. Sistem ini akan menempatkan secara tepat cara memproduksi yang sesuai standar. Standar-standar mutu dikelola oleh beberapa prosedur yang ada dalam sistem jaminan mutu.¹⁷ Jaminan mutu ini merupakan salah satu komponen dari Total Quality Management dalam mengelola mutu lembaga pendidikan.

Dalam pedoman penjaminan mutu pendidikan nasional menyebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sistem penjaminan mutu yang dijalankan di

¹⁵ Ondi Saondi, *Membangun Manajemen Pendidikan Berbasis Sistem Informasi*, 123-124.

¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, <https://Bsnp/Permendikbud28-2016spmpdasmn.Pdf>, 29 Oktober 2019.

¹⁷ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 58-59.

satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.¹⁸ Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah seperangkat unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang sistematis, terencana dengan jelas dan memiliki tindak lanjut.¹⁹

Sistem penjaminan mutu merupakan sebuah sistem yang ditempatkan sebagai bagian pada keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. Maka penjaminan mutu memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengukur dan menilai dalam mencapai standar mutu tertentu. Selain itu, SPMP berfokus pada meningkatkan mutu secara berkelanjutan dengan mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja dan mutu program studi lembaga pendidikan. Sehingga akreditasi digunakan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan melalui BAN (Badan Akreditasi Nasional).²⁰

Menurut Edward Sallis Jaminan mutu bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi dan didesain untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan

¹⁸Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar dan Menengah, [Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf](http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf), 29 Oktober 2019, 27.

¹⁹ Ibid, 15-16.

²⁰ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 7-8.

spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya.²¹ Selain itu, tujuan dari penjaminan mutu adalah untuk membangun kepercayaan pelanggan dengan memenuhi standar minimum pada komponennya yaitu input, proses, dan hasil atau outcome yang ingin dicapai stakeholders.²²

Pada pedoman penjaminan mutu nasional menyebutkan sistem penjaminan mutu pendidikan memiliki fungsi untuk mengendalikan pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah memiliki tujuan untuk menjamin standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah terpenuhi dengan cara yang sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga secara mandiri dapat menumbuhkembangkan budaya mutu.²³

Penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan sistemik dan terpadu baik itu dilakukan oleh lembaga pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat dalam

²¹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, 58-59.

²² Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 6-7.

²³ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar Dan Menengah, [Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf](http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf), 29 Oktober 2019, 15-16; Idem, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, *Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* (t.tp: 2017), 1.

meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.²⁴ Penjaminan mutu ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.²⁵

Penjaminan mutu pendidikan mempunyai paradigma-paradigma yaitu pendidikan untuk semua yang inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik karena latar belakangnya, pembelajaran sepanjang hidup yang menjadikan peserta didik sebagai pusat, memperlakukan, memberikan fasilitas, dan memotivasi peserta didik untuk menjadi mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan, dan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan.²⁶

Sistem penjaminan mutu internal yang baik dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan tentang SPMI pada seluruh komponen, meningkatkan pemahaman guru tentang SNP, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal. Hal ini diperlukan karena masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah yang berkenaan tentang rendahnya

²⁴ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, 131.

²⁵ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 6-7.

²⁶ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, 131; Idem, Dr. I Made Alit Mariana, et.al., *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali* (Denpasar: LPMP Provinsi Bali, 2013), 29.

pemahaman warga sekolah pada SPMI, tenaga pendidik dan kependidikan yang masih memerlukan pengembangan tentang pemahaman tugasnya, dan kurang terampilnya sekolah dalam penerapan SPMI.²⁷

Dalam memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan di antaranya melalui menata kelembagaan dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam manajemen, meningkatkan kemampuan manajerial kepala madrasah, meningkatkan mutu proses pembelajaran dan menyediakan sarana dan prasana yang memadai.²⁸

Satuan pendidikan sebagai pelaksana penjaminan mutu yang utama wajib membantu dan menyediakan pemenuhan standar. Pemerintah juga wajib melakukan pengawasan, evaluasi, fasilitasi, memberikan saran arahan serta bimbingan pada satuan pendidikan. Hal ini memunculkan keterkaitan yang mengharuskan dibuatnya desain tentang tugas dan kewenangan

²⁷ Nyoman Sridana et al, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA)", *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Volume1 Nomer 1 (2018): 45-51.

²⁸ Khoirul Anwar, "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume1 Nomer 1 (2018): 41-56.

setiap komponen dalam menjamin mutu pendidikan yang kemudian lahirlah standar mutu pendidikan.²⁹

Sistem penjaminan mutu merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya *monitoring*, evaluasi atau kajian mutu.³⁰ Bentuk dari penjaminan mutu ada dua yaitu membuat desain untuk memperbaiki mutu dan mengembangkan mutu secara berkelanjutan. Dalam hal ini tersemat nilai, prinsip dan asas yang diyakini *stakeholders*. Maka penjaminan mutu adalah sistem yang mengandung nilai dan asas dalam melakukan perubahan, memperbaiki, dan meningkatkan mutu secara terus menerus.³¹

Stebbing menjelaskan tentang kegiatan penjaminan mutu dalam Dorothea E. Wahyuni sebagai berikut:³²

- 1) Penjaminan mutu bukanlah kegiatan pengendalian mutu. Namun keduanya adalah bentuk komitmen terhadap mutu secara keseluruhan.
- 2) Penjaminan mutu bukan sebuah proses mengecek secara luar biasa.
- 3) Penjaminan kualitas memerlukan seseorang yang sangat bertanggung jawab dalam mengambil keputusan pada

²⁹ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 6-7.

³⁰ Ibid,

³¹ Ibid,

³² Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 262-263.

bidang yang diperlukan dalam membentuk sebuah rancangan.

- 4) Penjaminan mutu tidak memerlukan biaya besar dan bukan hal yang dapat disebut pemborosan.
- 5) Penjaminan mutu memuat kegiatan pengendalian mutu dengan prosedur yang benar sehingga perbaikan efisiensi, produktivitas, dan probabilitas dapat tercapai.
- 6) Segala sesuatu dapat dikerjakan dengan baik sejak awal dan setiap waktu dengan penjaminan mutu.

Penjelasan Dorothea dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu merupakan sebuah proses dalam mencapai biaya efektif dan mendorong peningkatan produktivitas dan dapat mencapai kepuasan pelanggan.

Kepala sekolah dapat membuat pola manajemen penjaminan mutu internal sekolah dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dijalankan dengan sistematis dan optimal.³³ Sistem penjaminan mutu pendidikan Islam bisa diukur melalui berbagai aspek seperti yang dijelaskan Thomas C. Powell, misalnya: *committed leadership, adoption and communication of TQM, closer customer relationships, benchmarking,*

³³ Suratno, "Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah dalam Upaya Pengembangan Program Akademik Unggulan", *Media Manajemen Pendidikan*, Volume 1 Nomer 2 (2018): 217-224.

*increased training, open organization, employ empowerment, zero-defect mentality, process improvement, dan measurement.*³⁴ Hal tersebut berarti penjaminan mutu memerlukan pemimpin yang komitmen, mengadopsi manajemen mutu terpadu, tolak ukur mutu yang jelas, pelatihan bagi sumber daya manusianya, organisasi dengan sistem terbuka, pemberdayaan *stakeholder* / SDM, pengembangan mental SDM tentang *zero defect* (mencegah kesalahan dari awal, perbaikan terus menerus dan berkelanjutan).³⁵

Dalam penerapan sistem penjaminan mutu memiliki beberapa tantangan di antaranya efektifitas pendidikan yang kurang memadai, efisiensi pengajaran memiliki beberapa problem, standarisasi pendidikan, birokrasi pendidikan yang sering berubah-ubah, anggaran yang minim, permasalahan pemerataan guru yang karena pendistribusian tenaga guru masih ada kesenjangan, kebijakan pendidikan gratis masih disalah gunakan, adanya perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan.³⁶

³⁴ Deden Makbulloh, *Pendidikan Islam dan Sistem Pejaminan Mutu*, 92.

³⁵ Ibid, 92-95.

³⁶ Kusnandi, Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan, *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, Volume 1 nomer 2 (2017), 116.

Penjaminan mutu merupakan salah satu teknik dari program peningkatan madrasah. Penjaminan mutu ini menjadi suatu teknik untuk menentukan bahwa pelaksanaan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penjaminan mutu dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam proses. Teknik ini berfokus pada *monitoring* yang berkesinambungan dan melembaga menjadi subsistem madrasah. Dengan penjaminan mutu, madrasah akan mendapat informasi yang menjadi umpan balik bagi madrasah dan menjadi jaminan bagi orang tua siswa bahwa madrasah selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Madrasah yang menerapkan penjaminan mutu harus menekankan pada kualitas hasil belajar, dimonitor secara terus menerus dan melakukan pengumpulan analisis terhadap informasi dan data guna memperbaiki proses di madrasah.³⁷

Dalam menerapkan sistem penjaminan mutu kepala sekolah sangat membutuhkan bantuan seluruh *stakeholder* karena sistem penjaminan mutu merupakan proses yang kompleks. Akan sangat sulit untuk dilakukan jika tidak didukung kerja yang optimal dari semua komponen sekolah.³⁸ Madrasah sangat memerlukan komitmen antara kepala madrasah, guru, pegawai administrasi, dan orang tua siswa dalam mengevaluasi

³⁷ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 153-154.

³⁸ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan* (Tangerang: Tsmart Printing, 2018) 9.

kondisi madrasah dan melakukan perbaikan terhadap madrasah.³⁹

Madrasah akan mengalami kesulitan dalam melakukan penjaminan mutu jika budaya mutu pada seluruh komponen tidak mendukung. Budaya mutu dimulai dengan penerapan sistem penjaminan mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyadaran bahwa sistem penjaminan mutu dilakukan untuk kebutuhan manajemen dan untuk mutu akan membantu menumbuhkan budaya mutu. Dan pada akhir pelaksanaan penjaminan mutu diharapkan dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan mutu.⁴⁰

Budaya mutu tidak dapat dimiliki jika *stakeholder* tidak memiliki komitmen dan usaha memperbaiki kondisi di satuan pendidikan. Hal ini juga dapat terjadi jika *stakeholder* juga tidak memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab pada masa depan peserta didik. Jika kepala sekolah tidak melakukan tindakan perbaikan terhadap keadaan dan suasana di satuan pendidikan maka akan sulit memiliki budaya mutu. Budaya mutu akan tumbuh dengan adanya komitmen bersama dalam

³⁹ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 153-154.

⁴⁰ *Ibid*, 12.

meningkatkan mutu dengan melaksanakan penjaminan mutu secara terprogram.⁴¹

2. Komponen Penjaminan Mutu Madrasah

Dalam melakukan penjaminan mutu internal, madrasah harus memperhatikan komponen-komponen penjaminan mutu. Komponen ini akan menjadi bagian yang perlu dijamin mutunya sehingga madrasah dapat disebut bermutu secara internal jika komponen ini bermutu. Komponen-komponen penjaminan mutu internal ada pada tiga dimensi utama yang memiliki sub-sub yang terperinci pada setiap komponennya. Komponen penjaminan mutu internal juga merupakan ruang lingkup penjaminan mutu internal untuk kemudian dievaluasi diri, ditingkatkan mutunya dan diaudit. Komponen-komponen penjaminan mutu internal tersebut yaitu input proses dan output. Masukan (input) terdiri dari jati diri, visi, misi, sasaran dan tujuan, peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, tata pamong, manajemen akademik, kemitraan, sistem informasi, sistem jaminan mutu. Sedangkan proses berupa proses pembelajaran,

⁴¹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 13.

isi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Output berarti keluaran yang berupa lulusan.⁴²

Ruang lingkup penjaminan mutu mencakup penyusunan regulasi dan menetapkan standar, melaksanakan upaya memenuhi standar, mengukur dan evaluasi, memperbaiki dan mengembangkan standar yang bertujuan untuk memenuhi SNP atau melebihinya pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Asas yang dimiliki oleh sistem penjaminan mutu adalah komitmen semua pihak, kepatuhan terhadap regulasi, dorongan internal, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan pencitraan.⁴³

Berkenaan dengan pendidikan, mutu meliputi input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan yaitu hal-hal yang harus ada yang diperlukan saat berlangsungnya proses. Input tersebut yaitu sumberdaya (kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa), perangkat lunak (peralatan, perlengkapan, uang bahan dan lainnya) dan harapan pelaku pendidikan (visi, misi, tujuan dan sasaran). Dalam hal ini mutu diukur dari tingkat kesiapan input. Sedangkan proses merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Proses meliputi proses

⁴² Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 14.

⁴³ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2012), 9.

pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, program, belajar mengajar, monitoring dan evaluasi. Proses ini dapat dikatakan bermutu jika pengkoordinasian serta pemaduan input sekolah dilakukan dengan harmonis sehingga tercipta pembelajaran aktif, memotivasi dan minat belajar, dan mengembangkan peserta didik. *Output* pendidikan adalah prestasi sekolah yang diperoleh dari proses atau upaya yang telah dilakukan sekolah. Dalam hal ini, output yang bermutu adalah prestasi akademik tinggi baik akademik maupun non akademik.⁴⁴

Selain beberapa komponen diatas yang harus dipenuhi madrasah dan pelaku pendidikan juga harus melengkapi beberapa hal yang mendukung sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu pendidikan harus memiliki budaya mutu baik itu pendidikan formal, nonformal, atau informal. Dalam menjamin mutu memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai porsi masing-masing penyelenggara dari satuan pendidikan sampai pemerintah pusat. Pemerintah dan satuan mutu juga harus menetapkan acuan mutu serta memiliki peta mutu dalam melakukan penjaminan mutu. Selain itu, komunikasi yang andal, terpadu,

⁴⁴ H. E. Mulyasa, *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 157-158.

dan tersambung antar penyelenggara penjaminan mutu menjadi komponen penting dalam SPM.⁴⁵

3. Prinsip penjaminan mutu madrasah

Menurut Dedy Mulyasana, dalam mengembangkan paradigma penjaminan mutu sangat diperlukan prinsip-prinsip penjaminan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Madrasah melakukan tindak lanjut setelah dilakukannya evaluasi dan proses penjaminan mutu yang dilakukan secara terus-menerus,
- b. Madrasah melakukan perencanaan yang sistematis, dengan membuat kerangka waktu serta merinci target-target mutu yang ingin dicapai dengan jelas dan terukur,
- c. Mengadakan penyesuaian terhadap otonomi satuan pendidikan,
- d. Menyediakan fasilitas pembelajaran informal masyarakat secara berkelanjutan memakai regulasi yang sederhana,
- e. Melakukan penyempurnaan terhadap penjaminan yang telah dilakukan.

Menurut Ridwan Abdullah Sani, et.al., dalam buku *Penjaminan Mutu Sekolah* proses penjaminan mutu harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, 131.

⁴⁶ Ibid, 132.

- a. Keterlibatan seluruh komponen satuan pendidikan.
- b. Menentukan langkah yang benar sejak awal tanpa melakukan penundaan terhadap proses penjaminan mutu.
- c. Membangun iklim organisasi yang bersifat komunikatif dan kompak agar seluruh komponen mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, teknis pelaksanaan penjaminan mutu (kapan, dimana dan dengan siapa).

Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi.⁴⁸ Mandiri dan partisipatif berarti mampu mengembangkan dan mengimplementasikan dengan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan secara mandiri. Terstandar dilakukan dengan mempergunakan SNP sebagai acuan mutu minimal dan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dapat mentapkannya sebagai standar mutu. Integritas dapat menyiapkan dan mengolah data dan informasi secara jujur yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Sistematis dan berkelanjutan berarti menggunakan lima langkah penjaminan mutu dalam sebuah siklus yang diimplementasikan dengan urut dan berkelanjutan. Holistik

⁴⁷ Ridwan Abdullah Sani et.al, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33.

⁴⁸ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar dan Menengah, <Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf>, 29 Oktober 2019, 27.

berarti memberlakukan penjaminan mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan baik pada organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. Transparan dan akuntabel berarti satuan pendidikan mendokumentasikan dengan baik semua kegiatan penjaminan mutu internal pada dokumen-dokumen mutu dan seluruh pemangku kepentingan bisa mengakses dokumen tersebut.⁴⁹

4. Alur penjaminan mutu madrasah

Penjaminan mutu merupakan bagian manajemen mutu yang lebih luas dari pengendalian mutu. Tahapan yang ada dalam pengendalian mutu yaitu siklus Deming berupa PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) juga tetap dilakukan dalam proses penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu dimulai dengan menetapkan standar mutu dalam proses pendidikan dan standar mutu tersebut merupakan standar nasional pendidikan (SNP). Selanjutnya menetapkan mutu melalui evaluasi diri untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi sekarang dengan standar yang ditetapkan. Kemudian membuat rencana untuk memenuhi standar yang dimulai dari yang paling *urgent* atau

⁴⁹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 31.

yang diprioritaskan. Setelah rencana dibuat selanjutnya tahap implementasi yang kemudian dilakukan evaluasi.⁵⁰

Sistem penjaminan mutu merupakan sebuah siklus yang terpadu dan berkelanjutan. Siklus tersebut sebagai berikut:⁵¹

- a. Dalam penjaminan mutu terdapat lima langkah utama yaitu mengembangkan standar mutu, menetapkan standar, merencanakan pemenuhan, melakukan pemenuhan standar dan mengevaluasi pemenuhan atau mengaudit mutu.
- b. Pada langkah pemenuhan standar, pihak sekolah memerlukan adanya standar dan pedoman pemenuhan mutu dari pihak eksternal yaitu pemerintah sebagai acuan.
- c. Menjadikan pedoman pemenuhan mutu sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam memantau sekolah. Kerangka kegiatan *monitoring* disusun berdasarkan SNP dan data yang diperoleh dari audit/ evaluasi yang dilakukan oleh sekolah secara internal. Pemerintah dapat merencanakan intervensi dengan peta mutu yang diperoleh dari hasil *monitoring* tersebut.
- d. Pemerintah pusat dan daerah dapat mengintervensi dengan keseluruhan tahapan penjaminan mutu.

⁵⁰ Ridwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 10-11.

⁵¹ Ridwan Abdullah Sani, et.al., *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33.

e. Akreditasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah terlaksananya penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.

Dalam buku sistem penjaminan mutu internal yang disusun oleh Ridwan A. Sani, et.al., terdapat beberapa langkah penjaminan mutu internal yaitu menetapkan standar mutu, memetakan mutu, merencanakan pemenuhan mutu, melaksanakan rencana pemenuhan mutu dan evaluasi pemenuhan mutu.⁵²

Hal ini pula yang dilakukan QAA sebagai badan penjaminan kualitas di Inggris yaitu melakukan tinjauan dan audit ke lembaga pendidikan dalam langkahnya menjamin mutu pendidikan.⁵³ Setelah mengaudit mutu, pelaku pendidikan perlu untuk mengadakan studi banding ke sekolah lain guna bertukar informasi. Guna menghadapi tuntutan dan tantangan siswa yang berkualitas, badan penjaminan mutu melakukan langkah awal dengan bertukar pengalaman dan praktik yang baik dan berkontribusi pada pengembangan profesional anggota staf mereka melalui kerjasama internasional dan jaringan profesional.⁵⁴

⁵² Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 32-35.

⁵³ Anthony McClaran, *Quality Assurance in Higher Education (Risk Management: Implementation)*, 106.

⁵⁴ OECD, *Quality and Recognition in Higher Education*, (t.t: t.p., 2004) 31.

Menurut Sitti Roskina Mas berdasarkan trilogi Juran yang berkaitan dengan pengelolaan mutu yang dikutipnya menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan dimulai dari perencanaan mutu, pengendalian mutu dan peningkatan mutu. Dalam hal ini, penjaminan mutu pendidikan memerlukan pengelolaan yang baik dengan membangun manajemen penjaminan mutu yang baik dengan perencanaan penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, pengawasan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan.⁵⁵

Secara garis besar, penelitian ini menggunakan alur penjaminan mutu yang dikemukakan oleh Ridwan A. Sani, et.al., dalam buku *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*. Dalam buku ini menetapkan lima langkah dalam penjaminan mutu yaitu:⁵⁶

a. Penetapan standar mutu

Setiap satuan pendidikan termasuk madrasah diharuskan memiliki standar mutu karena standar mutu merupakan landasan dalam penjaminan mutu. Pemerintah memberikan standar minimal penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk Standar Nasional Pendidikan sehingga setiap

⁵⁵ Sitti Roskina Mas, *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), 27.

⁵⁶ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 32-35.

satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP diharapkan menetapkan standar mutu di atas SNP. Dalam penetapan standar, satuan pendidikan harus menyesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan tersebut. Selain itu, disesuaikan pula dengan kondisi satuan pendidikan. Penetapan standar juga harus berdasarkan prioritas atau yang terkait dengan hasil dan proses pembelajaran. Hal ini dapat dicontohkan di sekolah A yang menetapkan bahwa guru dalam pembelajaran harus menerapkan pembelajaran aktif dan peserta didik harus mendapatkan nilai rata-rata UN minimal 7.⁵⁷

Satuan pendidikan dapat menetapkan beberapa standar utama dalam meningkatkan mutu. Hal ini bergantung pada komitmen dan dukungan sumber daya internal serta bantuan berbagai pihak yang dilibatkan dalam meningkatkan mutu. Jika satuan pendidikan telah memenuhi SNP maka lembaga tersebut dapat menetapkan standar baru diatas SNP. Bagi satuan pendidikan baru dapat menggunakan Standar Pelayanan minimal sebagai acuan. Standar pendidikan yang sudah bertaraf internasional ataupun standar pendidikan yang dipadukan dengan kearifan

⁵⁷ Ibid, 32.

lokal dapat dijadikan standar pendidikan pada satuan pendidikan.⁵⁸

Penetapan standar dan indikatornya harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab III pasal 4 yang mengungkapkan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan demokratis, menerapkan keadilan tanpa adanya diskriminatif, menegakkan HAM, menanamkan nilai keagamaan, budaya serta kemajemukan bangsa, diselenggarakan dengan sistem terbuka dan multi makna, dilaksanakan dengan membudayakan dan memberdayakan peserta didik, memberi keteladanan, mengembangkan kreativitas dan membangun kemauan peserta didik, mengembangkan budaya menulis, membaca, serta berhitung.⁵⁹

Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar yang harus dipenuhi satuan pendidikan yaitu Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari delapan standar.⁶⁰

- 1) Standar kompetensi lulusan adalah kriteria tentang standar kemampuan lulusan mulai dari keterampilan, sikap, dan

⁵⁸ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 55.

⁵⁹ Ibid, 56.

⁶⁰ Ibid, 48.

pengetahuan. Standar ini dijadikan acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidika dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana.⁶¹

- 2) Standar isi merupakan standar yang berkaitan dengan materi dan kompetensi dalam memenuhi kompetensi lulusan satuan pendidikan. Materi dirumuskan berdasarkan materi wajib yang tertera dalam undang-undang, konsep keilmuan dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Untuk tingkat kompetensi disusun berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kompetensi berjenjang dan kualifikasi kompetensi Indonesia.⁶²
- 3) Standar proses yang merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Proses pembelajarannya harus dilaksanakan dengan interaktif, inspiratif, menantang, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kemandirian,

⁶¹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 57.

⁶² Ibid, 59.

keaktivitas yang disesuaikan dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.⁶³

- 4) Standar penilaian. Penilaian pendidikan merupakan langkah untuk pengumpulan dan pengelolaan informasi dalam menilai capaian hasil belajar. Standar penilaian disusun agar perencanaan penilaian terjamin kesesuaiannya dengan capaian kompetensi dan prinsip sedangkan penilaian peserta didik dilaksanakan secara profesional, edukatif, terbuka, efisien yang disesuaikan dengan kondisi nyata sosial budaya serta pelaporan hasil penilaian dilakukan secara objektif, informatif dan akuntabel.⁶⁴
 - 5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 6) Standar sarana dan prasarana pendidikan
 - 7) Standar pengelolaan
 - 8) Standar pembiayaan
- b. Pemetaan Mutu

Dalam pemetaan mutu satuan pendidikan harus melakukan kegiatan evaluasi diri setelah menetapkan standar guna melihat sejauh mana standar tersebut tercapai. Dari data evaluasi yang diperoleh maka satuan pendidikan harus menganalisis data tersebut agar dapat mengetahui

⁶³ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 65-66.

⁶⁴ Ibid, 72.

permasalahan kurangnya capaian standar yang diperoleh serta mengetahui solusi permasalahan dan alternatifnya. Misalnya, dari hasil pemetaan mutu terlihat masih ada 20% dari guru yang masih belum menerapkan pembelajaran aktif dan rata-rata nilai UN masih pada ksaran 6,9. Selanjutnya satuan pendidikan harus menentukan penyebab kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan kondisi yang ada sekarang.⁶⁵

Pemetaan mutu secara nasional dilakukan dengan batuan aplikasi yang didasarkan pada SNP. Data yang telah diperoleh dapat dijadikan data evaluasi diri sekolah (EDS) untuk pemetaan mutu. EDS dapat diperdalam dengan melakukan analisis dan memperkaya data EDS secara kualitatif yang melibatkan *stakeholder* yang mengetahui kondisi sekolah. Data EDS ini digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan serta permasalahan yang dihadapi satuan pendidikan. EDS harus dilaksanakan dengan jujur dan akurat dengan melibat berbagai pihak yaitu pengawas sekolah, orang tua peserta didik, alumni, unsur Pemda, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri dan pihak lain yang penting.⁶⁶

EDS merupakan bagian penting dalam penjaminan mutu guna merencanakan perbaikan sekolah. Hal ini

⁶⁵ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidika*, 33.

⁶⁶ Ibid, 90.

memerlukan instrumen EDS yang didasarkan pada standar nasional dan dikembangkan sesuai kondisi masing-masing sekolah.⁶⁷ Instrumen ini dapat berupa angket, kuisisioner dan lembar observasi yang dikembangkan berdasarkan indikator ketercapaian SNP. Dari setiap indikator disusun beberapa pertanyaan yang akan direspon oleh kepala sekolah, guru, peserta didik dan pengawas sebagai responden terkait keberhasilan program sekolah dan kebijakan penjaminan mutu. EDS ini merupakan langkah dalam pemetaan mutu.⁶⁸

Proses EDS dapat dimulai dengan pembentukan Tim yang difungsikan untuk mengembangkan sebuah satuan pendidikan, mengadakan pelatihan penggunaan instrumen, melaksanakan evaluasi diri sekolah. Kemudian hasil EDS untuk menyusun rencana kerja ataupun rencana anggaran. Hal ini seharusnya dilaksanakan setiap tahun sekali. EDS dilakukan oleh tim pengembang satuan pendidikan yang telah dibentuk yang terdiri dari Kepala Sekolah, wakil unsur guru, wakil orang tua siswa, wakil komite, dan pengawas.⁶⁹

⁶⁷ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 93.

⁶⁸ Ibid, 101-102.

⁶⁹ Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Penjaminan Mutu Pendidikan, *Konsep, Regulasi, Dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan* (t.tp: 2012), 24.

Dalam pemetaan mutu satuan pendidikan dapat melakukan lima langkah kunci yaitu pengembangan instrumen, mengumpulkan data, menganalisa data, menentukan akar masalah serta merumuskan rekomendasi.⁷⁰ Pengembangan instrumen hendaknya mencakup seluruh standar dan indikator. Indikator yang disusun harus menggambarkan satuan pendidikan yang dianggap bermutu. Dalam mengembangkan instrumen satuan pendidikan perlu melakukan langkah berikut:⁷¹

- 1) Membuat butir pertanyaan berdasarkan indikator
- 2) Dalam menjawab pertanyaan memerlukan penelusuran sumber data yang dibutuhkan secara mendalam.
- 3) Merumuskan instrumen pemetaan dalam bentuk checklist, kuesioner, atau diskusi kelompok

Untuk menyusun pemetaan sekolah memerlukan beberapa data di antaranya seperti hasil UN, hasil akreditasi sekolah, hasil sertifikasi guru, data kuantitatif sesuai dengan kondisi objektif sekolah, hasil EDS dan beberapa data atau informasi lain yang berkaitan dengan

⁷⁰ Ridwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 103.

⁷¹ Ibid, 103-106.

satuan pendidikan. Pemetaan mutu disusun oleh Tim Pengembang sekolah yang dibantu guru dan staf tata usaha.⁷²

Mengumpulkan data tentang bukti terkait pemetaan mutu harus disesuaikan dengan cakupan data yang telah ditentukan karena jika informasi terlalu banyak maka dapat menyebabkan tidak terkendalinya pemetaan mutu, bahkan akan menyebabkan pemetaan mutu tidak produktif dan tidak berkelanjutan. Dalam pengumpulan data, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi pada seluruh responden tentang kegiatan pengumpulan data, menyebarkan seluruh instrumen pada seluruh responden dan kemudian mengumpulkan hasil responden. Pendekatan yang digunakan dapat berupa wawancara, diskusi kelompok dan refleksi. Setelah mengumpulkan hasil instrumen adalah melakukan verifikasi kelengkapan isian, melakukan validasi terhadap isian dengan uji petik pengamatan, mereview dokumen dan *crosscheck* pada responden lain dan kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk elektronik guna mempermudah analisis.⁷³

⁷² Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Penjaminan Mutu Pendidikan, *Konsep, Regulasi, Dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan*, 25-26.

⁷³ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 107-108.

Dalam menganalisa data hendaknya satuan mengajak para pemangku kepentingan seperti komite sekolah, pemerintah daerah, *stakeholder* ataupun DUDI disekitar sekolah untuk melihat permasalahan satuan pendidikan dari sudut pandang berbeda dan tidak terkontaminasi oleh konflik internal yang mungkin terjadi. Selain itu, pendapat pemangku kepentingan juga diperlukan dalam analisis SWOT untuk merencanakan rencana strategis.⁷⁴

Penentuan akar masalah dalam satuan pendidikan dilakukan dengan menganalisis masalah dengan pendekatan yang telah dipahami, mencari akar masalah yang teridentifikasi dengan pendekatan yang disepakati, mencari hubungan antar akar masalah dengan masalah lain, menganalisis apakah dengan mengatasi akar masalah dapat menyelesaikan permasalahan, dan menentukan prioritas terhadap permasalahan yang ingin segera dipecahkan.⁷⁵

Setelah melakukan berbagai langkah dalam memetakan mutu tadi maka satuan pendidikan menyusun dokumen hasil dengan memprioritaskan masalah dari permasalahan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan, menetapkan solusi

⁷⁴ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidika*, 109.

⁷⁵ Ibid, 113.

dalam menyelesaikan masalah, dan menyusun laporan tentang hasil yang berkaitan pemetaan mutu dan rekomendasinya.⁷⁶

c. Perencanaan Mutu

Perencana pemenuhan mutu ini merupakan rencana kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan standar atau mencapai standar yang ditetapkan. Perencanaan mutu didasarkan pada hasil pemetaan mutu, kebijakan pendidikan nasional, daerah dan satuan pendidikan itu sendiri berikut dengan rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Misalnya dari hasil pemetaan mutu terlihat masih ada 20% guru yang belum melakukan pembelajaran aktif maka rencana pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah melakukan pembinaan khusus karena kurangnya pengetahuan guru terkait pembelajaran aktif.⁷⁷ Perencanaan pemenuhan mutu seharusnya didasarkan pada hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan, serta rencana strategis. Perencanaan ini dituangkan dalam perencanaan madrasah dan rencana aksi kegiatan. Keduanya harus mengandung upaya peningkatan standar atau mencapai standar yang ditetapkan.⁷⁸

⁷⁶ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 112.

⁷⁷ Ibid, 33-34.

⁷⁸ Ibid, 33-34.

Rencana pemenuhan mutu dirumuskan berdasarkan EDS dan mengacu pada visi misi dan tujuan sekolah yang sudah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan daerah. EDS yang telah dilakukan sekolah merupakan indikator *baseline* yang akan ditingkatkan sehingga standar yang ditetapkan dapat dipenuhi.⁷⁹ Rencana pemenuhan mutu juga membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan terutama tenaga pendidik sebagai aktor utama dalam kegiatan belajar serta pemerintah dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab.⁸⁰

Rencana pemenuhan mutu berkenaan tentang tanggung jawab pelaksanaan, kerangka waktu, ukuran keberhasilan dan tenggang waktu. Rencana pemenuhan mutu berbentuk rencana kerja tahunan yang berupa rincian-rincian dari rencana kerja menengah. Rencana kerja sekolah dirumuskan untuk dijadikan pedoman kerja, dasar dalam mengevaluasi dan memonitor kegiatan untuk mengembangkan sekolah serta dijadikan bahan acuan guna merinci dan mengusulkan sumber daya pendidikan dibutuhkan. RKS bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan serta sasaran

⁷⁹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidika*, 113.

⁸⁰ Ibid, 120.

pemenuhan dan memenuhi kewajiban. Hal ini juga agar program dan kegiatan terjamin sesuai kondisi nyata.⁸¹

Metode dalam pengembangan rencana sekolah adalah dengan analisis SWOT dan menyusun rencana strategis. Rencana strategis dapat dirumuskan melalui analisis SWOT sedangkan rencana program disusun berdasarkan analisis kesenjangan yang terdapat dalam EDS. Sedangkan rencana tahunan tersebut didasarkan renstra yang dirumuskan lima tahunan. Dengan melakukan analisis SWOT dapat mengetahui strategi untuk memperoleh peluang dengan menggunakan kekuatan, mengatasi ancaman dengan menggunakan kekuatan, mengatasai ancaman dengan memperbaiki kelemahan dan mendapatkan peluang dengan memperbaiki kelemahan.⁸²

Selain itu, metode pengembangan sekolah adalah dengan menganalisis medan kekuatan dengan melihat faktor pendorong (hal-hal yang menjadikan masalah mungkin dapat diatasi) dan faktor pelemah (hal-hal yang menjadikan masalah bertambah sulit diatasi). Dengan melihat faktor tersebut satuan

⁸¹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 114-115.

⁸² Ibid, 120-123.

pendidikan dapat melahirkan solusi dari peningkatan faktor pendorong dan meminimalkan faktor pelemah.⁸³

Memilih solusi yang efektif juga menjadi salah satu metode pengembangan rencana sekolah. Solusi tersebut disesuaikan dengan keadaan sekolah. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan terkait solusi tersebut. Kemudian menentukan program prioritas guna mencapai indikator keberhasilan yang dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan dan kondisinya serta alasan lainnya.⁸⁴

Penyusunan pemenuhan mutu dapat melalui empat tahap.⁸⁵

- 1) Menentukan kondisi satuan pendidikan saat ini dengan mengkaji dokumen EDS pada saat melakukan pemetaan mutu yang mengedepankan kejujuran dan obyektifitas, bersumber dari sumber eksternal dan internal dan terintegrasi dengan mutu satuan pendidikan. Selain itu, dilakukan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan

⁸³ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 124-126.

⁸⁴ Ibid, 129-130.

⁸⁵ Ibid, 115.

tingkat kebutuhan program dalam memberikan layanan bermutu.⁸⁶

- 2) Menetapkan kondisi satuan pendidikan yang diinginkan dalam menyusun visi, misi dan tujuan, penentuan indikator keberhasilan kinerja dan dalam menetapkan kerangka waktu yang jelas dalam ketercapaiannya.⁸⁷
- 3) Menentukan program dan kegiatan yang bertujuan memberikan layanan bermutu dengan tujuan untuk mencapai ataupun melampaui SNP dengan jadwal dan tahapan yang jelas. Program merupakan usaha untuk mencapai sasaran. Program yang ditetapkan berdasarkan sasaran satuan pendidikan dengan melibatkan pihak lain seperti komite dan masyarakat. Setiap program harus ditentukan penanggung jawab yang berupa unit kerja atau perorangan. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan untuk menjalankan suatu program dalam menjawab tantangan yang ditetapkan yang disusun secara efektif dan efisien. Program dan kegiatan harus mempunyai alokasi waktu (jadwal) untuk mempermudah menetapkan rangkaian

⁸⁶ Ibid, 115-116

⁸⁷ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 116.

kegiatan, mengatur kebutuhan sumber daya dan dana serta mengendalikan alur kegiatan serta keuangan.⁸⁸

- 4) Merumuskan rencana anggaran satuan pendidikan dengan membuat rencana biaya satuan satuan pendidikan untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan, apakah satuan pendidikan memiliki dana dan dari mana dan diperoleh, membuat rencana pendanaan satuan pendidikan yang berisikan rencana sumber pendapatan satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urutan kepastian perolehan dana, dan menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan dengan memperhatikan aturan penggunaan dana dari pemberi dana.⁸⁹

d. Pemenuhan Mutu

Implementasi atau pelaksanaan mutu merupakan bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam dokumen rencana pemenuhan mutu. Hal ini tentu memerlukan komitmen dari para pemangku kepentingan satuan pendidikan. Perencanaan program dan kegiatan diadakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum

⁸⁸ Ibid, 117-118.

⁸⁹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 118-119.

dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan dapat melakukan tahap berikut:⁹⁰

- 1) Menetapkan penanggung jawab kegiatan,
- 2) Menyusun tim organisasi pelaksana dan pihak-pihak yang dilibatkan oleh penanggung jawab,
- 3) Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan,
- 4) Menentukan bukti fisik yang menunjukkan keterlaksanaan kegiatan,
- 5) Program kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu agar memperoleh capaian yang signifikan.⁹¹

e. Evaluasi Pemenuhan Mutu

Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap proses pemenuhan mutu agar kepastian tentang terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan terjamin. Evaluasi pemenuhan mutu dapat dilakukan dengan menyusun rencana evaluasi, membuat indikator dan instrument evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi dan penyusunan rekomendasi.⁹²

Selain evaluasi pemenuhan mutu sekolah juga dapat melakukan audit mutu namun hal ini sangat jarang dijumpai di

⁹⁰ Ibid, 133.

⁹¹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 139.

⁹² Ibid, 32-35.

satuan pendidikan. Audit mutu merupakan *review independent* yang dilakukan untuk membandingkan aspek kinerja mutu dengan standar kinerja. Audit mutu ini dapat memberikan gambaran nyata kondisi mutu lembaga.⁹³ Evaluasi yang dilakukan secara terus menerus sangat dibutuhkan dalam penjaminan mutu.⁹⁴

Evaluasi pemenuhan mutu adalah sebuah tahapan pengujian sistematis dan independen terhadap pelaksanaan serta hasil pemenuhan mutu telah selaras dengan strategi yang telah ditentukan atau belum dan beberapa strategi sudah dilaksanakan dengan efektif dan selaras tujuan atau belum. Dalam melakukan evaluasi, satuan pendidikan dapat menggunakan salah satu dari dua tipe evaluasi yang didasarkan pada sasaran dan tujuan yaitu:⁹⁵

- 1) Evaluasi formatif yang digunakan untuk melihat sejauh mana keterlaksanaan rencana pemenuhan mutu yang sudah dilaksanakan disatuan pendidikan yang berfokus pada keterlaksanaan input yang meliputi anggaran dan sumber

⁹³ Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan*, 267

⁹⁴ Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah: Membangun Sekolah yang Bermutu* (Bandung: Alfabeta, 2013), 65

⁹⁵ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 147

daya dan keterlaksanaan proses seperti keterlaksanaan dan kualitas proses latihan.

- 2) Evaluasi sumatif yaitu melihat sejauh mana hasil dari pelaksanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan. Evaluasi ini dilaksanakan dengan membandingkan hasil pemenuhan dengan *output*, *outcome* dan dampak pemenuhan mutu.

Satuan pendidikan dapat melakukan langkah berikut dalam mengevaluasi pemenuhan mutu:⁹⁶

- 1) Membuat rencana evaluasi dengan menelaah rencana pemenuhan mutu dalam rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
- 2) Menetapkan indikator evaluasi dengan memahami indikator kunci kegiatan, merumuskan indikator evaluasi, dan menetapkan indikator untuk dijadikan referensi dalam penyusunan instrumen
- 3) Menyusun instrumen dengan menentukan butir pertanyaan dari indikator, mengidentifikasi sumber data guna menjawab pertanyaan, menyusun instrument evaluasi dan menyusun panduan teknis instrumen untuk membantu responden
- 4) Mengumpulkan data dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, menyebarkan instrumen untuk dijawab responden

⁹⁶ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidika*, 148-150.

dan mengumpulkan hasil jawaban dari seluruh responden. Memverifikasi kelengkapan isian dan mendokumentasi hasil isian instrument dalam bentuk elektronik.

- 5) Menganalisis dan menyusun rekomendasi dengan membuat format analisis terlebih dahulu menggunakan pendekatan yang disepakati kemudian mengisi format didasarkan pada hasil pengumpulan data. Kemudian menetapkan seberapa sesuai antara program dengan rencana dan seberapa pencapaian program yang dilaksanakan dan membuat laporan serta memberikan rekomendasi terkait kendala dan solusi permasalahan dan pelaksanaan pemenuhan mutu.

B. Nilai-nilai pesantren

1. Makna Nilai-Nilai Pesantren

a. Nilai

Nilai dapat dijelaskan dalam dua penjelasan yang saling bersebrangan. Pada satu sisi, nilai dianggap sebagai nilai ekonomi yang muruk kepada nilai produk, harga, dan kesejahteraan, yang mengunggulkan hal yang bersifat material. Disisi lain, nilai mencerminkan gagasan atau makna yang abstrak dan tak terukur dengan jelas yang berupa keadilan, kebebasan, kejujuran, kedamaian, dan persamaan. Selain itu, sistem nilai yaitu sekumpulan nilai yang saling berkaitan

dalam sebuah sistem yang memberikan kekuatan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Nilai-nilai ini berasal dari agama ataupun tradisi humanistik. Sebab itu, perlu adanya pengkategorian secara tegas antara nilai yang diartikan sebagai kata benda abstrak dengan nilai yang berarti kata kerja. Pada hal-hal tertentu, sebenarnya sudah terjadi kesepakatan umum secara etis tentang pengertian nilai, namun masih terdapat perbedaan dalam pandangan mereka terhadap etika perilaku.⁹⁷

Nilai merupakan sebuah keyakinan yang melahirkan tindakan seseorang berdasarkan pilihannya sendiri. Pengertian tersebut diungkapkan oleh Gordon Allport (1964) yang merupakan seorang ahli psikologi kepribadian. Selain itu, Nilai didefinisikan sebagai patokan normatif yang memberikan pengaruh kepada manusia untuk menentukan pilihannya di antara berbagai cara terkait tindakan alternatif (Kupperman, 1983). Kemudian Kluckhohn (Brameld, 1957) juga mendefinisikan nilai sebagai sebuah konsepsi baik tersirat atau tersurat yang dapat membedakan yang berkaitan dengan sesuatu yang diinginkan, yang memiliki pengaruh terkait pilihan tentang cara, tujuan dan tujuan akhir tindakan.⁹⁸

⁹⁷ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

⁹⁸ *Ibid*, 8.

Nilai-nilai dari sebuah organisasi adalah sebuah prinsip yang dijadikan dasar operasi serta pencarian organisasi guna mencapai visi dan misinya. Hal ini memuat ekspresi kepercayaan dan cita-cita institusi. Nilai-nilai tersebut juga mengemudikan organisasi dan memberikan arah bagi organisasi. Nilai-nilai yang ada dalam institusi harus disesuaikan dengan lingkungan institusi tersebut dioperasikan. Nilai-nilai tersebut harus menancapkan hubungan kuat dan baik dengan para pelanggan dan para staf.⁹⁹

b. Pesantren

Pesantren yakni lembaga pendidikan dengan metode tradisional yang mempelajari, menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam yang memberikan penekanan terhadap pentingnya moral keagamaan untuk diterapkan dalam keseharian. Tujuan didirikannya pesantren yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang berupa pribadi bertakwa, beriman, berakhlak mulia, bermanfaat bagi sesama dan mengabdikan pada masyarakat. Di dalam pesantren terdapat kyai, ustadz, santri dan pengurus pesantren yang hidup dalam lingkungan pondok dan berlandaskan pada nilai-nilai agama dengan norma-norma serta kebiasaan-

⁹⁹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*, 218.

kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat umum yang mengitarinya. Pesantren difungsikan sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dan lembaga sosial yang menampung anak didik dari segala lapisan masyarakat tanpa memandang sosial ekonominya. Selain itu, pesantren difungsikan sebagai lembaga penyiaran agama yang merupakan tempat mendapatkan pengajaran Islam. Pesantren memiliki metode pembelajaran sorogan, bandongan, halaqah, dan hafalan. Pesantren memiliki beberapa prinsip dalam menyelenggarakan pendidikan yaitu prinsip theosentris (semua berasal, bertujuan dan kembali kepada tuhan), sukarela dan mengabdikan, kearifan (bersikap dan berperilaku sabar, rendah hati, patuh pada agama, mencapai tujuan tanpa merugikan pihak lain, dan mendapatkan manfaat), kederhanaan dan kebersamaan serta mandiri.¹⁰⁰

Makna pesantren menurut Sudjoko Prasajo yang dikutip Fatah Yasin dalam buku “*Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*” yaitu lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam yang menggunakan sistem non klasikal dimana ada seorang kyai melakukan pengajaran ilmu agama islam terhadap santrinya yang didasarkan pada kitab-

¹⁰⁰ Ali Idrus, *Manajemen Pendidikan Global: Visi, Aksi dan Adaptasi* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) 96-98.

kitab berbahasa Arab yang merupakan karya para ulama arab di abad pertengahan dan para santri tinggal di pondok/ asrama. Sedangkan menurut H.M. Arifin, Pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang telah diakui oleh masyarakat setempat, dengan sistem asrama dan pendidikan diajarkan dengan sistem pengajian dibawah kepemimpinan kyai yang kharismatik dan independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang mengajarkan ilmu agama dari kitab ulama terdahulu dibawah kepemimpinan kyai kharismatik dan independen dengan sistem pengajian dan memiliki pondok/ asrama sebagai tempat tinggal para santri.¹⁰¹

Menurut Masyhud yang dikutip oleh Nihwan bahwa pendidikan pesantren bertujuan menciptakan serta mengembangkan kepribadian muslim agar beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berguna untuk masyarakat, mengabdikan kepada masyarakat, bebas, mandiri, dan memiliki pribadi yang teguh, mendakwahkan agama atau meneguhkan agama Islam dan umat serta mencintai ilmu untuk mengembangkan kepribadian Indonesia.¹⁰²

¹⁰¹ Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 242.

¹⁰² Nihwan, *Pendidikan Pesantren dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, (t.t.: t.p., tt), 151-165.

Selain itu, prinsip yang tertanam di pesantren salah satunya adalah *al muh}a>faz}ah 'ala> al qadi>m al sha>lih, wa al akhdhu bi al jadi>d al ashlah}*, yaitu tetap melestarikan tradisi yang baik, dan mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem pemondokan untuk menjaga lingkungan santri tetap kondusif dan cara pandang religiusitas karena lingkungan sosial telah mengalami banyak rumah terutama dikota besar.¹⁰³

Sistem pendidikan pesantren bercirikan sebagai berikut:

- 1) Sistem pendidikan yang masih tradisional yang memberikan kebebasan penuh dalam pembelajaran dan adanya hubungan interaktif antara kyai dan santri.
- 2) Didalamnya terdapat pola kehidupan yang mengutamakan demokrasi dalam pemecahan masalah
- 3) Para santri yang tidak berorientasi semata-mata mencari ijazah.
- 4) Budaya pendidikan yang diarahkan untuk menumbuhkan dan membekali sifat untuk hidup sederhana, memiliki idealism, persaudaraan, persamaan, kebersamaan, percaya diri dan memiliki keberanian untuk menyongsong masa depan.

¹⁰³ Imam Syafe'I, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8 Nomer 1 (2017): 61-82.

5) Para santri yang tidak memiliki cita-cita untuk menjadi penguasa di pemerintahan sehingga sulit dikuasai pemerintahan.¹⁰⁴

Pesantren menurut M. Dawam Raharjo yang dikutip oleh Mahmud Arif memiliki beberapa kelebihan menjadi ciri khas pesantren:¹⁰⁵

- 1) Adanya sistem pemondokan sehingga memudahkan kyai melakukan tuntunan dan pengawasan.
- 2) Keakraban (hubungan personal) antara kyai dan santri yang sangat kondusif.
- 3) Memiliki lulusan yang mandiri.
- 4) Kesederhanaan pola hidup.
- 5) Biaya pendidikan yang terjangkau.

Pesantren dalam sejarah dan pendidikannya dalam buku pendidikan Islam Transformatif yang dikutip oleh Mahmud Arif memiliki beberapa kekhasan yaitu:¹⁰⁶

- 1) Akrab dengan nilai-nilai universal kitab kuning
- 2) Adanya penghayatan mental spiritual keagamaan dan *tafaqquh fi ad-din*

¹⁰⁴ Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, 244.

¹⁰⁵ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), 167-168.

¹⁰⁶ *Ibid*, 192.

- 3) Dilestarikannya nilai-nilai keagamaan seperti kesederhanaan, keikhlasan, ukhuwah, kebaktian, dan keswadayaan
 - 4) Lebih mengutamakan social effect dibandingkan civil effects
 - 5) Melahirkan pemimpin yang berpengaruh bagi masyarakat dilingkungannya
 - 6) Menyebarkan luaskan dakwah Islam
2. Macam-macam nilai pesantren

Menurut Muskinul Fuad yang melakukan penelitian di beberapa pesantren tentang kepribadian muslim terdapat beberapa nilai-nilai pesantren yang mendasari pengembangan kepribadian santri. Di antara nilai-nilai pesantren tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Nilai keilmuan. Hal ini merupakan identitas kultural pesantren karena kehidupan pesantren adalah proses pendidikan atau pencarian ilmu. Nilai keilmuan ini mendapat pengaruh dari pandangan, sikap, dan kehidupan kyai dan ustadz-ustadzah sehari-hari. Nilai keilmuan ini tidak hanya ditekankan dalam hal menuntut ilmu agama namun juga terhadap ilmu-ilmu umum yang ditunjukkan

¹⁰⁷ Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kepribadian Muslim di Pesantren* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 63-74.

pada penekanan akan pentingnya kuliah dan memberikan wawasan pentingnya keseimbangan anatra ilmu agama dan umum sehingga tidak ada diskriminasi ilmu. Bervariasinya bidang ilmu yang dikaji menunjukkan nilai keilmuan yang dimiliki pesantren.

- b. Nilai kemandirian dan tanggung jawab. Hal ini tampak pada mekanisme kehidupan pesantren yang membiasakan santri untuk dapat mengatur kebutuhan pribadi secara mandiri seperti mengatur keuangan, mengatur waktu dan lainnya. Selain itu, bentuk tanggung jawab juga tercermin dari terbentuknya kepengurusan organisasi di pesantren baik dalam aspek kepesantrenan maupun kegiatan incidental seperti akhirusanah dan lainnya. Hal ini melatih siswa bertanggungjawab atau menunaikan tugas.
- c. Nilai kesederhanaan. Hal ini tampak pada pola hidup sederhana yang menjadi hal yang dibiasakan pada santri. Asrama yang sederhana dengan cukup berdesakan untuk tinggal di dalamnya, makanan dengan lauk pauk sayur mayor dan fasilitas yang minim sehingga santri harus terbiasa mengantri.
- d. Nilai sosial dan kebersamaan. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama seperti shalat

berjamaah dzikir bersama, belajar, kerja bakti, olah raga bersama dan lainnya.

- e. Nilai demokrasi dan kepemimpinan. Struktur pesantren yang hampir sama dengan pemerintahan seperti kyai sebagai pemimpin tertinggi mengarahkan pesantren sesuai visi yang dituju yang membawahi para ustadz yang konsen mendidikan dan mengajar, dan pengurus pondok sebagai salah satu bagian yang berada dibawah kyai. Hal ini memberikan pengalaman mengatur dan menghadapi berbagai orang dengan latar belakang berbeda-beda. Selain itu, nilai kepemimpinan juga muncul dengan adanya struktur kepesantrenan. Nilai demokrasi juga muncul dalam kegiatan musyawarah bersama baik itu dalam kegiatan belajar bersama maupun rapat kepanitiaan dan hal ini juga memunculkan nilai toleransi.
- f. Nilai spiritual dan moralitas. Kedua nilai tersebut menjadi landasan dalam setiap gerak pesantren seperti keyakinan tentang belajar adalah ibadah dan ilmu yang didapat bersal dari Allah sehingga perlu berdoa agar diberi kepamahaman dan kemudahan belajar sehingga ilmunya dapat bermanfaat guna mendapat ridha Allah. Nilai ketuhanan tersebut akan memunculkan nilai moralitas sehingga para santri akan berperilaku yang mengarah kepada hal-hal yang baik.

Nilai-nilai tersebut dianggap penting dalam penjamin mutu karena dalam menjamin mutu juga memerlukan nilai-nilai yang tertanam dalam diri pemangku kepentingan madrasah. Beberapa tata nilai yang dapat dijadikan dalam menjalankan penjaminan mutu adalah, kejujuran, kepercayaan, keunggulan, komitmen, kompetisi, kredibilitas, kemandirian dan akuntabilitas. Tata nilai ini seharusnya tercermin dalam perilaku, pembina, penyelenggara, dan pelaksana pendidikan. Esensi dari tata nilai ini menjadi falsafah yang dianut sistem penjaminan mutu yang mengarah pada keunggulan menurut *customer*. Keunggulan menurut *customer* atau *stakeholder* akan menjadi konsep yang strategis.¹⁰⁸

Pokok-pokok nilai pendidikan pesantren yang penting untuk ditanamkan pada santri yaitu nilai pendidikan *I'tiqad*, *Amanah*, dan *Khuluq*. Nilai pendidikan *I'tiqad* ini merupakan nilai tentang keimanan seperti iman kepada Allah swt, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir untuk menata kepercayaan individu. Nilai pendidikan *Amanah* merupakan nilai tentang tingkah laku yang berupa pendidikan ibadah dan pendidikan muamalah. Sedangkan pendidikan *Khuluq* adalah pendidikan tentang etika (akhlak) yang memiliki tujuan untuk membersihkan diri dari

¹⁰⁸ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, 7.

beberapa perilaku yang tidak baik serta menghiiasi pribadi dengan perilaku terpuji.¹⁰⁹

Menurut Muhammad Muchlis Sholihin berdasarkan penelitiannya di antara beberapa nilai pesantren adalah kemandirian yaitu salah satu diantara beberapa nilai yang ditanamkan di pesantren kepada santri. Mulai dari santri datang di pondok, santri dilatih untuk mandiri, mengatur tentang tugas dan tanggung jawabnya terhadap kebutuhannya sendiri, misalnya: memasak, mencuci pakaian, mengatur uang belanja, merencanakan belajar, membersihkan asram pesantren, dan lainnya. Sikap sederhana terlihat juga dalam pola bangunan pesantren, yang hampir semua bangunanya tidak menunjukkan kesan mewah. Penanaman sikap hidup asketis (zuhud) dilakukan oleh pengasuh pesantren sejak usia dini, yaitu ketika santri memasuki masa awal di pesantren. senang berbuat baik yang ditanamkan sejak santri masuk dan memulai kegiatan belajarnya di pesantren tersebut. Selain itu, juga ditanamkan nilai semangat tinggi dan keikhlasan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi, *“Implemntasi Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri: Studi Kasus Pesantren Tebuireng Jombang dan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo”*, Tesis (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) 32-37.

¹¹⁰ Mohammad Muchlis Solichin, “Pembelajaran Karakter Berbasis Nilai-Nilai Pesantren: Studi atas Pondok Pesantren Al-Is’af Kalabaan, Guluk-guluk Sumenep”, *Nuansa*, Volume 14 Nomer 2 (2017): 291-311.

C. Sistem penjaminan mutu internal madrasah berbasis nilai-nilai pesantren

Satuan pendidikan Islam yaitu diantaranya adalah madrasah sudah seharusnya ikut memajukan pendidikan Indonesia dengan mewujudkan kualitas yang baik melalui penjaminan mutu. Satuan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik adalah satuan pendidikan yang bermutu. Mutu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Arcaro, Daming dan Juran yang dikutip oleh Nur Zazin¹¹¹ dan yang dikemukakan oleh Edward Sallis adalah kesesuaian produk baik jasa maupun barang terhadap harapan atau kebutuhan pelanggan yang memerlukan perbaikan terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan dengan biaya yang rendah. Maka sudah selayaknya madrasah terutama madrasah berbasis pesantren sebagai satuan pendidikan diharapkan mampu memberikan jasa pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan para santri dalam menghadapi tantangan di zaman modern saat ini dengan biaya yang relatif mudah dijangkau.

Madrasah sendiri merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, memberantas kebodohan, serta melatih

¹¹¹ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, 54.

ketrampilan yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dengan menggabungkan keunggulan pesantren dan keunggulan sekolah. Definisi tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Muhaimin dan Sutrisno yang dikutip oleh Zainal Arifin.¹¹² Madrasah sendiri terdapat beberapa tipe di antaranya madrasah diniyah yang mengajarkan ilmu agama secara penuh tanpa ada materi umum dan madrasah formal yang terdapat materi umum dan agama yang berada di lingkungan pesantren atau masyarakat agamis. Dalam penelitian ini, madrasah yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah madrasah formal yang berada di lingkungan pesantren. Madrasah dalam bentuk ini merupakan madrasah formal yang diselenggarakan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dan melatih ketrampilan dengan minat, bakat dan kemampuan yang tertanam nilai-nilai pesantren di dalamnya dan berada dalam naungan pesantren.

Madrasah sebagai salah satu satuan pendidikan tentu ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu cara dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal.

¹¹² Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, 26.

Sebagaimana yang dikutip oleh Ondi Saondi¹¹³ sistem merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Permendiknas¹¹⁴, Edward Sallis¹¹⁵, dan Pedoman penjaminan mutu¹¹⁶ adalah kegiatan sistemik dan terpadu dalam memberikan jasa pendidikan yang bebas dari kesalahan baik dari input, proses dan output yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan seluruh komponen di dalamnya. Maka sistem penjaminan mutu internal madrasah merupakan sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh madrasah dengan karakteristik lembaga Islam yang tercermin di dalamnya termasuk nilai-nilai pesantren. Nilai-nilai lembaga Islam inilah yang akan mengawal sistem penjaminan mutu sehingga mulai dari input, proses dan output serta dalam tiap tahap penjaminan nilai-nilai tersebut akan memberikan keunggulan karakteristik Islam bagi madrasah sehingga hal inilah yang membedakan dengan lembaga formal lain.

¹¹³ Ondi Saondi, *Membangun Manajemen Pendidikan Berbasis Sistem Informasi*, 169.

¹¹⁴ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 6-7.

¹¹⁵ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006) 58-59.

¹¹⁶ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar Dan Menengah, <Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf>, 29 Oktober 2019, 27.

Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal madrasah, penerapan prinsip-prinsip penjaminan mutu sangat penting. Seperti yang dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani, et.al., dalam buku *Penjaminan Mutu Sekolah*¹¹⁷ dalam melakukan penjaminan mutu madrasah harus menyadarkan seluruh komponen madrasah bahwa penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama tak terkecuali pengasuh pesantren yang menaungi, yayasan, komite madrasah dan masyarakat sekitar. Selain itu, madrasah harus melakukan tindakan yang benar dari fase pertama dalam penjaminan mutu agar tidak terjadi atau meminimalisir kesalahan yang terjadi baik di input, proses maupun output. Kemudian iklim organisasi yang kondusif juga menjadi salah satu prinsip yang harus terpenuhi. Madrasah harus menjadikan seluruh komponen madrasah menjadi tim yang kompak dan memiliki komunikasi yang baik sehingga memudahkan dan memperlancar proses penjaminan mutu yang berjalan.

Pemerintah sendiri telah melakukan penjaminan mutu dengan melakukan akreditasi melalui BAN-SM. Pemerintah juga telah menetapkan sistem penjaminan mutu yang hendaknya dilakukan oleh satuan pendidikan termasuk madrasah berikut dengan pedoman pelaksanaan penjaminan

¹¹⁷ Ridwan Abdullah Sani et.al, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33.

mutu internal. Sistem penjaminan mutu internal tersebut diperjelas lagi oleh Ridwan A. Sani, et.al., dalam buku *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*¹¹⁸ yang mengungkapkan sistem penjaminan mutu internal dilakukan dengan lima langkah yaitu menetapkan standar, memetakan mutu, merencanakan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu.

Dalam menetapkan standar madrasah harus disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan nilai-nilai pesantren yang tercermin di dalamnya. Selain itu, madrasah harus menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan agar pelaksanaan tidak terdapat hambatan. Kemudian madrasah membuat juga menetapkan standar didasarkan prioritas terkait hasil dan proses pembelajaran.

Melakukan pemetaan mutu dalam proses penjaminan mutu internal madrasah dengan menentukan indikator mutu terlebih dahulu. Indikator ini ditetapkan berdasarkan SNP jika madrasah masih dalam taraf memenuhi SNP. Namun madrasah juga dapat menetapkan indikator melampaui SNP jika madrasah telah memenuhi seluruh SNP. Indikator tersebut juga

¹¹⁸ Ridwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 32-35.

disesuaikan dengan nilai-nilai pesantren. Kemudian menyusun instrumen, mengumpulkan data EDS dan menganalisisnya serta menetapkan akar masalah. Dalam proses pemetaan mutu ini madrasah dapat melakukan dengan menerapkan nilai-nilai pesantren seperti nilai demokrasi dan nilai lainnya dalam setiap prosesnya karena nilai pesantren tersebut telah tertanam dan terbiasa diterapkan dalam setiap aktivitas para pemangku kepentingan madrasah.

Kemudian menyusun rencana pemenuhan mutu yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator yang telah tercerminkan nilai-nilai pesantren. Hal ini melibatkan seluruh *stakeholder*. Selain itu, penyusunan rencana mutu didasarkan pada analisis EDS dengan menggunakan alat bantu manajemen.

Dalam pelaksanaan mutu ini tentu nilai-nilai pesantren yang tertanam pada seluruh *stakeholder* madrasah hadir untuk mempermudah jalannya pemenuhan mutu. Mengimplementasikan pemenuhan mutu ini dilakukan dengan menetapkan penanggung jawab program, alokasi pendanaan terlebih dahulu. Namun penetapan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi. Setelah semua terlaksana maka seluruh penanggung jawab harus melakukan pelaporan program.

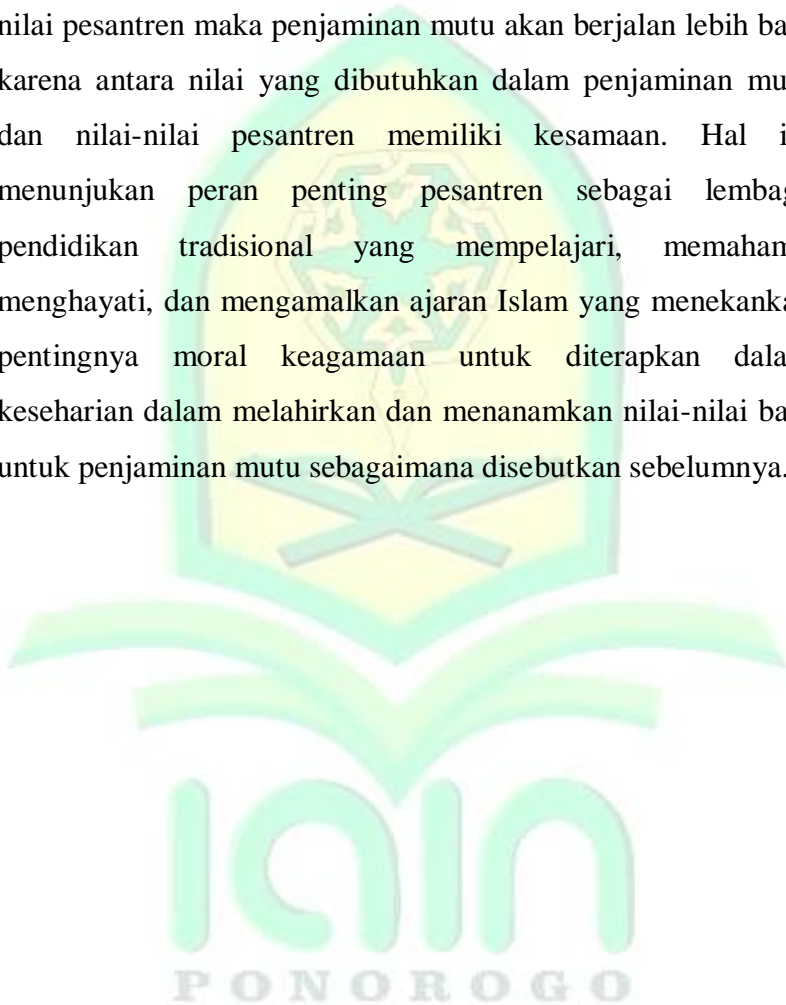
Setelah seluruh rencana pemenuhan terlaksana madrasah melakukan evaluasi pemenuhan mutu dengan menyusun rencana evaluasi terlebih dahulu, kemudian membuat indikator dan instrumen evaluasi. Setelah menyusun rencana evaluasi kemudian dilakukanlah pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut madrasah harus menyusun rekomendasi guna menetapkan standar baru atau memperbaiki perencanaan pemenuhan mutu agar pelaksanaan pemenuhan mutu berjalan maksimal.

Dalam penjaminan mutu memerlukan nilai-nilai yang tertanam dalam perilaku, pembina, penyelenggara, dan pelaksana pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan Nanang Fattah¹¹⁹ bahwa nilai-nilai yang diperlukan tersebut adalah kejujuran, kepercayaan, keunggulan, komitmen, kompetisi, kredibilitas, kemandirian dan akuntabilitas. Hal ini pula yang terdapat dalam pesantren yaitu Nilai keilmuan, kemandirian, tanggung jawab, kesederhanaan, sosial, kebersamaan, demokrasi, kepemimpinan, spiritual dan moralitas. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai pesantren yang diungkapkan oleh Muskinul Fuad.¹²⁰ Nilai memiliki pengertian prinsip yang menjadi dasar operasi dan pencarian organisasi dalam

¹¹⁹ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, 7.

¹²⁰ Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren*, 63-74.

mencapai visi dan misinya. Sebagaimana penjaminan mutu memiliki prinsip maka jika prinsip tersebut ditambahkan nilai-nilai pesantren maka penjaminan mutu akan berjalan lebih baik karena antara nilai yang dibutuhkan dalam penjaminan mutu dan nilai-nilai pesantren memiliki kesamaan. Hal ini menunjukkan peran penting pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya moral keagamaan untuk diterapkan dalam keseharian dalam melahirkan dan menanamkan nilai-nilai baik untuk penjaminan mutu sebagaimana disebutkan sebelumnya.



BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MA DARUL HUDA MAYAK

A. Data Umum

1. Sejarah Berdirinya MA Darul Huda

Madrasah Aliyah adalah lembaga pendidikan tingkat menengah yang dalam naungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dengan usianya yang relatif muda, MA Darul Huda telah menunjukkan diri sebagai lembaga Islam yang modern, terutama jika dilihat dari penampilan fisik dan akademiknya berkat semangat dan kerja keras yang tidak mengenal lelah oleh seluruh warganya. MA Darul Huda memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, masjid, asrama, pusat sumber belajar, fasilitas seni, dan olah raga sebagai daya pendukung pengembangan keilmuan, memiliki tenaga pengajar yang mumpuni, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.¹

Madrasah Aliyah Darul Huda didirikan pada tanggal 29 September 1989 dengan mengantongi izin operasional yang

¹ Profil Madrasah MA Darul Huda, *dokumentasi*, Ponorogo, 17 Oktober 2019.

bernomor W.N. 06.04/00.0352/58.14/1989, yang berada dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda. Selain itu, MA Darul Huda menjadi salah satu dari sekian Madrasah Aliyah yang ada dikabupaten Ponorogo.

MA Darul Huda menggunakan metode yang sama dengan metode yang diterapkan Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda yaitu:

السلفية الحديثة

Yang memiliki pengertian:

لمحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Hal tersebut berarti melestarikan metode lama yang baik dan mengambil baru yang lebih baik. Metode ini diselaraskan dengan kebijakan pemerintah saat ini seperti kurikulum K13.²

Madrasah Aliyah Darul Huda memiliki izin pendirian madrasah dari akntor wilayah Departemen Agama RI, yang bernomor W.N. 06.04/00.0352/58.14/1989 pada tanggal 29 September 1989 serta nomor statistik madrasah (NSM) 312350216280 dengan menyangandang status “Terdaftar” yang terakreditasi dari Departeman Agama Republik Indonesia dengan nomor: E.IV/29/1994 pada tanggal 24 Maret 1994 memiliki Status “Diakui”. Pada sertifikat nomor identitas

² Profil Madrasah MA Darul Huda, *dokumentasi*, Ponorogo, 17 Oktober 2019.

sekolah (NIS) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo adalah: 421/1228/405.17/2003. MA Darul Huda tercatat dengan nomor identitas sekolah (NIS) 310050, dan terakreditasi oleh Dewan Akreditasi Madrasah Provinsi Jawa Timur Nomor: B/Kw.13.4/MA/182/2005 dengan status “Terakreditasi”, sesuai dengan piagam izin operasional madrasah nomor: kw.13.4/4/PP.00.6/868/2010 Kementerian Agama RI pembaruan NSM menjadi: 131235020027, pembaruan Status Madrasah dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-SM) pada tanggal 30 Oktober 2010 MA Darul Huda terakreditasi dengan predikat B dengan nilai 81, berlaku hingga tahun 2015 dan sedangkan pada tanggal 25 Oktober 2016 MA Darul Huda terakreditasi dengan predikat A dengan nilai 89.

2. Visi dan Misi MA Darul Huda³

a. Visi

MA Darul Huda memiliki visi “Berilmu, Beramal dan Bertaqwa”. Berilmu diartikan memiliki ilmu yang berkualitas tinggi dalam penguasaan IPTEK dan IMTAQ sebagai *Khali>fah Fi> al-ard}*. Beramal berarti terampil dalam melaksanakan ibadah (*H{ablun min Alla>h}*), dan terampil dalam bermasyarakat (*H{ablun min al-Nas}*). Sedangkan

³ Profil Madrasah MA Darul Huda, *dokumentasi*, Ponorogo, 17 Oktober 2019.

“Bertaqwa” berarti selalu menjunjung tinggi kebenaran dan menjauhi segala keburukan, baik norma agama maupun norma masyarakat.

b. Misi

- 1) Membekali peserta didik, ilmu yang amaliyah,
- 2) Membiasakan peserta didik, beramal yang ilmiah,
- 3) Menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.,
- 4) Menumbuhkan sikap yang berlandaskan amaliah keagamaan Islam,
- 5) Mengantar kader yang siap, cerdas, mandiri, berilmu dan profesional serta berwawasan kebangsaan,
- 6) Mengoptimalkan pengayaan pada nilai keagamaan,
- 7) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara terampil, efektif, kreatif, agar peserta didik dapat berkembang secara optimal dengan potensi yang dimiliki baik dalam bidang rohani, dan akhlakul karimah serta iptek,
- 8) Membina kerjasama dengan lingkungan dan masyarakat,
- 9) Meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan,
- 10) Mendorong dan membantu peserta didik untuk mengetahui potensi diri.

3. Tujuan, Target dan Sasaran MA Darul Huda⁴

a. Tujuan

- 1) Meningkatnya kualitas keilmuan peserta didik yang bersifat amaliah
- 2) Meningkatnya kepedulian peserta didik terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah
- 3) Meningkatnya kualitas amal yang bersifat ilmiah peserta didik
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan fasilitas yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik
- 5) Meningkatnya kualitas sikap dan amaliah keagamaan islam warga madrasah.

b. Target

- 1) Terciptanya kegiatan yang terencana dan terarah di madrasah dengan pengelolaan manajemen yang baik,
- 2) Meningkatnya kualitas para guru dan pengelola madrasah,
- 3) Terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif untuk menciptakan output yang handal,

⁴ Profil Madrasah MA Darul Huda, *dokumentasi*, Ponorogo, 17 Oktober 2019.

- 4) Berfungsinya unit – unit pendidikan yang meliputi kegiatan peserta didik, guru dan kepala sekolah, seluruh *stakeholder* serta masyarakat dari unit organisasional atau fungsional,
- 5) Terjalinnnya kerjasama yang baik serta terbangunnya rasa tanggung jawab pada seluruh pemangku kepentingan.

c. Sasaran

- 1) Manajemen mutu madrasah dengan memaksimalkan peran seluruh *stakeholder* baik kepala sekolah, guru, peserta didik, komite madrasah dan masyarakat.
- 2) Jalinan kerjasama antar pengelola madrasah yang berjalan baik akan meningkatkan manajemen mutu pendidikan secara keseluruhan, meningkatnya kualitas belajar mengajar serta komponen internal maupun external yang mendukungnya.

4. Profil MA Darul Huda⁵

a. Arti lambang MA Darul Huda



Gambar 3.1 Lambang MA Darul Huda

⁵ Profil Madrasah MA Darul Huda, *dokumentasi*, Ponorogo, 17 Oktober 2019.

- 1) Bintang yang berwarna kuning emas yang menunjukkan tujuan luhur, berilmu, bertaqwa, beramal, berakhlaqul karimah,
- 2) Langit dunia yang memiliki warna seperti biru langit yang menunjukkan wawasan luas,
- 3) Segitiga dengan warna kuning emas yang menunjukkan aqidah yang benar dan teguh
- 4) Sayap kiri yang berwarna putih dengan tulisan Islam menunjukkan keislaman murni dan suci
- 5) Sayap kanan seperti awan putih dengan tulisan yang menunjukkan motto Darul Huda yaitu berilmu, beramal, bertaqwa,
- 6) Tulisan yang menunjukkan lokasi madrasah yang melengkung keatas yaitu Mayak Tonatan Ponorogo
- 7) Tulisan nama almamater dengan bahasa Arab yaitu

مؤسسة معهد تربية دار الهدى الإسلامية

b. Status MA Darul Huda

MA Darul Huda sebagai lembaga pendidikan memiliki status sebagai berikut:

Tabel 3.1 Status MA Darul Huda

1	Nama Madrasah	MA Darul Huda Mayak Ponorogo
2	SK Kelembagaan	a. Nomor : Nw. 86.04100.32584 b. Tanggal : 12 Mei 1989
3	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	131235020027

4	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSM)	20584477
5	Nama Kepala Madrasah	Drs. H. Mudafir
6	Tanggal Pendirian	12 Juli 1989
7	Status Akreditasi	Terakreditasi
8	Piagam Akreditasi	Tanggal: 25 Oktober 2016
9	Status Madrasah	Swasta
10	Nama Yayasan	Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak
11	Akta Notaris	Kemenkumham
12	Nomor	10 Tanggal 03 Maret 1989
13	Alamat Yayasan	JL. Ir. H. Juanda Gg. VI/38 Mayak Ponorogo - Jawa Timur Telp. 0352-461093 Fax. 0352-462288
14	Jumlah Siswa	2418 peserta didik
15	Jumlah Rombel	76 Ruang Kelas
16	Jumlah guru	126 Tenaga Pendidik
17	Jumlah Tenaga Kependidikan	10 Tenaga Kependidikan
18	Alamat Madrasah	Jalan : Ir. H. Juanda Gg. VI/38 Kelurahan : Tonatan Kecamatan : Ponorogo Kabupaten : Ponorogo Propinsi : Jawa Timur Kode Pos : 63418 No. telp. : Telp 0352-461093 Fax. : 0352-462288 Email : ma.darulhudamayak@gmail.com Website : www.darulhudamayak.com
19	Nama Kepala Madrasah	Drs. H. Mudafir
20	SK Kepala Madrasah	Nomor: 09/YPP.DH/06/02 Tanggal: 23 Juni 2002
21	Program Peminatan Studi	MIPA – IPS – AGAMA

c. Guru dan siswa MA Darul Huda

1) Keadaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

Tabel 3.2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2017-2019

Tipe Guru	2017 / 2018	2018 / 2019						
1. Pegawai Negeri Sipil	2	2	-	-	-	-	-	-
2. Guru Tetap Yayasan	12	126	-	-	-	-	-	-
3. Guru Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Guru Kontrak Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Guru Kontrak Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pegawai / Karyawan	10	10	-	-	-	-	-	-

2) Keadaan jumlah peserta didik

Tabel 3.3 Jumlah Peserta Didik Tahun 1999-2019

Tahun Pelajaran	S i s w a		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1999/2000	125	110	235
2000/2001	172	181	353
2001/2002	223	243	466
2002/2003	263	312	575
2003/2004	282	357	639
2004/2005	330	381	712
2005/2006	364	403	767
2006/2007	481	515	996
2007/2008	543	589	1132
2008/2009	596	669	1265
2009/2010	568	700	1268
2010/2011	557	750	1309
2011/2012	663	860	1523
2012/2013	710	958	1668
2013/2014	807	1120	1927

2014/2015	833	1279	2112
2015/2016	877	1350	2227
2016/2017	962	1361	2323
2017/2018	1059	1363	2422
2018/2019	1049	1396	2445

d. Fasilitas dan sarana prasarana MA Darul Huda

Tabel 3.4 Data Fasilitas Madrasah

No.	Jenis Ruangan	Jumlah ruang	Kondisi
1	Ruang kelas	76	Baik/ rusak
2	Ruang perpustakaan	2	Baik/ rusak
3	Ruang tata usaha	2	Baik/ rusak
4	Ruang kepala madrasah	1	Baik/ rusak
5	Ruang guru	2	Baik/ rusak
6	Ruang laboratorium IPA	1	Baik/ rusak
7	Ruang lab. komputer	2	Baik/ rusak
8	Ruang lab bahasa	1	Baik/ rusak

Tabel 3.5 Data Sarana dan Prasarana yang Dipergunakan dalam Proses Belajar

Jenis	Nama	Jumlah Luas	Kondisi	Kepemilikan	
				MS	SW
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prasarana	Tanah		Baik	√	-
	Ruang kelas	76 ruang	Baik	√	-
	Ruang keterampilan	1 galeri	Baik	√	-
	Ruang perpustakaan	2 ruang	Baik	√	-
	Tempat Ibadah (Masjid/Mushalla)	1 Masjid	Baik	√	-
	Lapangan sepak bola	1 lapangan	Baik	√	-
	Lapangan volley-ball	2 lapangan	Baik		-
	Ruang lab. Komputer	2 ruang	Baik	√	-
	Ruang laboratorium ipa	1 ruang	Sedang	√	-

	Ruang laboratorium bahasa	1 ruang	Baik	√	-
	Ruang sidang	1 ruang	Baik	√	-
	Ruang aula	1 ruang	Baik	√	-
	Ruang kantor (tata usaha)	2 ruang	Baik	√	-
	Ruang kepala madrasah	1 ruang	Baik	√	-
	Ruang wakamad	1 ruang	Baik	√	-
	Ruang sanitasi				
	Ruang wc/toilet/kmr kecil	90 lebih	Baik	√	-
	Ruang galeri	1 ruang	Baik	√	-
Sarana/ Fasilitas/ Peralatan	Ohp	-	-	√	-
	Wireless / TOA	4 Buah	Baik	√	-
	Handycam	1 Buah	Rusak	√	-
	Komputer	40 buah	Baik	√	-
	Tv	2 buah	Baik	√	-
	Papan tulis white board	140 buah	Baik	√	-
	Infocus /LCD	30 buah	Baik	√	-
	Laptop	4 buah	Baik	√	-
	VCD player	2 buah	Baik	√	-
	Mesin ketik	3 buah	Baik	√	-
	Meja	1400 Buah	Baik	√	-
	Kursi	1400 Buah	Baik	√	-
	Almari	60 Buah	Baik	√	-
	Kamera digital	3 buah	Baik	√	-

Tabel 3.6 Keadaan Alat Peraga

NO.	JENIS ALAT PERAGA	JUMLAH	KONDISI (Baik/ Rusak)
1.	Kit		
2.	IPA	1 Set CD Pembelajaran	1 Set CD Pembelajaran
3.	IPS	1 Set CD Pembelajaran	1 Set CD Pembelajaran
4.	Matematika	1 Set CD Pembelajaran	1 Set CD Pembelajaran
5.	Peta Anatomi	1 Buah	Baik
6.	Torso Manusia	1 Buah	Baik
7.	Peta Dinding Dunia	2 Buah	Baik
8.	Peta Dinding Indonesia	2 Buah	Baik

9.	Peta Dinding Provinsi	2 Buah	Baik
10.	Peta Dinding Kabupaten/Kota		
11.	Alat Olah Raga	1 Set Almari	Baik
12.	Alat Ibadah	1 Buah	Baik
13.	Gambar Orang Wudlu	1 Buah	Baik
14.	Gambar Orang Shalat	1 Buah	Baik

Tabel 3.7 Data Ruang Belajar (Kelas)

Kondisi	Jumlah dan ukuran				Jml. Ruang lainnya yang digunakan untuk R. Kelas (e)	Jumlah ruang yang digunakan u R. Kelas (f) = (d+e)
	Ukuran $7 \times 9 \text{ m}^2$ (a)	Ukuran $> 63 \text{ m}^2$ (b)	Ukuran $< 63 \text{ m}^2$ (c)	Jumlah (d) = (a+b+c)		
Baik	40			30		70
Rsk ringan						
Rsk sedang						
Rsk Berat						
Rsk Total						

Tabel 3.8 Data Ruang Belajar Lainnya

Jenis Ruangan	Jumlah	Ukuran (pxl)	Kondisi
1. Perpustakaan	2 buah	16 x 11	Baik
2. Lab. IPA	1 buah	9 x 9	Sedang
3. Ketrampilan	1 buah	9 x 8	Baik
4 Multimedia	-	-	Baik
5. Kesenian	1 buah	9 x 7	Baik
6. Lab. Bahasa	-	-	-
7. Lab. Komputer	2 buah	9 x 8	Baik
8. PTD	-	-	-
9. Serba-guna/ aula	1 buah	12x9	Baik
10. Lab. Matematika	-	-	-

Tabel 3.9 Data Ruang Kantor

Jenis Ruangan	Jumlah (buah)	Ukuran (pxl)	Kondisi*)
1. Kepala Sekolah	1	4x4	Baik
2. Wakil Kepala Sekolah	1	4x4	Baik
3. Guru	2	15 x 8	Baik
4. Tata Usaha	2	8 x 4	Baik
5. Tamu	1	6x7	Baik
6. Komputer	2	9 x 8	Baik

Tabel 3.10 Data Ruang Penunjang

Jenis ruangan	Jumlah	Ukuran (pxl)	Kondisi
1. Gudang	3 buah	7x12	Baik
2. Dapur	1 buah	2 x 3	Baik
3. Reproduksi	-	-	-
4. Km/ wc guru	2 buah	3x3	Baik
5. Km/wc siswa	60 buah	2 x 3	Baik
6. Bk	1 buah	1x1	Baik
7. UKS	1 buah	6 x 4	Baik
8. Pmr/ pramuka	1 buah	7 x 3	Baik
9. OSIS	1 buah	6 x 5	Baik
10. Ibadah	1 buah	27 x 9	Baik
11. Ganti	1 buah	2 x 2	Baik
12. Koperasi	2 buah	10 x 2,5	Baik
13. Hall/lobi	1 buah	12x9	Baik
14. Kantin	2 buah	8 x 5	Baik
15. Rumah pompa/ menara air	3 buah	4x4	Baik
16. Bangsal kendaraan	1 buah	24 x 5	Baik
17. Rumah guru	5 buah	6 x 6	Baik
18. Pos jaga	1 buah	2 x 2	Baik

Tabel 3.11 Lapangan Olahraga dan Upacara

Lapangan	Jumlah	Ukuran(px1)	Kondisi*)	Keterangan
1. Lapangan olahraga	2 buah	21x14	Baik	
a. Volley	2 buah	9 x 9	Baik	-
b. Lompat jauh	-	-	-	-
c. Lempar lembing	2 buah	40 x 6	Baik	-
d. Basket	2 buah	40 x 6	Baik	-

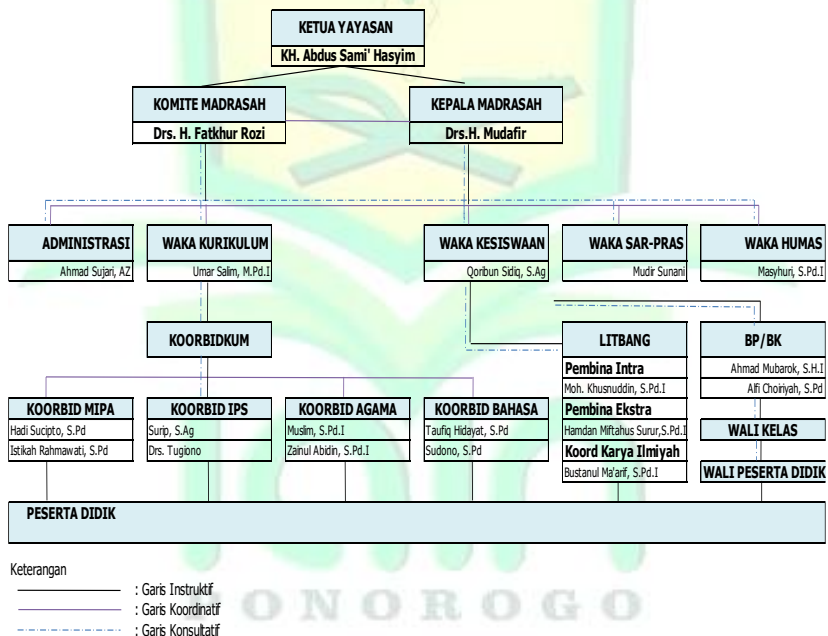
2. Lapangan upacara	2 buah	40 x 15	Baik	-
---------------------	--------	---------	------	---

Tabel 3.12 Sarana dan Prasarana Pramuka

Inventaris	Jumlah	Ukuran(px1)	Kondisi	Keterangan
1. Tenda	50 buah	-	Baik	-
1. Tongkat	50 buah	-	Baik	-
2. Tali pramuka	50 buah	10 m	Baik	-
3. Megaphone	5 buah	-	Baik	-
4. Kompas	5 buah	-	Baik	-

5. Struktur MA Darul Huda⁶

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN MA DARUL HUDA MAYAK PONOROGO



Gambar 3.2 Struktur MA Darul Huda

⁶ Profil Madrasah MA Darul Huda, *dokumentasi*, Ponorogo, 17 Oktober 2019.

B. Data Khusus

1. Penetapan standar mutu MA Darul Huda

Awal dari sistem penjaminan mutu internal adalah penetapan standar. MA Darul Huda sebagai salah satu lembaga pendidikan Indonesia juga melakukan penjaminan mutu dengan menetapkan standar dan tahapan lainnya. Dalam hal ini, MA Darul Huda menetapkan standarnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh wakil kepala madrasah bagian kurikulum sebagai berikut:⁷

“Kalau standar mutu madrasah secara garis besar ya lulus nilai akademik artinya mencapai kkm yang ditentukan dan lulus penilaian praktek dan ibadah amaliyah yang kita sebut penilaian kartu hijau, dan dia tidak memiliki skor pelanggaran berat. Kalau untuk standar mutu dari delapan SNP nanti bisa dilihat di rencana kerja madrasah saya kira disitu sudah disebutkan secara rinci.”

Hal ini diperkuat oleh staf administrasi madrasah yaitu Mahmud Romdhoni sebagai berikut:⁸

“Standar mutu madrasah disesuaikan dengan delapan standar nasional pendidikan. Dari SNP tersebut kita dapat mengetahui madrasah yang baik itu seperti apa.”

MA Darul Huda menentukan standar mutunya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditentukan pemerintah. Hal ini juga dibuktikan dengan

⁷ Umar Salim, *wawancara*, ponorogo, 8 januari 2020.

⁸ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

dokumen rencana kerja madrasah yang disusun sesuai dengan indikator SNP. Berikut salah satu indikator yang termuat dalam rencana kerja madrasah MA Darul Huda:⁹

Tabel 3.13 Indikator Program dalam RKM MA Darul Huda tahun 2017-2021

Program/ sasaran	Indikator keberhasilan	Kegiatan
Terwujudnya kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan beberapa hal yaitu:; kebutuhan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran, serta mengembangkan potensi local, daya saing internasional	Madrasah memiliki kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan beberapa hal yaitu; kebutuhan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran, mengembangkan potensi local, daya saing internasi	Penyusunan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah, kondisi budaya, usia peserta didik dan kebutuhan pembelajaran

Dalam penentuan standar, MA Darul Huda menentukan standar yang dapat dilakukan atau dijamin dengan mengadakan musyawarah bersama yaitu kepala madrasah, wakil-wakil madrasah, ketua program jurusan dan staf administrasi dan keuangan, komite madrasah, yayasan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mahmud:¹⁰

“Kemudian setelah mengetahui standar yang ada kita bisa menentukan standar mutu yang dapat kita penuhi saat ini.

⁹ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 15.

¹⁰ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

Untuk itu kita perlu adakan musyawarah dengan kepala sekolah, wakil-wakil madrasah, ketua progjur dan beberapa staf administrasi dan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa masukan dari komite madrasah dan yayasan.”

Selain berdasarkan SNP, standar mutu madrasah juga didasarkan visi misi madrasah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Madrasah yaitu bapak Mudhofir bahwa:¹¹

“Kami mengacu pada SNP sementara ini. Hanya secara garis besarnya seperti dalam visi misi madrasah.”

Visi dan Misi madrasah tersebut adalah:¹²

- a. Visi: Berilmu, beramal, dan bertakwa
- b. Misi:
 - 1) Membekali peserta didik ilmu yang amaliyah
 - 2) Membiasakan peserta didik beramal ilmiah
 - 3) Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
 - 4) Menumbuhkan akhlak mulia (*akhlaq alkariamat*)
 - 5) Mencetak peserta didik yang mandiri, cerdas, professional dan berwawasan kebangsaan

Dari visi misi tersebut madrasah mengungkap tujuan utama yang ingin diraih madrasah. Selaras dengan visi misi tersebut, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kepala madrasah mengungkapkan dua mutu output yang diharapkan

¹¹ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

¹² Profil MA Darul Huda, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019

yaitu dari sisi akademis dan *akhlaq alkari>mat*. Sisi akademis yang diharapkan adalah memenuhi nilai kkm madrasah saat ini yang sudah diatas angka 72. Dan *akhlaq alkari>mat* yang diharapkan adalah siswa mampu menerapkan adab dan tatakrama dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap guru, lingkungan dan diri peserta didik untuk mendukung tercapainya nilai akademis yang baik.¹³ Hal ini juga diperkuat oleh wakil kepala madrasah yaitu bapak Umar Salim yang menyatakan bahwa:¹⁴

“Kalau standar mutu madrasah secara garis besar ya lulus nilai akademik aratinya mencapai kkm yang ditentukan dan lulus penilaian praktek dan ibadah amaliyah yang kita sebut penilaian kartu hijau, dan dia tidak memiliki skor pelanggaran berat.”

Visi dan misi yang ditetapkan oleh MA Darul Huda ditetapkan dengan melibatkan guru, peserta didik, staf administrasi dan komite madrasah. Visi dan misi yang ditetapkan sudah diselaraskan dengan visi dan misi dari yayasan yang menaungi serta dinas pendidikan terkait.¹⁵

Selain mempertimbangkan visi dan misi, MA Darul Huda juga mempertimbangkan mutu yang sudah berhasil di

¹³ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

¹⁴ Umar Salim, *wawancara*, ponorogo, 8 januari 2020.

¹⁵ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 40

madrasah lain. Menurut kepala madrasah hal tersebut dilakukan agar madrasah semakin baik. Namun dalam penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi madrasah.¹⁶

Standar mutu MA Darul Huda ini secara rinci disebutkan dalam rencana kerja madrasah sebagai berikut:

a. Standar isi

Standar yang ditetapkan pada komponen ini adalah:¹⁷

- 1) Madrasah mengembangkan kurikulum dengan menggunakan panduan yang disusun BSNP, mempertimbangkan karakteristik daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran, dan menyertakan alokasi waktu, rencana program remedial, dan pengayaan bagi peserta didik.
- 2) Madrasah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik dengan menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik dan menyediakan kegiatan ekstra kurikuler untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik.

¹⁶ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

¹⁷ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 12-18.

Standar ini diterapkan madrasah dengan mengadakan program lintas peminatan yang menjadi kebijakan pemerintah di tiga jurusan yang disediakan yaitu IPA, IPS, dan IIA (agama). Madrasah juga memberikan muatan lokal pada kurikulumnya yaitu kaligrafi dan kajian kitab kuning sebagai bentuk pengembangan kesenian ketrampilan dan karakteristik budaya pesantren. Selain itu, juga membentuk program ekstrakurikuler pramuka dan PMR beserta organisasi di dalamnya dan pengembangan bakat.¹⁸

b. Standar proses

Standar yang ditetapkan pada komponen proses adalah:¹⁹

- 1) Pengembangan silabus dengan berdasarkan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan panduan KTSP oleh dilakukan guru secara mandiri atau berkelompok
- 2) RPP yang sesuai standar yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran dan memperhatikan perbedaan gender, minat, bakat, motivasi belajar, potensi, emosional, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai-nilai, dan lingkungan peserta didik.

¹⁸ Kondisi Lapangan pada delapan SNP, *observasi*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

¹⁹ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 19-27.

- 3) Penyediaan buku yang sesuai dengan pembelajaran meliputi buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran yang diakses dengan mudah oleh peserta didik dan Guru menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar lain selain buku pelajaran secara tepat dalam pembelajaran untuk membantu dan memotivasi peserta didik.
- 4) Proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dan memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi, serta mendapatkan konfirmasi.
- 5) Mengadakan supervisi dan evaluasi pembelajaran pada setiap tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan oleh Kepala Madrasah dan Pengawas.

Dalam penerapannya di MA Darul Huda menyediakan dan menggunakan sumber-sumber terbaru yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dikelola oleh madrasah. Madrasah juga berusaha melakukan pengembangan buku bahan ajar berbahasa Arab sesuai materi yang diterapkan. Madrasah juga

memberikan fasilitas bagi guru untuk mengembangkan metode belajar agar pembelajaran lebih menyenangkan. Kepala sekolah juga mengontrol jalannya pembelajaran setiap hari yang dibantu dengan program kerja OSIS.²⁰

c. Standar kompetensi lulusan

MA Darul Huda menetapkan standar bahwa setiap lulusan mencapai target akademis yang diharapkan dengan adanya kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan SKL, kemajuan sebagai pembelajar yang mandiri dan memiliki motivasi belajar dan rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu, madrasah mengharapkan setiap lulusan dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat, mengembangkan kepribadian peserta didik, mengembangkan keterampilan hidup serta mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat diterima.²¹ Gambaran umum standar kompetensi lulusan MA Darul Huda berdasarkan observasi peneliti adalah lulusan memiliki nilai akademik yang baik di antaranya nilai raport di atas kkm madrasah dan lulus UN. Madrasah mensyaratkan lulusan yang berakhlakul karimah dengan menunjukkan

²⁰ Kondisi Lapangan pada delapan SNP, *observasi*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

²¹ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 28-31.

prilaku yang baik sesuai nilai-nilai pesantren yang ada dan kelak menjadi anggota masyarakat yang berguna dilingkungannya dengan mensyaratkan lulus penilaian ibadah-ibadah amaliah yang sudah ditentukan madrasah.²²

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

MA Darul Huda memiliki standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:²³

- 1) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai
- 2) Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai
- 3) Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai

Dalam hal ini, madrasah mensyaratkan guru tenaga pendidik dan kependidikan baru memiliki pendidikan minimal S1 dan memenuhi kriteria khusus dari madrasah seperti mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dan taat beribadah. MA Darul Huda juga memperbantukan guru lulusan pesantren yang memiliki kemampuan yang sama seperti guru lain yang berpendidikan formal pada bidang-tertentu. Madrasah juga

²² Kondisi Lapangan pada delapan SNP, *observasi*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

²³ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 32-35.

mengembangkan tenaga pendidik dengan workshop secara mandiri maupun mendatangkan narasumber dari luar.²⁴

e. Standar sarana dan prasarana

Standar yang ditetapkan dalam sarana dan prasarana adalah menyediakan sarana yang memadai dengan memenuhi standar terkait dengan ukuran ruangan, jumlah ruangan, persyaratan untuk sistem ventilasi, dan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran. Selain itu, madrasah memelihara kondisi dengan baik secara berkala sesuai dengan persyaratan standar serta aman dan nyaman bagi peserta didik dan memberi kemudahan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus.²⁵ Hal tersebut diperjelas melalui pengamatan peneliti bahwa sarana dan prasarana di MA Darul Huda lengkap dengan laboratorium, perpustakaan dan lainnya. Tetapi pada beberapa kelas berada pada kondisi kurang layak. Hal tersebut terus diperbaiki dengan pembangunan gedung dan kelas baru yang memadai. Madrasah juga melakukan pengecekan secara berkala dan memperbaiki fasilitas untuk menjaga kenyamanan siswa belajar.²⁶

²⁴ Kondisi Lapangan pada delapan SNP, *observasi*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

²⁵ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 36-39.

²⁶ Kondisi Lapangan pada delapan SNP, *observasi*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

f. Standar pengelolaan

Standar yang ditetapkan dalam pengelolaan MA Darul Huda adalah:²⁷

- 1) Kinerja pengelolaan madrasah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak melalui sosialisasi dan menunjukkan adanya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- 2) Rencana kerja memiliki tujuan yang jelas dan perbaikan berkelanjutan dan disosialisasikan pada seluruh pemangku kepentingan
- 3) Rencana pengembangan madrasah (RKM) dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran madrasah dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah (renstra) dan melakukan evaluasi diri serta menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan
- 4) Pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid dengan mengelola dan menyediakan sistem informasi pengelolaan dengan cara yang efektif, efisien dan dapat di pertanggungjawabkan dan mudah diakses

²⁷ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 40-47.

- 5) Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatkan keefektifan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan melakukan supervisi dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional
- 6) Masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan Madrasah dalam pengelolaan kegiatan akademis dan nonakademis.

Rincian standar diatas diperjelas melalui pengamatan peneliti bahwa madrasah berusaha melengkapi data wajib yang dipenuhi yang sudah ditetapkan pemerintah seperti visi misi, EDM, RKM, RKTm dan lainnya. Sistem informasi madrasah dibangun secara efektif dan efisien yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi baru seperti *WhatsApp*, *Zipgrade*, *Google form* agar informasi tersampaikan dengan mudah, jelas, cepat dan tepat seperti pengecekan pengumpulan soal, khataman, informasi nilai peserta didik. Madrasah juga menjaga komunikasi yang baik dengan guru, orang tua murid, komite madrasah dan masyarakat, pengasuh dan pengurus pondok dengan musyawarah agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung seperti adanya pertemuan wali murid, pelibatan komite madrasah dan masyarakat dalam penyusunan

rencana kerja, dukungan kegiatan dan kontrol peserta didik dari pengurus pondok.²⁸

g. Standar pembiayaan

Standar yang ditetapkan madrasah dalam pembiayaan adalah:²⁹

- 1) Madrasah merencanakan keuangan sesuai standar yang merujuk Peraturan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota melibatkan komite madrasah dan pemangku kepentingan yang relevan secara transparan, efisien, dan akuntabel dan membuat pelaporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
- 2) Madrasah berupaya untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya dengan mencari dana dengan inisiatifnya sendiri, membangun jaringan kerja dengan dunia usaha dan dunia industri setempat, memelihara hubungan dengan alumni.
- 3) Madrasah menjamin kesetaraan akses dengan melayani peserta didik dari berbagai tingkatan sosial ekonomi termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus dan melakukan subsidi silang kepada peserta didik kurang mampu di bidang ekonomi

²⁸ Kondisi Lapangan pada delapan SNP, *observasi*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

²⁹ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 48-56.

Dalam penerapannya madrasah memberikan kelonggaran bagi siswa yang tidak mampu pihak madrasah memberikan keringanan biaya dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang disetujui oleh pengasuh. Kenaikan biaya pendidikan dikomunikasikan melalui musyawarah pada PWM. Pelayanan pembayaran dapat melalui virtual account jika berhalangan membayar secara tunai dan diberikan surat keterangan lunas. Untuk pembiayaan madrasah memiliki dana operasional harian dan dapat mengajukan proposal kepada pengasuh apabila pembiayaan di atas batas tertentu atau dana operasional harian tidak mencukupi. Pendanaan madrasah sendiri dikelola secara terpusat dalam satu yayasan. Dana tersebut diperoleh dari BOS, penggalangan dana alumni, sumbangan dari peserta didik, yayasan, dan komite madrasah dan lainnya. Kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik diberikan dengan sistem bisyaroh (tanda jasa bukan gaji).³⁰

h. Standar penilaian

Standar yang ditetapkan MA Darul Huda adalah:³¹

- 1) Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akademik maupun nonakademik dengan

³⁰ Kondisi Lapangan pada delapan SNP, *observasi*, Ponorogo, 23 Oktober 2019

³¹ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 57-64

menyusun perencanaan penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta didik, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kriteria penilaian termasuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), melaksanakan penilaian secara teratur, menerapkan berbagai teknik, bentuk, dan jenis penilaian untuk mengukur prestasi dan kesulitan belajar peserta didik.

- 2) Penilaian yang berdampak pada proses belajar dengan memberikan masukan dan komentar mengenai penilaian yang mereka lakukan pada peserta didik dan menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- 3) Orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka dengan diberikan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan dan dilibatkan dalam meningkatkan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Madrasah meberlakukan beberapa penilaian sebagai persyaratan naik kelas dan kelulusan yaitu penilaian rapot, penilaian kartu hijau, karya tulis ilmiah dan kartu sakti. Penilaian rapot yang meliputi penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, penilaian harian dari nilai harian, remidi, ketrampilan, praktek dan portofolio. Hasil penilaian disampaikan melalui media *WhatsApp* agar mudah cepat dan

tepat sasaran. Penilaian semester menggunakan lembar ujian dan jawaban yang dikroeksi menggunakan aplikasi *Zipgrade* agar lebih valid dan segera dapat diketahui hasilnya. Pembuatan soal menggunakan generator soal untuk efisiensi dan efektifitas waktu. Penilaian kartu hijau yang berisikan ibadah amaliyah (tahlil, hafalan surat pendek, wirid, dzikirul ghofilin, wudlu, tayamum, sholat fardhu, sholat tahajud, sholat dhuha, sholat jama'qashar, bilal tarawih-jum'at dan khutbah jum'at (khusus putra), fiqhun nisa' (khusus putri). Selain itu, berisikan praktek bahasa Arab dan Inggris. Karya tulis ilmiah (Paper) ini diberlakukan bagi kelas XI dan XII yang sebelumnya sudah ada bimbingan dari madrasah. Isi dari paper tersebut harus sesuai dengan program jurusan masing-masing. Kartu sakti juga diberlakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa yang memuat aturan dan beberapa jenis pelanggaran dengan sistem penskoran jika terjadi pelanggaran.³²

Setelah menentukan standar yang ada, MA Darul Huda melakukan sosialisasi terhadap standar tersebut agar pemangku kepentingan dapat melaksanakan penjaminan mutu madrasah. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui pemasangan *baner* tentang visi misi, penyampaian dalam pertemuan resmi

³² Kondisi Lapangan pada delapan SNP, *observasi*, Ponorogo, 23 Oktober 2019.

seperti rapat, PWM dan upacara. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mahmud bahwa:³³

“Untuk secara garis besarnya di visi misi kita sudah ada seperti yang tertera di baner madrasah putri. Dipasang seperti itu agar ketika siswa dan guru yang datang mereka akan membaca dan kalau setiap hari lewat situ tentu lama kelamaan mereka akan hafal dan tersadarkan. Selain itu, juga dalam pertemuan resmi kita sampaikan seperti dalam rapat bersama guru, pertemuan wali murid dan saat upacara agar tidak hanya guru yang sadar, tetapi juga siswa dan wali murid. Kesadaran ini diharapkan dapat membantu jalannya penjaminan mutu.”

Hal tersebut juga tampak dalam pertemuan resmi di MA Darul Huda. Kepala sekolah sebagai kepala madrasah selalu mengingatkan terhadap guru untuk meningkatkan adab dan tata krama baik itu pada guru, murid dan lingkungan. Dalam penyampaiannya kepala madrasah menyelipkan visi dan misi madrasah untuk menyadarkan kembali para guru.³⁴

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan standar ini dilakukan timpengembang madrasah yang melibatkan komite madrasah dan masyarakat pada delapan komponen standar. Standar tersebut disosialisasikan dalam bentuk visi-misi kepada seluruh pemangku kepentingan madrasah.

³³ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

³⁴ Situasi pertemuan resmi MA Darul Huda, *observasi*, Ponorogo, 29 Desember 2019.

2. Pemetaan mutu MA Darul Huda

Setelah melakukan penetapan standar mutu, tahapan berikutnya adalah pemetaan mutu. Dalam hal ini, MA Darul Huda terlebih dahulu melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri yang dilakukan MA Darul Huda bertujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan madrasah serta rekomendasi yang tepat. Hal ini juga tertulis dalam dokumen EDM bahwa MA Darul Huda menyusun EDM bertujuan untuk:³⁵

- a. Mengenal seluruh potensi madrasah yang dapat dikelola dan dikembangkan,
- b. Menjadikannya sebagai pedoman operasional untuk mengelola madrasah,
- c. Mengukur keberhasilan / ketidak berhasilan dalam mengelola madrasah,
- d. Menemukan berbagai permasalahan yang timbul yang dapat menghambat, memberikan peluang atau ancaman

Ada beberapa cara untuk mendapatkan data terkait kelebihan dan kekurangan MA Darul Huda. Hal ini disampaikan oleh waka kurikulum madrasah dalam wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:³⁶

³⁵ Dokumen Evaluasi Diri Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 2.

³⁶ Umar Salim, *wawancara*, ponorogo, 8 januari 2020.

“Data itu mungkin bisa kita ketahui dari masukan komite, atau dari pengasuh dan pengurus pondok dan beberapa catatan rapat yang sudah kita laksanakan. Dari situ kita bisa rapatkan secara intern madrasah sendiri atau dengan para kepala madrasah lain dalam satu naungan yayasan guna mencari solusi dan mana yang perlu kita dahulukan.”

Dari jawaban di atas, menunjukkan bahwa di antara cara mendapatkan data EDM yang dilakukan oleh MA Darul Huda adalah dengan menerima kritik dan saran dari komite madrasah, dan menggali catatan hasil pertemuan resmi atau hasil evaluasi yang berkaitan tentang kelebihan dan kekurangan madrasah. Setelah menemukan beberapa catatan terkait kelebihan dan kekurangan madrasah, MA Darul Huda melakukan musyawarah dalam pertemuan resmi guna mengetahui kekurangan dari yang sangat penting untuk segera diselesaikan dan yang tidak terburu-buru harus diselesaikan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Mahmud bahwa:³⁷

“Dalam mengevaluasi diri madrasah harus melakukan observasi secara menyeluruh terhadap apa yang sudah kita jalankan. Setelah itu untuk menentukan apa kelebihan dan kekurangannya serta rekomendasinya kita bahas dalam rapat yang melibatkan kepala madrasah seluruh wakil madrasah, perwakilan guru, progjur, dan notulennya dari staf administrasi.”

³⁷ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

Dari pernyataan tersebut, menyebutkan keterlibatan kepala madrasah seluruh wakil madrasah, perwakilan guru, progjur, dan staf administrasi dalam EDM. Hal ini diperjelas dalam dokumen yang menyebutkan bahwa proses EDM menjadi tanggung jawab kepala Madrasah dan dilakukan oleh tim pengembang madrasah yang disebut TPM yang terdiri dari Kepala Madrasah, guru, komite madrasah, orang tua peserta didik, dan pengawas. Proses EDM dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.³⁸

Proses EDM yang dilakukan oleh MA Darul Huda dimulai dari pembentukan TPM (Tim Pengembang Madrasah) yang akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik pendidik maupun tenaga kependidikan serta semua pemangku kepentingan madrasah dalam menilai kinerja madrasah berdasarkan beberapa indikator yang dirumuskan dalam Instrumen. Kemudian mengadakan pelatihan yang membahas penggunaan instrumen. Selah itu, pelaksanaan EDM yang kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan RKM dan RKAM. Dalam prosesnya EDM juga akan mempertimbangkan visi misi sebagai pembanding selain SPM

³⁸ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020, 3.

dan SNP. Kegiatan EDM akan mendorong madrasah untuk menyempurnakan visi misi jika memang kurang memadai.³⁹

Dokumen di atas juga memperkuat bahwa MA Darul Huda juga menggali data EDM dengan mengadakan pertemuan wali murid, bertanya langsung kepada peserta didik dan dengan para guru melalui pertemuan resmi. Hal tersebut diungkapkan dalam pernyataan narasumber bahwa:⁴⁰

“Selain itu, kita dapat memperoleh data evaluasi dari kegiatan PWM. Dalam acara pertemuan dengan wali murid secara terbuka seluruh wali murid dan masyarakat dapat bertanya atau memberikan masukan terhadap madrasah. Kemudian kita juga mengambil data dengan bertanya kepada peserta didik apa yang masih menjadi kendala yang dialami mereka. Tak lupa para guru, dalam kegiatan rapat kita juga mengambil masukan dari para guru. Dari hasil rapat-rapat yang sudah ada itu juga bisa menjadi bahan evaluasi kita.”

Bapak Mahmud juga mengungkapkan bahwa beberapa kekurangan madrasah yang telah ditemukan kemudian dicarikan solusi dalam pembahasan rapat EDM. Dari beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh anggota rapat akan dipilih mana yang paling tepat dengan penyesuaian terkait tenaga, waktu, tempat dan biaya.⁴¹ Sehubungan dengan hal tersebut,

³⁹ Dokumen Evaluasi Diri Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 4.

⁴⁰ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

⁴¹ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

instrumen EDM di MA Darul Huda terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan SPM dan SNP. Setiap bagian terdiri atas:⁴²

- a. Serangkaian indikator SNP sebagai dasar untuk memperoleh informasi kualitatif tentang kinerjanya,
- b. Pada satu standar terdiri dari beberapa komponen menggambarkan kondisi madrasah secara menyeluruh,
- c. Menetapkan rekomendasi dan prioritasnya di akhir pembahasan tiap komponen
- d. Menjadikan prioritas rekomendasi dan indikator/pernyataan SPM dan SNP yang berkaitan dengan mutu pembelajaran dan aspek-aspek yang perlu dikembangkan menjadi dasar penyusunan rencana kerja.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan manfaat EDM sebagai bahan dalam merumuskan RKM. Selain itu, hasil EDM juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:⁴³

- a. Menjadikan madrasah dapat mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan untuk dikembangkan nantinya,

⁴² Dokumen Evaluasi Diri Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 6.

⁴³ Dokumen Evaluasi Diri Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 5.

- b. Menjadikan madrasah dapat mengidentifikasi peluang dalam memperbaiki mutu, menilai keberhasilan peningkatan mutu, dan menyesuaikan program yang sudah ada,
- c. Menjadikan madrasah dapat mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dan menakar jenis kebutuhan yang diperlukan dalam memperbaiki mutu.
- d. Menjadikan madrasah dapat mengukur pencapaian kinerja dengan mengacu pada SPM dan SNP.
- e. Madrasah mampu menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan terkait kemajuan dan hasil yang telah dicapai.

Setelah EDM berhasil dirumuskan dengan format yang terpisah terkait tingkat pencapaian dan bukti pencapaian untuk kemudia dilaporkan ke Kankemenag guna dianalisis lanjut dengan menggunakan EMIS yaitu Educational Management Information System/Sistem Informasi Manajemen Pendidikan untuk perencanaan pemenuhan mutu dan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu. Hal tersebut juga digunakan untuk memvalidasi internal yaitu menilai dan mencocokkan yang dilakukan oleh pengawas Madrasah, dan validasi eksternal dengan beberapa madrasah oleh kelompok kerja pengawas madrasah yang disebut KKPM pada tingkat kecamatan yang

dibantu staf penjaminan mutu dari lembaga penjaminan mutu pendidikan.⁴⁴

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemetaan mutu di MA Darul Huda menggunakan EDM. Hal tersebut dilakukan Tim Pengembang Madrasah pada delapan komponen SNP. Dari beberapa kekurangan yang ada, akan diidentifikasi penyebab dan rekomendasi yang tepat.

3. Perencanaan pemenuhan mutu MA Darul Huda

Perencanaan pemenuhan merupakan tahap ketiga setelah lembaga pendidikan memetakan mutu. MA Darul Huda menyusun perencanaan pemenuhan mutu dalam RKM dan RKTM hal ini dijelaskan oleh Bapak Mahmud sebagai berikut:⁴⁵

”Perencanaan yang kami lakukan ya dalam bentuk RKM ada yang tahunan dan ada yang empat tahunan.”

Rencana Kerja Madrasah atau RKM yang disusun untuk digunakan dalam empat tahun ke depan bertujuan agar madrasah memiliki patokan dalam mengelola program, mengimplementasikan, *memonitoring* dan mengevaluasi

⁴⁴ Dokumen Evaluasi Diri Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 7.

⁴⁵ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

dengan baik, terukur dan terstruktur.⁴⁶ Selain itu, juga menjadi dorongan dalam peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan.⁴⁷

Selain RKM, madrasah juga menyusun Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTm) yang bertujuan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Membantu madrasah mengatur anggaran dalam satu tahun secara bijaksana
- b. Membantu madrasah menanggapi tuntutan partisipasi masyarakat, dan
- c. Membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas madrasah.

RKTm bagi MA Darul Huda juga dimanfaatkan sebagai patokan untuk menggapai tujuan dalam peningkatan kualitas pendidikan dalam satu tahun. Selain sebagai acuan dan panduan bagi madrasah dalam memanfaatkan subsidi dana dari pemerintah dan non pemerintah. RKTm juga dipergunakan sebagai tolak ukur bagi sejauh mana program-program

⁴⁶ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 69.

⁴⁷ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 67.

⁴⁸ Dokumen Rencana Kerja Tahunan Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 1-2.

peningkatan mutu pendidikan berhasil diimplementasikan di madrasah.⁴⁹

Perencanaan pemenuhan mutu dalam RKM disusun berdasarkan hasil dari identifikasi dan analisis kondisi madrasah yang telah dibahas sebelumnya dalam pemetaan mutu.⁵⁰ Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Madrasah sebagai berikut:⁵¹

“Dari beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di EDM, kami akan berusaha menemukan rekomendasi yang tepat untuk beberapa kekurangan madrasah. Untuk peluang sambil memenuhi kekurangan, kami akan mencoba beberapa peluang yang ada contoh untuk yang baru-baru ini, kita mengadakan classmeeting yang disesuaikan dengan kegiatan porseni untuk selanjutnya di buat pelatihan rutin sehingga peluang untuk dapat bersaing dengan madrasah lain bisa memenuhinya. Jadi dari kekurangan dan peluang yang ada, kami akan menentukan kegiatan apa yang sesuai berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang diprioritaskan.”

Program dan kegiatan yang disusun dalam RKM dan RKTm disesuaikan dengan kondisi madrasah, target pemangku kepentingan, serta tantangan dalam lingkungan strategis pendidikan. Hal tersebut ditujukan untuk menjadikan sasaran

⁴⁹ Dokumen Rencana Kerja Tahunan Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 2.

⁵⁰ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 12.

⁵¹ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, Ponorogo, 11 Januari 2020.

dan program pengembangan madrasah dalam peningkatan mutu lebih realistis dan konsisten.

Perencanaan kerja madrasah ini memerlukan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan demokratis. Selain itu, karakteristik dari rencana kerja MA Darul Huda ini adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Partisipatif yang berarti semua unsur terlibat dalam peningkatan mutu.
- b. Transparan berarti madrasah akan menerima masukan dari orangtua murid dan masyarakat untuk dimasukkan dalam rencana kerja sehingga lebih mengutamakan asas keterbukaan dan demokratis dan dipertanggungjawabkan secara langsung dengan memanfaatkan papan pengumuman pertemuan komite dan paguyuban kelas.
- c. Multi Sumber berarti menggunakan berbagai sumber dana untuk meningkatkan mutu madrasah.
- d. Komprehensif yang berarti rencana kerja berisikan semua kegiatan, sarana prasarana serta pendanaannya.

Rencana kerja madrasah disusun melalui tim-tim yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah melalui pemberian surat kerja (SK). Bapak Mahmud sebagai staf administrasi menyebutkan

⁵² Dokumen Rencana Kerja Tahunan Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, iii.

bahwa tim tersebut terdiri dari para guru tertentu, keuangan, staf administrasi, pihak keuangan serta perwakilan masyarakat dan komite. Hal ini diperkuat oleh dokumen RKM MA Darul Huda yang menyebutkan keterlibatan pengurus komite dan tokoh masyarakat dalam penyusunan RKM bersama tim penyusun yang telah ditunjuk oleh kepala madrasah.⁵³

Tim penyusun yang telah ditunjuk bersama komite dan masyarakat dibagi dalam 8 standar sesuai SNP. Setiap tim akan merumuskan rencana kerja sesuai standar yang ditentukan pada tim tersebut. Kemudian kepala madrasah sebagai penanggung jawab akan mengumpulkan semua tim yang sudah selesai membuat laporan rencana kerja dalam rapat. Rapat tersebut ditujukan untuk membahas kesesuaian rencana kerja terhadap hasil pemetaan mutu dan SNP yang telah dirumuskan dan disepakati bersama.⁵⁴

Dalam perumusan RKM terdapat dua tahap yang meliputi merumuskan program madrasah dan menyusun jadwal kegiatan. Dalam perumusan program madrasah meliputi empat langkah yang meliputi menetapkan sasaran, menentukan indikator keberhasilan, menentukan kegiatan dan menetapkan

⁵³ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 67.

⁵⁴ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

penanggung jawab.⁵⁵ Hal ini juga disampaikan Bapak Mahmud dalam wawancara sebagai berikut:⁵⁶

”Perencanaan yang kami lakukan ya dalam bentuk RKM ada yang tahunan dan ada yang empat tahunan. Dalam hal tersebut, madrasah akan menentukan apa saja program dan indikator keberhasilan, kegiatan, penanggung jawab dan kapan hal tersebut dilakukan.”

Dalam perumusan RKTMM sendiri disusun berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana kerja madrasah pada tahun sebelumnya. Kemudian dalam merumuskan perlu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yaitu Permendiknas No. 19/2007 yang berisi rencana kerja tahunan madrasah atau RKTMM dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran madrasah yang disebut RKAM. Laporan RKTMM memuat beberapa unsur yaitu sasaran, program, indikator keberhasilan, kegiatan, penanggungjawab dan jadwal kegiatan, dan anggaran serta sumber pendanaannya.⁵⁷

Langkah dalam penyusunan RKTMM terbagi dalam dua tahap. *Pertama*, merumuskan rencana strategis Madrasah yang dilakukan melalui enam langkah yaitu menentukan sasaran,

⁵⁵ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 12.

⁵⁶ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, Ponorogo, 23 Januari 2020

⁵⁷ Dokumen Rencana Kerja Tahunan Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 1.

merumuskan program, menetapkan indikator keberhasilan, dan menetapkan kegiatan, menentukan penanggung jawab dan membuat jadwal kegiatan. *Kedua*, menyusun rencana rutin madrasah dengan tahapan seperti rencana strategis madrasah.⁵⁸

Selain rumusan program dan jadwal kegiatan dalam RKM dan RKTm, madrasah juga menyusun rancangan anggaran yang diperlukan untuk tiap program dan kegiatan. Pembiayaan program dan kegiatan ini tergantung pada pendanaan. Dalam hal ini keuangan di MA Darul Huda dikelola tim keuangan yang dibawahi langsung oleh yayasan. Untuk beberapa kegiatan yang membutuhkan biaya yang besar perlu adanya persetujuan pengasuh. Namun madrasah tetap diberi uang operasional sehari-hari yang tanpa persetujuan pengasuh dapat secara langsung dikelola madrasah. Hal ini disampaikan Bapak Mahmud pada wawancara, sebagai berikut:

”Untuk pembiayaan kita menggunakan sistem terpusat sehingga untuk beberapa pembiayaan yang cukup besar dan kegiatan yang tidak setiap hari kita harus mengajukan proposal yang diketahui keuangan dan disetujui pengasuh. Untuk kegiatan harian semisal kartu sakti kita mengambil dana operasional madrasah maksudnya langsung meminta dikeuangan pusat. Jadi ya tergantung kegiatannya.”

Terkait dengan perencanaan pembiayaan program dan kegiatan, MA Darul Huda melakukan penyesuaian terhadap

⁵⁸ Dokumen Rencana Kerja Tahunan Madrasah MA Darul Huda tahun 2017, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 4.

sumber pendanaan. Sumber dana yang diperoleh MA Darul Huda adalah BOS dan Komite Madrasah. Namun seperti keterangan sebelumnya, bahwa madrasah tidak mengelola keuangan secara mandiri tetapi berada dalam kendali keuangan yayasan. Setelah melakukan penyesuaian madrasah akan menyusun rencana anggaran madrasah yang memuat rencana biaya dan sumber pendanaan serta rencana kegiatan dan anggaran kegiatan.⁵⁹

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pemenuhan mutu dirumuskan dalam bentuk RKM dan RKTm yang berisikan rencana kerja dan anggaran. Hal tersebut disusun oleh TPM yang juga melibatkan komite madrasah dan masyarakat serta anggota keuangan. Dalam RKM dan RKTm tersebut memuat sasaran, indikator keberhasilan, program, kegiatan, penanggung jawab dan jadwal kegiatan. Penetapan rencana kerja dan anggaran ini berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah disesuaikan dengan standar mutu, visi misi, dan kondisi madrasah.

4. Pemenuhan mutu MA Darul Huda

Perencanaan pemenuhan mutu yang disusun dalam RKM dan RKTm akan memunculkan beberapa kegiatan yang

⁵⁹ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 32 .

hendaknya dilaksanakan oleh madrasah. Pemanfaatan RKM dalam pemenuhan mutu adalah sebagai acuan. Hal ini berarti, sudah selayaknya seluruh program dan kegiatan dilaksanakan tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya pembatalan kegiatan yang sudah direncanakan. Hal tersebut dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tempat atau kondisi madrasah yang lain. Hal dicontohkan oleh bapak Mahmud sebagai berikut:⁶⁰

“Kita menggunakan RKM tersebut sebagai acuan. Kalau bisa kita laksanakan semua namun ada beberapa kendala yang membuat beberapa rencana yang sudah kita lakukan terpaksa dicancel semisal karena keterbatasan waktu, dan dan tempat. Misalnya madrasah ingin membangun fasilitas lapangan olahraga yang memadai itu perlu persetujuan pengasuh dan juga tidak mudah kita menentukan lokasinya dan tenaga yang memadai jika dari pihak pondok masih mengadakan pembangunan lain, Selain itu, waktu juga harus dipikirkan.”

Kegiatan yang telah disepakati dan sudah ditentukan penanggung jawabnya akan dirancang oleh penanggung jawab dan tim yang sudah ditunjuk. Perancangan tersebut akan dibahas dalam rapat yang mencakup pembahasan terkait konsep kegiatan, teknis kegiatan, bidang-bidang kegiatan dan

⁶⁰ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

penanggung jawabnya. Hal ini disampaikan oleh bapak Umar Salim sebagai berikut:⁶¹

“Setelah kita mengadakan rapat itu tadi akan muncul solusi. Misalkan tentang program pendisiplinan anak dan mendidik karakter dengan adanya kartu sakti. Untuk mengkonsepnya kita perlu rapat intern madrasah dengan kepala madrasah, wakil kesiswaan, ketua program jurusan dan lainnya. Dalam rapat itu kita akan membahas pelanggaran apa saja yang masuk dalam bukunya, seperti apa bentuk kartunya nanti, pelaksanaannya seperti apa. Dan mungkin itu juga membutuhkan beberapa kali rapat sehingga bisa siap untuk dijalankan.”

Hal ini diperkuat oleh bapak Mahmud yang menuturkan bahwa keberlangsungan kegiatan terus mendapatkan pemantauan dari atasan. Jika terjadi kendala maka pihak atasan yaitu kepala sekolah beserta para wakil madrasah serta penanggung jawab kegiatan akan berdiskusi untuk memberikan solusi yang tepat. Selain itu, perlunya sosialisasi dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar mereka memahami tugas dan tanggungjawabnya. Hal tersebut dicontohkan bapak Mahmud sebagai berikut:

”Misalkan program pengembangan bakat, setelah kita merencanakan siapa penanggung jawabnya dan kapan terlaksananya serta perencanaan biaya sudah matang maka kita akan menurunkan SK atau surat keputusan kepada penanggung jawab untuk membuat tim dan melaksanakan

⁶¹ Umar Salim, *wawancara*, ponorogo, 8 januari 2020.

kegiatan. Tim itulah yang akan membahas teknisnya bagaimana dan lainnya yang kemudian kegiatan tadi jika sudah siap dijalankan maka tim tadi akan melaksanakannya.”

Setelah kegiatan terlaksana maka penanggung jawab harus melaporkan pelaksanaan kegiatan, hasil, kendala dan rekomendasinya kepada madrasah yaitu kepala madrasah, guru dan seluruh pemangku kepentingan lembaga. Hal ini dilaksanakan dalam pertemuan resmi seperti rapat guru agar diketahui oleh seluruh *stakeholder*. Keberhasilan kegiatan juga akan dilaporkan kepada pengasuh pondok selaku ketua yayasan dalam rapat internal pondok. Hal ini disampaikan juga oleh bapak Mahmud sebagai berikut:⁶²

“Penanggung jawab wajib melaporkan hasil kepada kepala madrasah terkait hasil kegiatan, kendala, dan rekomendasi lain dalam pengembangan kegiatan setelah kegiatan selesai atau selesai pada tahap pertama misalkan. Hal itu biasanya dilakukan dalam rapat guru agar semua pemangku pendidikan mengetahuinya. Selain itu, kesuksesan sebuah kegiatan ini nanti juga akan dilaporkan oleh kepala madrasah kepada pengasuh dalam rapat internal pondok yang berisikan para kepala madrasah dalam satu yayasan.”

Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu di MA Darul Huda memerlukan profesionalisme para pelaku dan pelaksana proses pendidikan agar keberhasilan dan peningkatan mutu tercapai.

⁶² M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

Selain itu, memerlukan manajemen madrasah yang transparan, lebih akomodatif dan demokratis untuk mengembangkan madrasah menuju arah yang lebih baik. Selain itu, membutuhkan keterlibatan dan dukungan para *stakeholder* madrasah utamanya para orangtua murid, masyarakat dan tokoh masyarakat dan agama untuk mendorong pelaksanaan proses belajar mengajar madrasah semakin bermutu.⁶³ Hal pendukung tersebut tercermin pada saat simulasi pengisian ARD yang menunjukkan bahwa beberapa staf administrasi dan guru yang berkompeten saling membantu untuk memberikan pemahaman guru lain tentang pengisian ARD. Pada pertemuan tersebut, madrasah juga menyediakan perangkat seperti *Wifi*, proyektor dan lainnya untuk memberikan pemahaman secara lebih jelas. Hal tersebut menunjukkan profesionalisme madrasah dan dukungan berbagai pihak agar kegiatan berjalan lancar.⁶⁴

Sumbangan dana, tenaga dan pikiran dari berbagai pihak yang berkepentingan di MA Darul Huda sudah pasti dibutuhkan dalam memajukan proses pendidikannya. Namun, pihak madrasah juga seringkali menemui hambatan dalam

⁶³ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 69.

⁶⁴ Situasi pertemuan resmi MA Darul Huda, *observasi*, Ponorogo, 21 Oktober 2019.

pelaksanaan kebijakan pemerintah karena kebijakan yang sering berubah-ubah dalam waktu singkat sehingga terjadi kesalahfahaman sehingga pada akhirnya terjadi kerancuan di pihak madrasah. Oleh karena itu, dukungan dari pihak-pihak tertentu terkait kebijakan pendidikan seperti Kemenag daerah, pemerintah provinsi dan pusat sangat dibutuhkan.⁶⁵ Menurut kepala madrasah berjalannya kegiatan pemenuhan mutu, membutuhkan informasi terkini terkait kebijakan pemerintah. Hal ini diberlakukan MA Darul Huda di antaranya berkenaan materi dan dan sistem penilaian.⁶⁶

Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu, madrasah memerlukan beberapa kegiatan penunjang. Hal ini dapat dicontohkan dalam kegiatan wajib belajar sebelum tes dimulai pada saat penilaian semester. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mendorong ketercapaian standar nilai madrasah. Hal tersebut dituturkan kepala madrasah sebagai berikut:⁶⁷

“Dalam hal ini kita mengupayakan agar peserta didik belajar sungguh-sungguh untuk mencapai standar nilai yang ditentukan semisal setiap ujian kita mengadakan belajar bersama beberapa menit sebelum ujian dimulai disetiap mata pelajaran dan ditunggu oleh bapak ibu guru pengawas.”

⁶⁵ Dokumen Rencana Kerja Madrasah MA Darul Huda tahun 2017-2021, *dokumentasi*, Ponorogo, 29 Oktober 2019, 69.

⁶⁶ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

⁶⁷ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

Pada hari-hari efektif sekolah, madrasah mengadakan belajar wajib bagi peserta didik yang mukim dipondok. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, madrasah menjalin kerjasama dengan pihak pondok baik itu dengan pengurus beserta jajarannya maupun pengasuh pondok dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kerjasama ini dilakukan karena beberapa kegiatan penunjang dilaksanakan di luar jam sekolah dan berkaitan erat dengan kegiatan pondok.⁶⁸

Selain mengadakan kerjasama dengan pihak pondok, madrasah memerlukan dukungan orang tua pada setiap program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk motivasi belajar peserta didik. Selain sebagai motivator, peran orang tua diperlukan untuk membantu mengidentifikasi sebab permasalahan pribadi peserta didik yang membuat kurang maksimalnya peserta didik dalam belajar beserta solusinya. Hal ini dicontohkan kepala madrasah dalam wawancara, sebagai berikut:⁶⁹

“Selain itu, untuk mendorong siswa lebih bersemangat belajar, hasil nilai ujian kita sampaikan apa adanya kepada orang tua melalui WA yang saat ini menjadi media komunikasi tercepat dengan orang tua. Hal itu kita berlakukan agar orang tua juga berperan aktif mendorong

⁶⁸ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

⁶⁹ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

peserta didik untuk lebih berprestasi. Dan jikalau nilai anak mereka tidak sesuai yang diharapkan, kita harapkan para orang tua peserta didik membantu madrasah untuk mencari penyebab dan solusi bagi peserta didik agar mereka mampu bersaing dengan teman-temannya di madrasah.”

Salah satu upaya madrasah dalam pemenuhan mutu adalah meningkatkan akhlak peserta didik. Menurut kepala madrasah, seringkali ditemukan kasus terkait peserta didik yang tidak memenuhi standar nilai akademis yang juga memiliki akhlak yang kurang baik. Hal ini membuat madrasah mengupayakan peningkatan kedisiplinan peserta didik melalui penskoran pelanggaran. Penskoran pelanggaran tersebut diwujudkan dalam bentuk kartu sakti yang terdapat *barcode* yang digunakan pula sebagai kartu peserta ujian semester. Di antara bentuk pelanggaran yang termuat adalah meninggalkan kelas tanpa izin saat pembelajaran berlangsung, tidak masuk sekolah tanpa izin dan lainnya.⁷⁰

Di antara upaya untuk mendukung ketercapaian mutu yang diharapkan, madrasah memaksimalkan fungsi guru sebagai role model bagi peserta didik. Hal ini difokuskan pada kepedulian terhadap lingkungan. Kepala madrasah beranggapan bahwa meningkatkan kepedulian lingkungan sekitar akan memberikan

⁷⁰ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

dampak pada kepeduliannya terhadap diri sendiri berkaitan dengan belajar.⁷¹

Selain sebagai role model, guru diharapkan selalu mengingatkan dan memberikan motivasi tentang kepedulian terhadap lingkungan dan peserta didik. Tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan pada guru melainkan diutamakan dibebankan kepada wali kelas. Wali kelas diharapkan dapat membantu menemukan solusi bersama jika peserta didik menemukan kendala berkaitan dengan tugas peserta didik.⁷²

Untuk memaksimalkan kinerja guru dalam rangka pemenuhan mutu madrasah memotivasi guru untuk selalu berinovasi. Agar daya inovasi guru meningkat, madrasah mengadakan beberapa workshop. Selain itu, madrasah menempatkan tenaga pendidik sesuai keahlian. Kepala madrasah menyampaikan hal tersebut dalam wawancara sebagai berikut:⁷³

“Dari segi tenaga pendidik kita berusaha menempatkannya sesuai dengan jenjang pendidikan telah ditempuh. Dalam proses pembelajaran kita juga berusaha mendorong para guru melakukan inovasi-inovasi dengan mengadakan beberapa workshop.”

⁷¹ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

⁷² Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

⁷³ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu, madrasah melakukan tes penerimaan peserta didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Tes tersebut tidak dimaksudkan untuk menyeleksi peserta didik yang dapat sekolah di MA Darul Huda. Hal ini berarti, siswa yang mendaftar sekolah di MA Darul Huda selalu diterima. Madrasah juga berupaya tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik yang memiliki keterbatasan kemampuan. Hal ini dituturkan kepala madrasah sebagai berikut:

“Dari segi inputnya memang kita tidak mengadakan tes masuk tapi bukan berarti tidak bermutu. Dalam lingkungan pesantren inilah yang diajarkan bahwa sudah selayaknya menerima siapapun yang ingin belajar. Pendiri pondok pun berpesan bahwa mereka datang mau belajar itu patut diapresiasi. Di madrasah kami ada beberapa anak secara dzohirnya mungkin ia tidak mampu bersaing dengan temannya karena keterbatasan kemampuan namun disisi yang lain ternyata dia mungkin memiliki jiwa sosial yang baik atau dalam bidang spiritual dia sangat tekun beribadah ataupun memiliki daya kreatifitas yang tinggi. Karena kami yakin setiap anak memiliki kelebihan masing-masing.”

Salah satu kegiatan pendukung ketercapaian pemenuhan mutu adalah mengadakan *sharing* dengan para alumni. Hal ini ditujukan agar peserta didik mendapat informasi terbaru tentang pendaftaran perguruan tinggi dan pengalaman dari para

alumni yang telah menempuh pendidikan di perguruan tingginya masing-masing.⁷⁴

Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu, sebagaimana yang dituturkan kepala madrasah, memerlukan kesadaran bersama untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, memerlukan komunikasi yang baik antar *stakeholder* secara vertikal maupun horizontal. Hal yang penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan mutu lagi adalah usaha maksimal dan kesabaran. Hal ini dituturkan dalam wawancara berikut:⁷⁵

“Pertama ya kita perlu kesadaran bersama untuk mencapai mutu yang diharapkan. Kedua, dalam prosesnya nanti kita perlu komunikasi yang baik, baik itu antar guru, dari pihak kantor dengan guru dan murid, dari atasan ke bawahan dan begitu pula sebaliknya. Memang untuk mencapai mutu yang diharapkan tidak semudah yang direncanakan tapi kalau kita berusaha terus dan sabar menunggu hasilnya dalam artian terus melakukan perbaikan terus menerus bukan diam saja, introspeksi apa yang kurang, saya rasa pasti akan ada hasil yang kita harapkan.”

Hal tersebut diperkuat oleh wakil madrasah bahwa dalam penjaminan mutu memerlukan kordinasi yang baik dan sosialisasi kegiatan sebelum dijalankan, sebagaimana berikut:⁷⁶

“Kita perlu koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Semisal untuk program

⁷⁴ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

⁷⁵ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

⁷⁶ Umar Salim, *wawancara*, ponorogo, 8 januari 2020.

kartu sakti tadi itu juga memerlukan sosialisasi pada guru juga karena guru yang menjadi pelaksananya nanti.”

Bapak Mahmud juga menuturkan bahwa pelaksanaan pemenuhan mutu memerlukan kesadaran tentang perbaikan mutu secara terus-menerus. Selain itu, dari madrasah juga penting untuk memfasilitasi seperti penggunaan media dan aplikasi yang efektif dan efisien yaitu seperti *WhatsApp* sebagai media informasi, pemanfaatan *google form* untuk perizinan kehadiran guru, khataman, ARD, dan pemanfaatan *Zipgrade* untuk penilaian ujian. Kemudian madrasah perlu mendorong dan memotivasi guru, menghargai pendapat dalam musyawarah, memperbaiki manajemen madrasah terkait kegiatan yang dilaksanakan seperti memperjelas penanggung jawab, tujuan, teknis, laporan hasil kegiatan, dan evaluasi.⁷⁷

Hal tersebut juga disampaikan kepala madrasah bahwa madrasah memerlukan rencana kerja dan anggaran yang jelas, evaluasi diri madrasah, sistem informasi yang baik dan beberapa kelengkapan pengelolaan yang wajib dipenuhi. Beliau juga menambahkan untuk mengefisiensikan biaya.⁷⁸

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan mutu akan dilaksanakan oleh penanggung jawab

⁷⁷ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

⁷⁸ Mudhofir Ihsan, *wawancara*, ponorogo, 11 Januari 2020.

kegiatan dengan membentuk tim pelaksana dan menetapkan teknis, jadwal kegiatan dan anggaran secara rinci. Pelaksanaan ini didukung oleh beberapa hal di antaranya profesionalisme pelaksana kegiatan dan beberapa kegiatan diluar madrasah yang memaksimalkan hasil yang diperoleh.

5. Evaluasi pemenuhan mutu MA Darul Huda

Terlaksananya pemenuhan mutu melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, menandakan mulainya tahap selanjutnya yaitu evaluasi. MA Darul Huda mengadakan evaluasi terkait hasil program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan secara rutin seperti pembelajaran, akhlak guru, akhlak murid pada setiap pertemuan bersama para guru di lingkungan MA Darul Huda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wakamad Kurikulum bahwa:⁷⁹

“Dari bapak kepala madrasah sendiri selalu mengadakan evaluasi setiap ada rapat bersama para guru baik itu tentang pembelajaran, kedisiplinan dan adab murid dan guru.”

Seperti penjelasan di atas, peneliti melakukan observasi saat rapat guru terkait evaluasi kegiatan liburan yang menunjukkan bahwa kepala madrasah tidak hanya membahas hasil laporan kegiatan liburan peserta didik tetapi juga

⁷⁹ Umar Salim, *wawancara*, ponorogo, 8 januari 2020.

mengevaluasi beberapa program lain seperti evaluasi program semester ganjil yang belum terpenuhi.⁸⁰

Selain itu, madrasah juga mengevaluasi kendala pada jalannya kegiatan dan solusi yang tepat guna perbaikan kegiatan tersebut kedepannya melalui rapat khusus. Rapat tersebut merupakan pertemuan resmi yang dihadiri oleh penanggung jawab kegiatan beserta tim dan pelaksana kegiatan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Umar selaku Wakamad Kurikulum bahwa:⁸¹

“Untuk program-program tertentu kita mengadakan rapat terbatas untuk evaluasi awal semisal untuk kegiatan pendukung kelas XII yaitu les malam hari atau kurikulum baru tentang program peminatan dan lain sebagainya. Dalam rapat itu para guru mengungkapkan berbagai kendala serta memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala yang terjadi.”

Selain melalui rapat resmi, evaluasi juga dapat tersampaikan melalui aplikasi media komunikasi seperti *WhatsApp*. Hal ini diperlukan ketika kegiatan menemui kendala dan memerlukan penyelesaian secara cepat. Selain itu, pelaksanaan evaluasi tidak hanya waktu kegiatan telah usai namun juga dapat dilaksanakan setelah bagian awal kegiatan terlaksana. Namun hal ini tidak dapat diterapkan pada tiap kegiatan tetapi hanya

⁸⁰ Situasi pertemuan resmi MA Darul Huda, *observasi*, Ponorogo, 21 Oktober 2019.

⁸¹ Umar Salim, *wawancara*, ponorogo, 8 januari 2020.

dalam kegiatan tertentu saja semisal dalam rangka penilaian semester. Hal tersebut disampaikan Bapak Umar sebagai berikut:⁸²

“Bapak kepala madrasah memberikan kebebasan para guru untuk berpendapat terkadang tidak hanya melalui acara rapat tetapi juga memanfaatkan via WA grup untuk mengetahui kendala dan memberikan solusi secara cepat seperti ketika pelaksanaan ujian. Khusus untuk pelaksanaan ujian kita selalu adakan evaluasi awal dihari pertama ujian setelah ujian mapel pertama. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan ujian terlaksana dengan lancar karena diakhir nanti untuk memproses penilaian hasil ujian kita tidak memiliki waktu banyak.”

Dalam rapat yang dikhususkan untuk evaluasi kegiatan, MA Darul Huda membebaskan guru dan tim kegiatan serta seluruh tenaga kependidikan untuk memberikan rekomendasi terkait kendala-kendala yang muncul dalam suatu kegiatan. Dari beberapa rekomendasi yang ada seluruh peserta evaluasi akan memilih rekomendasi yang terbaik dari beberapa rekomendasi yang ada untuk disepakati bersama. Hal ini disampaikan bapak Mahmud dalam wawancara berikut:⁸³

“Setelah laporan yang disampaikan oleh penanggung jawab, semisal tadi penanggung jawab program pengembangan bakat memberikan beberapa penjelasan terkait kendala, para peserta rapat akan memberikan

⁸² Umar Salim, *wawancara*, ponorogo, 8 januari 2020.

⁸³ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

beberapa saran yang dapat membantu menyelesaikan masalah tadi baik itu dari guru, anggota tim, ketua program jurusan maupun kepala madrasah dan para wakilnya, untuk kemudian diambil solusi terbaik.”

Hasil rapat evaluasi rapat tersebut akan didokumentasikan perbaikan kegiatan di tahun berikutnya. Selain itu, dokumen tersebut dapat membantu tim baru dalam merancang kegiatan kedepannya. Dokumentasi tersebut berisikan kegiatan yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan, kendala dan solusi. Hal ini juga disampaikan bapak Mahmud dalam wawancara, bahwa:⁸⁴

“Untuk dokumentasinya pasti ada cuman kita tidak mempublikasikannya karena pertimbangan beberapa hal sehingga cukup orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Karena untuk setingkat OSIS saja kita juga selalu mengajarkan adanya pelaporan tertulis yang nanti bisa dijadikan bahan ide pengembangan kegiatan berikutnya. Mungkin jika sewaktu-waktu penanggung jawab berganti atau kegiatannya ganti laporan tersebut akan sangat membantu. Bentuknya laporannya biasanya terdiri dari kegiatan yang terlaksana apa saja, tanggal berapa, kendala dan solusinya.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi pemenuhan mutu penanggung jawab kegiatan akan melaporkan hasil dan pelaksanaan kegiatan berikut kendala dan rekomendasi yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama

⁸⁴ M. Mahmud Romdhoni, *wawancara*, ponorogo, 23 Januari 2020.

tim pengembang madrasah terkait prioritas rekomendasi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu internal madrasah berbasis nilai-nilai pesantren di MA Darul Huda ditemukan beberapa temuan tentang penetapan standar mutu, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pemenuhan mutu, dan evaluasi mutu. Temuan-temuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan standar mutu MA Darul Huda

MA Darul Huda menyusun standar mutu dengan melakukan penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan dan visi misi madrasah serta kondisi madrasah. Penetapan standar ini melibatkan kepala madrasah, wakil-wakil madrasah, ketua program jurusan dan staf administrasi dan keuangan, komite madrasah, yayasan yang menjadi tim pengembang madrasah yang selanjutnya akan melaksanakan EDM, merumuskan rencana kerja madrasah dan evaluasi pemenuhan mutu.

Standar mutu ditetapkan melalui musyawarah untuk mendapatkan pertimbangan berbagai pihak karena standar ini juga menjadi bentuk respon madrasah terhadap kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat. Dengan mengacu pada

delapan SNP, standar yang ditetapkan oleh madrasah tersusun dalam delapan komponen dengan tiga visi madrasah yang mudah di ingat oleh seluruh pemangku kepentingan madrasah yaitu berilmu, beramal, dan bertakwa. Madrasah memberikan gambaran standar secara umum yaitu dengan nilai akademik yang telah mencapai kkm madrasah yang diimbangi dengan akhlak mulia.

Standar mutu yang ditetapkan MA Darul Huda di antaranya sebagai berikut:

a. Standar isi

Pada standar isi, madrasah melakukan pengembangan kurikulum dan pengembangan pribadi peserta didik yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada dalam SNP dan karakteristik budaya pesantren. Bentuk pengembangan kurikulum tersebut di antaranya adalah program lintas peminatan, adanya muatan lokal kaligrafi dan dan kajian kitab kuning dan mengadakan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat.

b. Standar proses

Standar proses di MA Darul Huda meliputi pengembangan silabus dan RPP yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan pesantren, menyediakan dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan ciri khas

pesantren, menyediakan dan mengembangkan proses pembelajaran aktif dan menyenangkan dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif, dan mengawasi serta mengendalikan proses pembelajaran dengan bekerja sama dengan berbagai pihak.

c. Standar kompetensi lulusan

MA Darul Huda mensyaratkan setiap lulusan memiliki SKL yang baik yaitu dengan memiliki nilai akademik yang baik dengan memeunhi nilai KKM madrasah dan lulus UN dan ujian lainnya. Selain itu, madrasah mensyaratkan lulusan memiliki prilaku dan akhlak yang baik sebagai lulusan madrasah dan pesantren dengan menunjukkan prilaku yang sesuai nilai-nilai pesantren dan masyarakat pada umumnya. Untuk melengkapi sisi akademik dan akhlak, madrasah membekali lulusan di antaranya dengan ibadah-ibadah amaliah agar mandiri dan berguna bagi masyarakat dilingkungannya.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

MA Darul Huda menetapkan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti tenaga pendidik dan kependidikan harus berpendidikan S-1. Madrasah juga memiliki persyaratan khusus terhadap pendidik dan tenaga pendidik untuk dapat membaca dan menulis al-Qur'an serta taat beribadah agar sesuai dengan nilai-nilai madrasah

dan pesantren. Madrasah juga mengembangkan potensi pendidik dan tenaga pendidik melalui workshop agar kinerja semakin baik. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari lingkungan madrasah maupun dari luar madrasah.

e. Standar sarana dan prasarana

Dalam hal ini, madrasah menetapkan standar untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah dan melakukan pemeliharaan dengan baik terhadap kondisi sarana dan prasaran agar kegiatan pembelajaran kondusif dan nyaman. Hal ini dilakukan dengan berusaha menyediakan fasilitas yang belum ada, memperbaiki fasilitas yang rusak, melakukan pengecekan secara berkala.

f. Standar pengelolaan

MA Darul Huda menetapkan standar pengelolaan dalam bentuk pelengkapan seluruh data penting yang wajib dimiliki madrasah seperti visi misi, EDM, RKM, RKTm dan lainnya serta mengadakan sosialisasi. Madrasah melibatkan komite madrasah dan masyarakat dalam penyusunan data madrasah dan melibatkannya dalam kegiatan akademik dan nonakademik. Dalam keterlibatan masyarakat, madrasah membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak

dalam penyelenggaraan pendidikan. Komunikasi yang baik harus didukung dengan informasi yang handal dan valid, maka madrasah mengelola dan menyediakan informasi yang akurat cepat dan mudah di akses dengan memanfaatkan beberapa aplikasi media sosial.

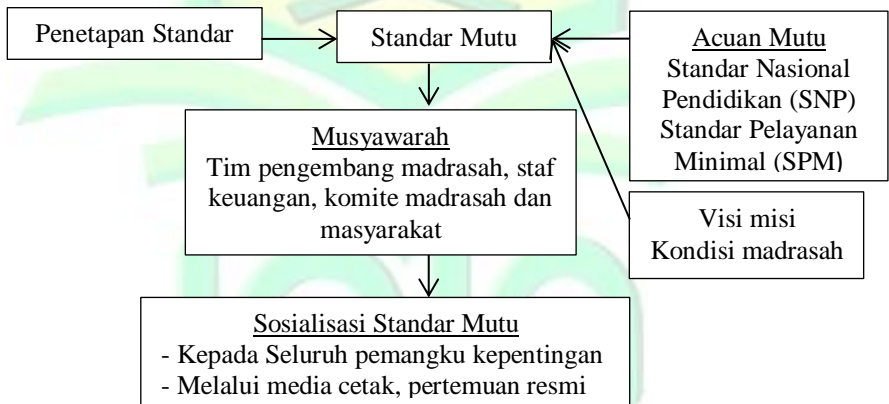
g. Standar pembiayaan

Standar pembiayaan madrasah ditetapkan dalam bentuk perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui pelaporan keuangan. Madrasah mendapatkan sumbangan dari berbagai pihak dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihak seperti alumni, yayasan, komite madrasah, orang tua murid, pemerintah dan mempermudah akses penyaluran dana dari peserta didik seperti melalui virtual account. Madrasah juga mempermudah pembiayaan pendidikan dengan memberikan kelonggaran bagi siswa tidak mampu dengan membawa persetujuan pengasuh. Madrasah juga menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan dalam sistem bisyaroh yang diartikan sebagai tanda jasa bukan gaji.

h. Standar penilaian

Standar penilaian di MA Darul Huda menggunakan empat aspek penilaian dari penilaian rapot, penilaian ibadah amaliah

dan praktek bahasa, karya tulis ilmiah, dan penilaian perilaku melalui sistem penskoran untuk setiap pelanggaran. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai jenis penilaian yang meliputi hasil ujian, ketrampilan, praktek dan portofolio. Hasil nilai dilaporkan kepada orang tua murid dengan cepat tepat dan akurat melalui media yang mudah dijangkau seperti *WhatsApp*. Madrasah mensosialisasikan standar mutu dalam bentuk penyampaian visi misi melalui pertemuan resmi dan media cetak guna membantu menunjukkan arah penjaminan mutu dalam menghasilkan output yang berprestasi dari sisi akademis dan akhlak yang baik.

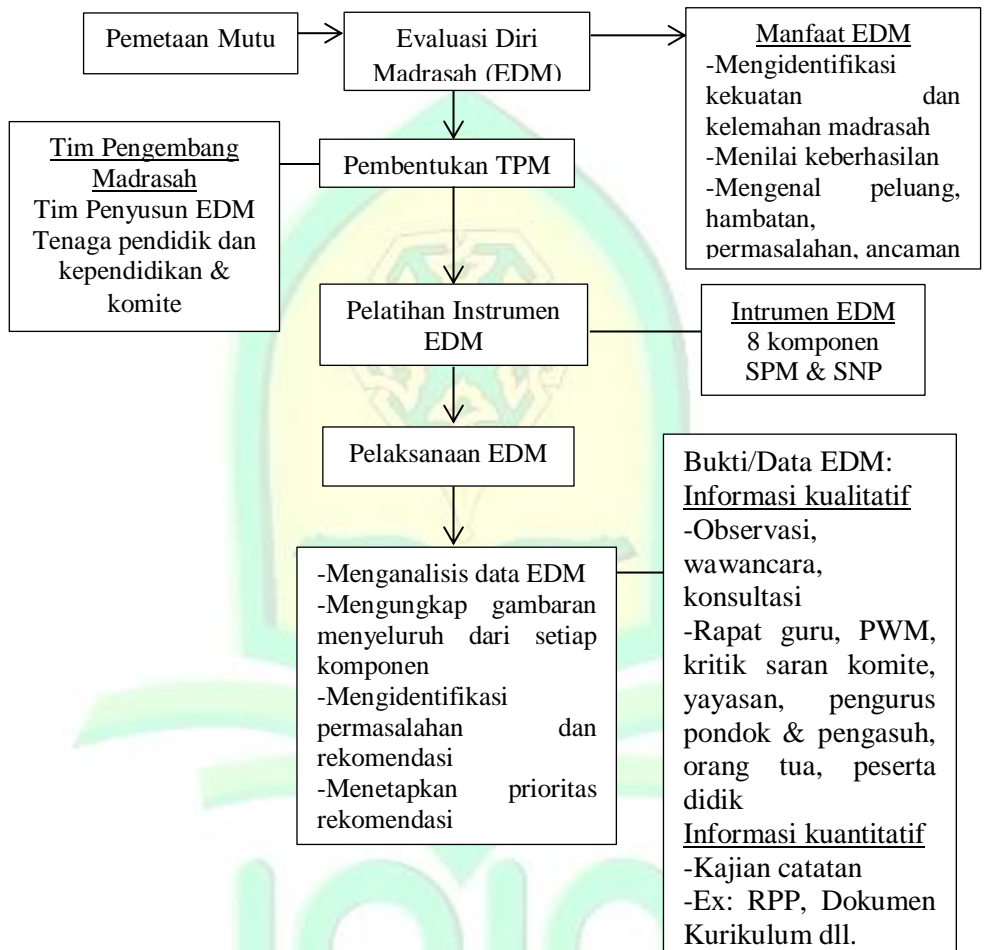


P O N O R O G O

2. Pemetaan mutu MA Darul Huda

Pemetaan mutu dalam rangka penjaminan mutu dapat disimpulkan bahwa pemetaan mutu diawali dengan Evaluasi Diri Madrasah dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta rekomendasinya mengetahui potensi madrasah, menjadi pedoman operasional, menjadi tolak ukur keberhasilan dan ketidak keberhasilan madrasah, dan untuk mengetahui permasalahan, hambatan, peluang dan ancaman.

EDM disusun berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Pengembang Madrasah dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan madrasah dan pemangku kepentingan madrasah seperti komite dan orang tua wali murid. Informasi diperoleh melalui pertemuan resmi seperti rapat guru, PWM, melalui kritik dan saran komite sekolah, yayasan, pengurus pondok dan pengasuh, serta bertanya langsung pada peserta didik. Proses EDM dimulai dari pembentukan TPM, pelatihan instrumen, pelaksanaan EDM melalui rapat TPM yang membahas kelebihan dan kekurangan serta rekomendasinya dengan instrumen yang telah ditentukan melakukan pemrioritasan. Hasilnya akan digunakan penyusunan dan pengembangan RKM dan sebagai validasi internal dan eksternal. Kemudian diserahkan ke kantor Kemenag untuk dianalisis menggunakan EMIS.



3. Perencanaan pemenuhan mutu MA Darul Huda

Madrasah menyusun rencana pemenuhan mutu dalam bentuk RKM dan RKTm. RKM merupakan rencana kerja yang digunakan untuk empat tahun ke depan. Sedangkan RKTm

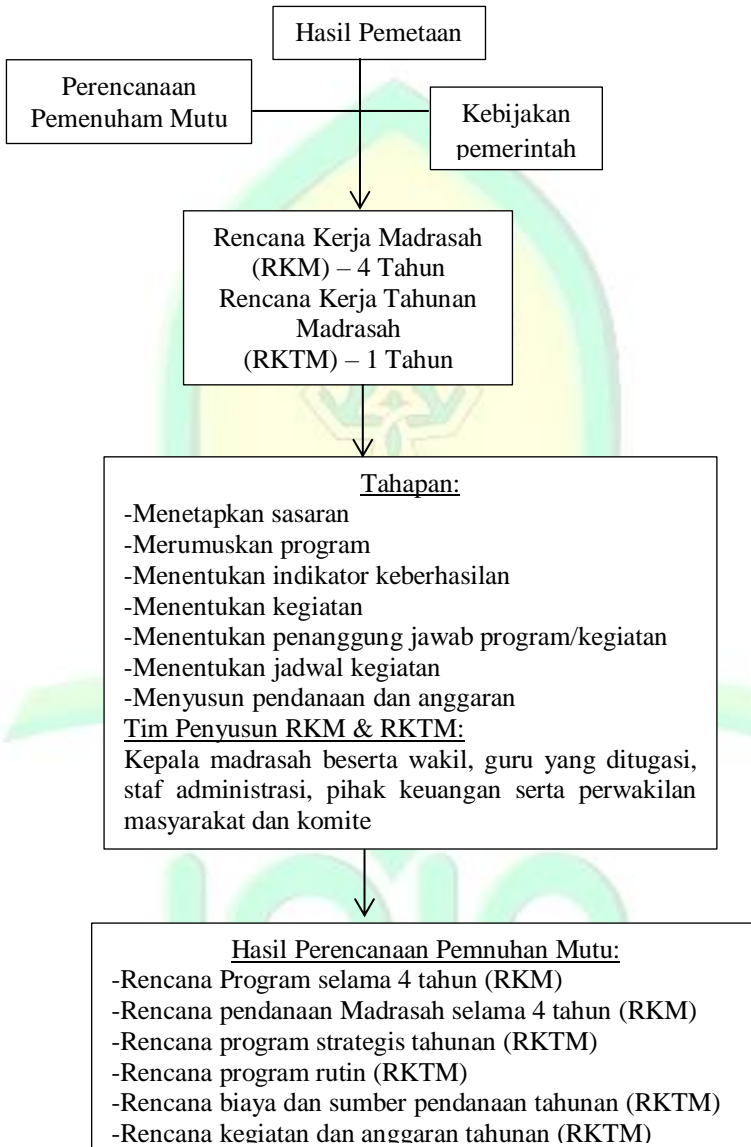
merupakan rencana kerja yang disusun untuk 1 tahun ke depan. RKM dan RKTM disusun untuk dijadikan rambu-rambu dalam pengelolaan program, implementasi, *monitoring* dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur, sebagai dorongan dalam peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan, membantu mengatur keuangan madrasah, untuk merespon tuntutan partisipasi masyarakat, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. RKM dan RKTM dimanfaatkan sebagai acuan untuk mencapai target mutu, sebagai panduan pemanfaatan anggaran, dan tolak ukur bagi keberhasilan implementasi program dan kegiatan.

RKM disusun berdasarkan hasil dari identifikasi dan analisis kondisi madrasah, harapan pemangku kepentingan, dan tantangan madrasah. Dalam penyusunannya memerlukan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan demokratis. Rencana kerja madrasah bersifat partisipatif, transparan, multi sumber, dan komprehensif. Rencana kerja madrasah disusun melalui tim-tim yang terdiri dari para guru, staf administrasi, pihak keuangan serta perwakilan masyarakat dan komite. Tim akan dibagi menjadi delapan sesuai SNP yang akan merumuskan rencana kerja sesuai standar yang ditentukan pada tim tersebut. Hasilnya akan dibahas dalam rapat untuk disesuaikan dengan

hasil pemetaan mutu dan SNP kemudian disepakati bersama. Tahap perumusan rencana kerja meliputi merumuskan program madrasah dan menyusun jadwal kegiatan. Dalam perumusan program madrasah meliputi empat langkah yang meliputi menetapkan sasaran, menentukan indikator keberhasilan, menentukan kegiatan dan menetapkan penanggung jawab.

RKTM disusun berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Madrasah pada tahun sebelumnya, pelaksanaan rencana program dan kegiatan RKM, dan disesuaikan dengan Permendiknas. Tahap perumusan meliputi perumuskan rencana strategis Madrasah yang dilakukan melalui enam langkah yaitu menetapkan sasaran, merumuskan program, menentukan indikator keberhasilan, dan menentukan kegiatan, menetapkan penanggungjawab dan menyusun jadwal kegiatan. Kemudian merumuskan rencana rutin madrasah dengan langkah yang sama.

Setelah selesai menyusun rencana kerja, madrasah akan menyusun anggaran untuk tiap program dan kegiatanyang disesuaikan dengan sumber dana. Keuangan madrasah dikelola madrasah dan keuangan yayasan sehingga terkadang membutuhkan persetujuan pengasuh. Rumusan rencana anggaran madrasah memuat rencana biaya dan sumber pendanaan serta rencana kegiatan dan anggaran kegiatan.



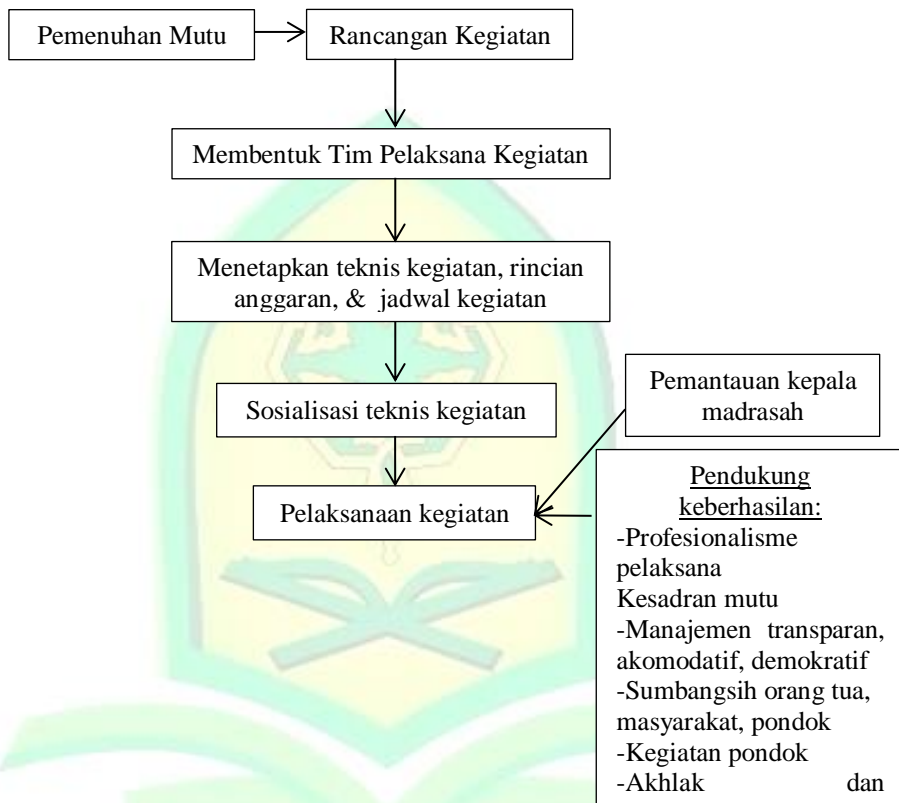
4. Pemenuhan mutu MA Darul Huda

Program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam RKM dan RKTMM akan menjadi acuan pelaksanaan pemenuhan mutu namun terkadang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya karena keterbatasan waktu dan tempat atau kondisi madrasah yang lain. Kegiatan akan dirancang oleh penanggung jawab dan tim yang sudah ditunjuk dalam rapat yang membahas konsep kegiatan, teknis kegiatan, bidang-bidang kegiatan dan penanggung jawabnya. Kegiatan yang dilaksanakan akan dipantau oleh kepala madrasah dan sebelumnya akan ada sosialisasi tentang kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Kegiatan yang terlaksana akan dilaporkan terkait pelaksanaan kegiatan, hasil, kendala dan rekomendasinya kepada madrasah yaitu kepala madrasah, guru dan seluruh pemangku kepentingan lembaga melalui pertemuan resmi seperti rapat guru, PWM dan rapat internal pondok. Pelaksanaan kegiatan memerlukan profesionalisme para pelaku dan pelaksana kegiatan, manajemen madrasah yang transparan, akomodatif dan demokratis serta keterlibatan dan dukungan orangtua murid, masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh agama berupa sumbangan dana, tenaga dan pikiran. Selain itu,

memerlukan dukungan dari pemerintah terkait kebijakan pendidikan. Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu, madrasah memerlukan beberapa kegiatan penunjang yang didukung oleh pengurus pondok dan pengasuh.

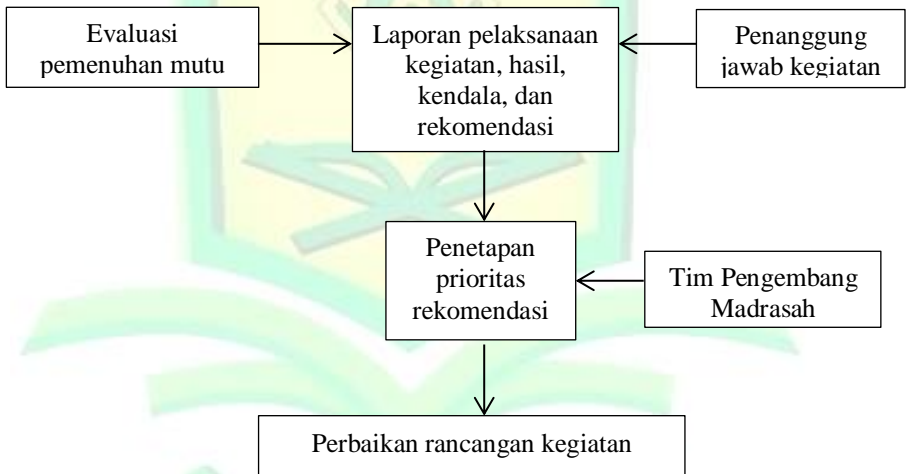
Dalam pemenuhan mutu madrasah berusaha meningkatkan akhlak terutama kedisiplinan melalui program penskoran dan memaksimalkan peran guru sebagai teladan dan motivator bagi peserta didik. Selain itu, madrasah juga berupaya meningkatkan kinerja guru dengan memotivasi guru, menyadarkan tugas dan tanggung jawabnya, memfasilitasi guru dengan mengadakan workshop serta memOSISikan guru sesuai keahlian yang dimiliki. Madrasah juga melakukan tes bagi peserta didik baru untuk mengetahui kemampuan awal. Madrasah akan membangun kesadaran mutu dan komunikasi yang baik serta usaha yang maksimal dan kesabaran guna memperlancar pemenuhan mutu. Madrasah juga terus memperbaiki manajemennya dengan menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang jelas, evaluasi diri madrasah, sistem informasi yang baik dan beberapa kelengkapan pengelolaan yang wajib dipenuhi secara efektif dan efisien.



5. Evaluasi pemenuhan mutu MA Darul Huda

Setelah pelaksanaan pemenuhan mutu selesai, madrasah selalu melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk kegiatan rutin melalui pertemuan resmi seperti rapat guru. Evaluasi tersebut terkait hasil kegiatan, kendala kegiatan dan solusi atau rekomendasi yang tepat. Evaluasi diadakan dalam pertemuan resmi yang dihadiri oleh penanggung jawab dan tim dan pelaksana kegiatan seperti kegiatan pengembangan bakat.

Madrasah juga memanfaatkan media sosial untuk evaluasi secara cepat dan efektif. Evaluasi dilakukan tidak hanya diakhir namun juga pada setiap tahap kegiatan tersebut untuk beberapa kegiatan tertentu. Rekomendasi yang diambil berdasarkan hasil beberapa usulan guru dan dipilih yang terbaik. Evaluasi digunakan untuk memperbaiki tahap kegiatan atau kegiatan selanjutnya.



BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

MADRASAH BERBASIS NILAI-NILAI PESANTREN DI

MA DARUL HUDA MAYAK

A. Penetapan standar mutu madrasah berbasis nilai-nilai pesantren

Dari uraian pada bab sebelumnya, diketahui MA Darul Huda menyusun standar mutu dengan melakukan penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan dan visi misi madrasah serta kondisi madrasah. Menurut Ridlwan A. Sani et.al. dalam buku sistem penjaminan mutu internal menjelaskan bahwa salah satu prinsip sistem penjaminan mutu adalah terstandar yaitu dengan menggunakan acuan mutu minimal SNP dan dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP.¹ Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di MA Darul Huda ini memiliki prinsip terstandar.

Ketika madrasah sudah menetapkan untuk menggunakan suatu acuan mutu madrasah, maka madrasah telah memiliki

¹ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*(Tangerang: Tsmart Printing, 2018), 31.

suatu idealism tertentu. Idealism merupakan salah satu hal yang diarahkan dalam kultur pesantren.² Jika para pemangku kepentingan madrasah memiliki sesuatu idealis tertentu maka penetapan standar mutu madrasah akan sangat dipengaruhi oleh idealism mereka. Dalam hal ini MA Darul Huda menetapkan kemampuan akademis dan akhlakul karimah sebagai standar mutlak madrasah yang mengacu pada SNP. Hal ini menunjukkan nilai tanggung jawab madrasah terhadap masa depan peserta didik.

Madrasah Aliyah Darul Huda dalam menetapkan standar juga disesuaikan dengan visi misi dan kondisi madrasah. Madrasah dapat melakukan penyesuaian dengan hal tersebut menunjukkan bahwa madrasah dapat mengembangkan dan mengimplementasikan SNP yang telah menjadi acuan mutunya. Dalam penetapan standar, satuan pendidikan harus menyesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan tersebut. Selain itu, disesuaikan pula dengan kondisi satuan pendidikan.³ Hal ini sesuai dengan prinsip penjaminan mutu mandiri dan partisipatif.⁴

² Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 242.

³ Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 55

⁴ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar Dan Menengah, <Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf>, 27

Mandiri dan partisipatif berarti mampu mengembangkan dan mengimplemntasikan dengan membangun partisi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Prinsip tersebut juga sesuai dengan nilai yang dikembangkan oleh pesantren yaitu nilai kemandirian. Pada mekanisme kehidupan pesantren, kemandirian tercermin saat santri dibiasakan untuk dapat mengatur kebutuhan pribadi secara mandiri seperti mengatur keuangan, mengatur waktu dan lainnya.⁵ Nilai kemandirian ini merasuk pada diri *stakeholder* madrasah dengan ditunjukkannya kemampuan madrasah mengembangkan standar sesuai visi dan misi serta kondisi madrasah. Kemandirian ini secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan yang diambil madrasah dalam penetapan standar. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap visi misi dan kondisi madrasah menunjukkan sikap toleran madrasah yang mencerminkan nilai sosial yang dimiliki oleh pemangku kepentingan.

Dalam beberapa standar yang ditetapkan oleh madrasah yang disebutkan secara rinci dalam rencana kerjanya mengandung beberapa ciri khas pesantren, di antaranya sebagai berikut:

⁵ Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 63-74

1. Standar isi

Dalam standar isi, MA Darul Huda melakukan pengembangan kurikulum dengan mengadakan program lintas peminatan yang merupakan kebijakan pemerintah sehingga peserta didik tidak hanya menerima mata pelajaran sesuai dengan program jurusan yang dipilih tetapi juga mendapat mata pelajaran tambahan pada program jurusan lain sehingga peserta didik tidak hanya menguasai satu bidang keilmuan. Hal tersebut menunjukkan nilai keilmuan dan kemadirian yang dicerminkan madrasah karena menyadari tentang pentingnya menguasai berbagai bidang keilmuan yang selama ini diajarkan di pesantren dan telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah.

Madrasah juga mengadakan muatan lokal kaligrafi dan kajian kitab kuning sebagai yang menjadi ciri khas pembelajaran yang ada di pesantren pada umumnya. Selain itu, madrasah mengadakan beberapa program ekstrakurikuler dan pengembangan bakat yang menunjukkan nilai tanggung jawab madrasah terhadap kebutuhan peserta didik dan nilai tanggung jawab, nilai moral dan nilai sosial yang berusaha ditanamkan madrasah dalam program tersebut untuk pengembangan diri peserta didik itu sendiri karena program tersebut sepenuhnya dikelola oleh peserta didik dengan bimbingan dari madrasah.

Hal ini selaras dengan tujuan pesantren yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang berupa pribadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bermanfaat bagi sesama dan mengabdikan pada masyarakat.⁶

2. Standar proses

Standar proses di MA Darul Huda yang berkaitan dengan pengembangan silabus dan RPP yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan pesantren menunjukkan nilai kemandirian madrasah dalam melakukan mengelola perencanaan pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi lingkungan. Pengembangan bahan ajar yang sarat dengan ciri khas pesantren seperti penggunaan literatur arab pada bahan ajar tertentu mencerminkan nilai moralitas pesantren yaitu melestarikan hal lama yang baik. Pengembangan tersebut selaras dengan makna pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem non klasikal dimana ada seorang kyai yang mengajarkan ilmu agama islam terhadap santrinya yang didasarkan pada kitab-kitab berbahasa Arab yang merupakan karya para ulama arab di abad pertengahan.⁷

⁶ Ali Idrus, *Manajemen Pendidikan Global: Visi, Aksi dan Adaptasi* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) 96-98.

⁷ Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 242.

Pengembangan proses pembelajaran aktif dan menyenangkan dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif ini mencerminkan nilai moralitas pesantren yaitu mengadaptasikan hal-hal baru yang lebih baik. Madrasah melakukan pengawasan dan mengendalikan proses pembelajaran secara berkala dengan bekerja sama dengan berbagai pihak menunjukkan nilai moralitas berupa keistiqomahan dan kebersamaan.

3. Standar kompetensi lulusan

Di antara beberapa standar yang harus dicapai lulusan MA Darul Huda adalah memiliki nilai akademik yang baik dengan memenuhi nilai KKM madrasah dan lulus UN dan ujian lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa madrasah memperhatikan nilai keilmuan yang ada dalam diri peserta didik. Madrasah mensyaratkan lulusan memiliki perilaku dan akhlak yang baik sebagai lulusan madrasah dan pesantren dengan menunjukkan perilaku yang sesuai nilai-nilai pesantren dan masyarakat pada umumnya. Menunjukkan nilai moralitas yang ingin dibangun madrasah. Hal ini sejalan dengan fungsi pesantren bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya moral keagamaan

untuk diterapkan dalam keseharian.⁸ Madrasah yang membekali lulusan di antaranya dengan ibadah-ibadah amaliah agar mandiri dan berguna bagi masyarakat dilingkungannya menjukkkan nilai sosial karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

MA Darul Huda yang menetapkan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti tenaga pendidik dan kependidikan harus berpendidikan S-1. menunjukkan adanya penyesuaian dengan kebijakan pemerintah yang mencerminkan nilai kemandirian madrasah. Persyaratan khusus terhadap pendidik dan tenaga pendidik yang ditetapkan madrasah yaitu dapat membaca dan menulis al-Qur'an serta taat beribadah agar sesuai dengan nilai-nilai madrasah dan pesantren. Menunjukkan nilai tanggung jawab madrasah terhadap pemilihan guru karena di pesantren pemilihan guru merupakan hal yang penting dalam keberhasilan belajar peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan usaha pesantren dalam menjaga lingkungan santri tetap kondusif dan cara pandang religiusitas karena lingkungan sosial telah mengalami banyak perubahan terutama dikota

⁸ Ali Idrus, *Manajemen Pendidikan Global: Visi, Aksi dan Adaptasi* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) 96-98.

besar.⁹ Madrasah yang melakukan pengembangan potensi pendidik dan tenaga pendidik melalui workshop menunjukkan nilai moralitas madrasah untuk merubah diri semakin baik.

5. Standar sarana dan prasarana

Standar yang ditetapkan pada komponen ini adalah menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah dan melakukan pemeliharaan dengan baik terhadap kondisi sarana dan prasarana agar kegiatan pembelajaran kondusif dan nyaman. Hal ini dilakukan dengan berusaha menyediakan fasilitas yang belum ada, memperbaiki fasilitas yang rusak, melakukan pengecekan secara berkala. Hal tersebut mengisyaratkan nilai tanggung jawab madrasah dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana dengan seadanya namun tercukupi menunjukkan nilai kesederhanaan yang diajarkan dipesantren untuk terbiasa menggunakan dan menjaga fasilitas bersama dan mengantri.¹⁰

6. Standar pengelolaan

MA Darul Huda menetapkan standar pengelolaan dalam bentuk pelengkapan seluruh data penting yang wajib dimiliki

⁹ Imam Syafe'I, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1 (2017) 61-82.

¹⁰ Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kepribadian Muslim di Pesantren* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 63-74.

madrasah seperti seperti visi misi, EDM, RKM, RKTM dan lainnya serta mengadakan sosialisasi. Madrasah melibatkan komite madrasah dan masyarakat dalam penyusunan data madrasah dan melibatkannya dalam kegiatan akademik dan nonakademik. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan madrasah ini menunjukkan nilai kebersamaan dan nilai demokrasi. Hal ini mengisyaratkan pola kehidupan pesantren yang menekankan demokrasi dalam pemecahan masalah.¹¹

Dalam keterlibatan masyarakat, madrasah membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan. Komunikasi yang baik harus didukung dengan informasi yang handal dan valid, maka madrasah mengelola dan menyediakan informasi yang akurat cepat dan mudah di akses dengan memanfaatkan beberapa aplikasi media sosial. Adanya komunikasi yang baik ini menunjukkan ciri khas pesantren yang lebih mengutamakan social effect dibandingkan civil effects.¹²

7. Standar penilaian

Standar penilaian di MA Darul Huda menggunakan empat aspek penilaian dari penilaian rapot, penilaian ibadah amaliah dan praktek bahasa, karya tulis ilmiah, dan penilain prilaku

¹¹ Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, 244.

¹² Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), 192.

melalui sistem penskoran untuk setiap pelanggaran. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai jenis penilaian yang meliputi hasil ujian, ketrampilan, praktek dan portofolio. Penilaian dari berbagai aspek dan penilaian yang diantaranya dari aspek keagamaan mengandung ciri khas pesantren yang berupa adanya penghayatan mental spiritual keagamaan dan tafaqquh fi ad-din dalam sistem penilaian ini.¹³ Hal ini mencerminkan nilai ketuhanan. Hasil nilai dilaporkan kepada orang tua murid dengan cepat tepat dan akurat melalui media yang mudah dijangkau seperti *WhatsApp*. Standar ini merupakan bentuk nilai tanggung jawab dan nilai kejujuran madrasah terhadap orang tua murid.

8. Standar pembiayaan

Madrasah menetapkan perencanaan anggaran dengan mengacu kebijakan pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui pelaporan keuangan. Hal ini menunjuk nilai tanggungjawab madrasah atas seluruh pengelolaan dan yang ada.

Madrasah menambah sumbangan dari berbagai pihak dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihak seperti alumni, yayasan, komite madrasah, orang tua murid,

¹³ Ibid, 192.

pemerintah dan mempermudah akses penyaluran dana dari peserta didik seperti melalui virtual account. Adanya dukungan dan keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan nilai kebersamaan dan nilai sosial yang ditanamkan madrasah pada seluruh elemen. Madrasah juga mempermudah pembiayaan pendidikan dengan memberikan kelonggaran bagi siswa tidak mampu dengan membawa persetujuan pengasuh.

Madrasah juga menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan dalam sistem bisyaroh yang diartikan sebagai tanda jasa bukan gaji. Toleransi biaya bagi siswa tidak mamupu dan memberikan tanda jasa dalam sistem bisyaroh menunjukkan ciri khas pesantren tentang saling membantu dan bentuk memuliakan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Hal sejalan dengan kekhasan pesantren menurut Mahmud Arif bahwa di antara kekhasan pesantren adalah dilestarikannya nilai-nilai keagamaan seperti kesederhanaan, keikhlasan, ukhuwah, kebaktian, dan keswadayaan serta lebih mengutamakan social effect dibandingkan civil effects¹⁴

Setelah menetapkan standar, madrasah mensosialisasikan visi misi madrasah melalui pertemuan resmi dan media cetak. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan mutu dalam

¹⁴ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008), 192.

menghasilkan output yang berprestasi dari sisi akademis dan akhlak yang baik. Adanya sosialisasi setelah menetapkan standar menunjukkan bahwa MA Darul Huda memiliki prinsip sistematis dan berkelanjutan. Sebagaimana dijelaskan pada bab II bahwa prinsip penjaminan mutu di antaranya adalah melaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan.¹⁵

Selain itu, adanya sosialisasi juga menunjukkan bahwa standar yang telah ditetapkan oleh madrasah bisa diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan di madrasah. Hal ini sesuai dengan prinsip penjaminan mutu yang transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel berarti seluruh aktivitas dalam SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.¹⁶ Hal ini menunjukkan keterbukaan dan kejujuran madrasah dalam memberikan arah tujuan. Keterbukaan dan kejujuran merupakan di antara nilai moral yang selalu dianjurkan di pesantren. Nilai moralitas sendiri bersumber dari nilai ketuhanan yang akan mengarahkan peserta didik berperilaku baik.¹⁷

¹⁵ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 31.

¹⁶ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 31.

¹⁷ Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kepribadian Muslim di Pesantren* 63-74.

Sosialisasi yang dilakukan di MA Darul Huda ini dimaksudkan untuk memberi kesadaran terhadap pihak-pihak terkait seperti guru dan wali murid. Dengan memberi kesadaran artinya pihak-pihak tersebut dapat memberi dukungan terhadap upaya madrasah dalam peningkatan mutunya. Penetapan standar sendiri memerlukan sebuah komitmen dan dukungan sumber daya internal serta bantuan berbagai pihak yang dilibatkan dalam meningkatkan mutu.¹⁸

Sosialisasi ini dikemas dalam pertemuan resmi seperti rapat guru dan pertemuan wali murid serta melalui media cetak. Sosialisasi tersebut menunjukkan upaya madrasah dalam membangun keakraban antara madrasah dengan pihak internal dan eksternalnya. Hal ini menyiratkan nilai keakraban dan kebersamaan yang ditanamkan di pondok pesantren yang sekaligus menjadi ciri khasnya. Keakraban tersebut ditunjukkan dengan adanya hubungan personal antara kyai dan santri dalam situasi yang kondusif.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan standar, MA Darul Huda menggunakan SNP sebagai acuan mutu dengan melakukan penyesuaian terhadap

¹⁸ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 55.

¹⁹ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008) 167-168.

visi misi dan kondisi madrasah. Pada tahap ini, nilai-nilai pesantren yang muncul di antaranya adalah nilai kemandirian yang ditunjukkan dengan memiliki idealism acuan mutu tertentu, nilai tanggung jawab yang ditunjukkan dengan kemampuan mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik, nilai moralitas yang ditunjukkan dengan keterbukaan dan kejujuran, nilai sosial yang ditunjukkan dengan toleran, nilai keakraban dan kebersamaan yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk meraih tujuan secara bersama-sama.

B. Pemetaan mutu madrasah berbasis nilai-nilai pesantren

Pemetaan mutu yang dilakukan MA Darul Huda diawali dengan Evaluasi Diri Madrasah. Menurut Ridwan A.S. et.al., dalam pemetaan mutu satuan pendidikan harus melakukan kegiatan evaluasi diri setelah menetapkan standar guna melihat sejauh mana standar tersebut tercapai.²⁰ Dalam hal ini, madrasah mencerminkan nilai moral yang dianutnya yaitu melestarikan metode lama yang baik dan mengambil baru yang lebih baik. Dengan adanya evaluasi, madrasah akan mengetahui kelebihan yang dapat madrasah kembangkan dan

²⁰ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 33.

menemukan solusi untuk menutup kekurangan dengan hal yang baru yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, EDM yang dilaksanakan oleh madrasah memiliki tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta rekomendasinya mengetahui potensi madrasah, menjadi pedoman operasional, menjadi tolak ukur keberhasilan dan ketidak berhasilan madrasah, dan untuk mengetahui permasalahan, hambatan, peluang dan ancaman. EDS sendiri merupakan bagian penting dalam penjaminan mutu dalam merencanakan perbaikan sekolah.²¹

Hal tersebut mengungkapkan bahwa madrasah berusaha menata ulang perencanaannya dengan mengadakan EDM sebagai tolak ukur atas pencapaiannya pada idealism tertentu. Dengan adanya usaha tersebut menyiratkan kepercayaan diri madrasah bahwa mereka siap menyongsong masa depan. Kepercayaan diri ini merupakan sebuah budaya yang dilestarikan di pesantren yang menjadi nilai moral bagi para santri.

EDM di MA Darul Huda disusun berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Pengembang Madrasah dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan madrasah dan pemangku kepentingan madrasah seperti komite dan orang tua wali murid.

²¹ Ibid, 101-102.

Pelaksanaan EDS seharusnya dilakukan dengan jujur dan akurat dengan melibat berbagai pihak yaitu pengawas sekolah, orang tua peserta didik, alumni, unsur Pemda, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri dan pihak lain yang penting.²² Keterlibatan berbagai pihak dalam EDM menunjukkan nilai kebersamaan yang telah dibangun oleh MA Darul Huda.

Nilai kebersamaan yang dibangun ini dilengkapi dengan nilai demokrasi. Nilai demokrasi ditunjukkan pada cara yang digunakan madrasah untuk memperoleh informasi. Informasi dalam EDM MA Darul Huda diperoleh melalui pertemuan resmi seperti rapat guru, PWM, melalui kritik dan saran komite sekolah, yayasan, pengurus pondok dan pengasuh, serta bertanya langsung pada peserta didik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa madrasah menggunakan beberapa pendekatan dalam memperoleh informasi atau data. Pendekatan yang dapat digunakan dalam EDS dapat berupa wawancara, diskusi kelompok dan refleksi.²³ Dalam pengumpulan data, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi pada seluruh responden tentang kegiatan

²² Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 90.

²³ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 101-103.

pengumpulan data, menyebarkan seluruh instrumen pada seluruh responden dan kemudian mengumpulkan hasil responden. EDS dapat diperdalam dengan melakukan analisis dan memperkaya data EDS secara kualitatif yang melibatkan *stakeholder* yang mengetahui kondisi sekolah.²⁴ Dalam pemetaan mutu satuan pendidikan dapat melakukan lima langkah kunci yaitu pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisa data, penentuan akar masalah dan penyusunan rekomendasi.²⁵

Proses EDM di MA Darul Huda dimulai dari pembentukan TPM, pelatihan instrumen, pelaksanaan EDM melalui rapat TPM yang membahas kelebihan dan kekurangan serta rekomendasinya dengan instrumen yang telah ditentukan serta melakukan pemrioritasan terhadap rekomendasi tersebut. EDS memerlukan instrumen yang didasarkan pada standar nasional dan dikembangkan sesuai kondisi masing-masing sekolah.²⁶ Instrumen ini dapat berupa angket, quisioner dan lembar observasi yang dikembangkan berdasarkan indikator ketercapaian SNP. Dari setiap indikator disusun beberapa pertanyaan yang akan direspon oleh kepala sekolah, guru,

²⁴ Ibid, 90.

²⁵ Ibid, 103.

²⁶ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 93.

peserta didik dan pengawas sebagai responden terkait keberhasilan program sekolah dan kebijakan penjaminan mutu. Hal ini merupakan langkah EDS dalam pemetaan mutu.²⁷

Dalam proses EDM di atas menyiratkan nilai kebersamaan dengan adanya pembentukan TPM. Selain itu, adanya pelatihan sebelum melakukan EDM juga menunjukkan nilai keilmuan. Hal ini merupakan identitas kultural pesantren karena kehidupan pesantren adalah proses pendidikan atau pencarian ilmu.²⁸ Pesantren memiliki keyakinan bahwa amal tanpa ilmu merupakan hal yang sia-sia. Jika pelaksanaan EDM dengan instrumen yang ada tanpa adanya pemahaman akan instrumen tersebut maka hal tersebut juga tidak akan menuai hasil yang diharapkan. Selain itu, adanya pemrioritasan rekomendasi merupakan hal yang sesuai dengan nilai yang diterapkan pesantren yaitu mengambil hal baru yang lebih baik sebagai bentuk nilai moralitas.

Hasilnya akan digunakan penyusunan dan pengembangan RKM dan sebagai validasi internal dan eksternal. Kemudian diserahkan ke kantor Kemenag untuk dianalisis menggunakan EMIS. Pemetaan mutu sendiri secara nasional dilakukan dengan batuan aplikasi yang didasarkan pada SNP. Data yang

²⁷ Ibid, 101-102.

²⁸ Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kepribadian Muslim di Pesantren*, 63-74.

telah diperoleh dapat dijadikan data evaluasi diri sekolah (EDS) untuk pemetaan mutu.²⁹ Adanya usaha untuk memvalidasi dari MA Darul Huda menunjukkan kejujuran dan keakuratan madrasah dalam melakukan penjaminan mutu sebagai wujud integritas madrasah. Integritas dalam penjaminan mutu yaitu menggunakan data dan informasi yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada.³⁰ Hal tersebut juga mencerminkan nilai moral madrasah berupa kejujuran.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan MA Darul Huda memberlakukan pemetaan mutu dengan EDS. Data EDM diperoleh dari seluruh komponen madrasah dari peserta didik sampai yayasan. Proses EDM di MA Darul Huda dimulai dari pembentukan TPM, pelatihan instrumen, pelaksanaan EDM terkait kelebihan dan kekurangan serta rekomendasinya dengan instrumen yang telah ditentukan serta melakukan pemrioritasan terhadap rekomendasi tersebut. Nilai pesantren yang terkandung pada tahap ini adalah nilai moralitas, nilai kebersamaan, nilai keilmuan dan nilai demokrasi. Nilai moralitas pada tahap ini lebih banyak muncul dengan adanya cara-cara baru madrasah dalam memperbaiki mutu,

²⁹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 90.

³⁰ Ibid, 31.

kepercayaan diri madrasah dalam mencapai mutu, serta kejujuran dalam pelaksanaan EDM.

C. Perencanaan mutu madrasah berbasis nilai-nilai pesantren

Madrasah Aliyah Darul Huda menyusun perencanaan pemenuhan mutu dalam bentuk RKM dan RKTm. RKM yang disusun madrasah merupakan rencana kerja yang digunakan untuk empat tahun ke depan. Sedangkan RKTm merupakan rencana kerja yang disusun untuk satu tahun ke depan. Bentuk perencanaan pemenuhan mutu pada umumnya berupa rencana kerja tahunan yang berupa penjabaran rinci dari rencana kerja menengah (4 tahun).³¹ Hal ini menunjukkan madrasah secara mandiri mampu merencanakan pemenuhan mutu dengan sistematis. Hal tersebut mengisyaratkan nilai kemandirian dan nilai tanggung jawab madrasah sebagai lembaga pendidikan yang diberi kepercayaan oleh wali murid guna mencetak generasi yang berintelektual dan berakhlakul karimah.

RKM dan RKTm disusun untuk dijadikan rambu-rambu dalam pengelolaan program, implementasi, *monitoring* dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur, sebagai dorongan

³¹ Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 114-115.

dalam peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan, membantu mengatur keuangan madrasah, untuk merespon tuntutan partisipasi masyarakat, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Rencana kerja sekolah menurut Ridwan Abdulah Sani et.al. digunakan sebagai pedoman kerja, dasar dalam mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengembangan sekolah dan bahan acuan guna mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan dibutuhkan. RKS bertujuan untuk mengetahui dengan rinci tindakan yang harus dilakukan sehingga tujuan, kewajiban, dan sasaran pemenuhan dapat dicapai. Hal ini juga menjamin program dan kegiatan sudah memperhitungkan pemenuhan standar dengan kondisi nyata.³²

Uraian di atas menjelaskan tentang pentingnya penyusunan RKM dan RKTM untuk perencanaan pemenuhan mutu. Salah satu peran penting rencana kerja tersebut adalah meningkatkan profesionalisme guru dan mutu madrasah. Hal tersebut mencerminkan madrasah yang berusaha memperbaiki diri secara terus menerus dengan adanya rencana kerja yang disusun untuk jangka waktu tertentu. Keinginan madrasah memperbaiki diri ini menunjukkan nilai moralitas yang selalu

³² Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 114-115.

diajarkan dipondok pesantren yang berusaha menjadi pribadi yang sholeh.

Selain itu, rencana kerja madrasah juga memiliki peran untuk membantu mengatur keuangan. Mengatur keuangan merupakan salah satu hal yang dibiasakan pada santri di pesantren. Hal ini sebagai bentuk kemandirian santri dalam menggunakan berapapun uang yang diberikan orang tua kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya selama di pesantren tanpa adanya pemborosan. Nilai ini yang berusaha ditanamkan madrasah agar dana yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Selain nilai kemandirian juga sebagai nilai kesederhanaan karena dana yang akan dipakai untuk kegiatan dimanfaatkan secukupnya.

Peran rencana kerja sekolah sebagai respon tuntutan masyarakat, mengisyaratkan bahwa madrasah tidak secara idealis mengesampingkan keinginan orang tua murid dan masyarakat sekitar. Segala program dan kegiatan madrasah juga didasarkan atas pertimbangan komite sekolah. Hal inilah yang menunjukkan nilai moralitas untuk saling menghargai dan memberikan hak orang tua sebagai pengguna jasa.

Kemudian peran penting rencana sekolah adalah sebagai bentuk peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan adanya RKM para orang tua murid akan memahami program

dan kegiatan apa saja yang dilakukan madrasah untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut juga merupakan sebuah nilai moralitas dalam bentuk kejujuran. Menurut Yusuf Umar, melalui madrasah akan mendapat informasi yang menjadi umpan balik bagi madrasah dan menjadi jaminan bagi orang tua siswa bahwa madrasah selalu memberikan pelayanan yang terbaik.³³

Sejalan dengan beberapa penjelasan di atas, RKM dan RKTM yang disusun madrasah dimanfaatkan sebagai acuan untuk mencapai target mutu, sebagai panduan pemanfaatan anggaran, dan tolak ukur bagi keberhasilan implementasi program dan kegiatan. Kegiatan dalam buku *Sistem Penjaminan Mutu Internal* merupakan tindakan yang dilakukan dalam suatu program dalam menjawab tantangan yang ditetapkan yang dirumuskan dengan efektif dan efisien. Program dan kegiatan harus mempunyai alokasi waktu (jadwal) untuk mempermudah menentukan urutan kegiatan, mengatur penggunaan sumberdaya dan dana serta mengontrol alur kegiatan dan keuangan.³⁴

RKM MA Darul Huda disusun berdasarkan disusun berdasarkan hasil dari identifikasi dan analisis kondisi

³³ Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 153-154.

³⁴ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 117-118.

madrasah, harapan pemangku kepentingan, dan tantangan madrasah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ridwan A. S. et.al. yang menyatakan bahwa perencanaan mutu pada umumnya didasarkan pada hasil pemetaan mutu, kebijakan pendidikan nasional, daerah dan satuan pendidikan itu sendiri berikut dengan rencana strategis pengembangan satuan pendidikan.³⁵ Penyusunan yang didasarkan hasil pemetaan mutu dan standar mutu menunjukkan kemampuan menyesuaikan madrasah dalam segala kondisi. Hal tersebut memunculkan nilai kemandirian sebagaimana di pesantren yang mengajarkan para santri untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat yang berbeda-beda karakter.

Dalam penyusunan RKM, MA Darul Huda menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan demokratis. Rencana kerja madrasah ini bersifat partisipatif, transparan, multi sumber, dan komprehensif. Hal tersebut sesuai dengan asas yang dimiliki oleh sistem penjaminan mutu yang berupa komitmen semua pihak, kepatuhan terhadap regulasi, dorongan internal, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan pencitraan.³⁶ Adanya prinsip atau asas yang dibangun madrasah dalam penyusunan rencana

³⁵ Ibid, 33-34.

³⁶ Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2012) 9

kerja menyiratkan nilai kesederhanaan, nilai tanggungjawab, nilai demokrasi, nilai kebersamaan, dan nilai moralitas. Hal tersebut merupakan macam-macam nilai yang diajarkan pesantren pada santrinya.³⁷

Rencana kerja madrasah disusun melalui tim-tim yang terdiri dari para guru, keuangan, staf administrasi, pihak keuangan serta perwakilan masyarakat dan komite. Tim akan dibagi menjadi delapan sesuai SNP yang akan merumuskan rencana kerja sesuai standar yang ditentukan pada tim tersebut. Hasilnya akan dibahas dalam rapat untuk disesuaikan dengan hasil pemetaan mutu dan SNP kemudian disepakati bersama. Program yang ditetapkan berdasarkan sasaran satuan pendidikan dengan melibatkan pihak lain seperti komite dan masyarakat.³⁸ Rencana pemenuhan mutu juga membutuhkan keterlibatan aktif pemangku kepentingan terutama tenaga pendidik sebagai aktor utama dalam kegiatan belajar serta pemerintah dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab.³⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa madrasah sangat menyadari akan pentingnya kerjasama dan gotong royong di

³⁷ Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren*, 63-74

³⁸ Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 117-118

³⁹ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 120

antara para pemangku kepentingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa madrasah menanamkan nilai kebersamaan dan demokrasi yang ditunjukkan pada proses penyusunan rencana kerja madrasah dengan menggunakan metode musyawarah.

Tahap perumusan rencana kerja meliputi merumuskan program madrasah dan menyusun jadwal kegiatan. Dalam perumusan program madrasah meliputi empat langkah yang meliputi menetapkan sasaran, menentukan indikator keberhasilan, menentukan kegiatan dan menetapkan penanggung jawab. Hal ini sesuai dengan rencana pemenuhan mutu menurut Ridwan Abdullah Sani et.al. yang mengungkapkan bahwa rencana pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab pelaksanaan, kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan.⁴⁰ Hal ini menunjukkan nilai kemandirian madrasah dalam mengatur program dan kegiatan sedemikian rupa agar komprehensif.

RKTM MA Darul Huda sendiri disusun berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Madrasah pada tahun sebelumnya, pelaksanaan rencana program dan kegiatan RKM, dan disesuaikan dengan Permendiknas. Penyusunan rencana pemenuhan mutu dalam buku *Sistem Penjaminan Mutu Internal* dirumuskan berdasarkan EDS dan

⁴⁰ Ibid, 114-115.

mengacu pada visi misi dan tujuan sekolah yang sudah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan daerah. EDS yang telah dilakukan sekolah merupakan indikator *baseline* yang akan ditingkatkan sehingga standar yang ditetapkan dapat dipenuhi.⁴¹

Adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa madrasah tidak menginginkan perencanaannya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap pemerintah yang berarti madrasah mengimplementasikan nilai kepemimpinan sebagaimana di pesantren yang selalu mengajarkan santri untuk taat pada kyai. Kyai sebagai pemimpin tertinggi mengarahkan pesantren sesuai visi yang dituju yang membawahi para ustadz yang konsen mendidikan dan mengajar, dan pengurus pondok sebagai salah satu bagian yang berada dibawah kyai.⁴²

Tahap perumusan RKM MA Darul Huda meliputi perumuskan rencana strategis madrasah yang dilakukan melalui enam langkah yaitu menetapkan sasaran, merumuskan program, menentukan indikator keberhasilan, dan menentukan

⁴¹ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 113.

⁴² Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kepribadian Muslim di Pesantren*, 63-74.

kegiatan, menetapkan penanggungjawab dan menyusun jadwal kegiatan. Kemudian merumuskan rencana rutin madrasah dengan langkah yang sama. Penentuan program dan kegiatan dalam memberikan layanan bermutu dengan target memenuhi atau melampaui SNP harus memuat jadwal dan tahapan yang jelas. Program merupakan upaya mencapai sasaran. Program yang ditetapkan berdasarkan sasaran satuan pendidikan dengan melibatkan pihak lain seperti komite dan masyarakat. Setiap program harus ditentukan penanggung jawab yang berupa unit kerja atau perorangan.⁴³ Seperti penjelasan sebelumnya, dalam hal ini madrasah menunjukkan nilai kemandiriannya dalam rangka penjaminan mutu.

Setelah selesai menyusun rencana kerja, madrasah akan menyusun anggaran untuk tiap program dan kegiatan yang disesuaikan dengan sumber dana. Keuangan madrasah dikelola madrasah dan keuangan yayasan sehingga terkadang membutuhkan persetujuan pengasuh. Rumusan rencana anggaran madrasah memuat rencana biaya dan sumber pendanaan serta rencana kegiatan dan anggaran kegiatan.

Dalam merumuskan rencana anggaran satuan pendidikan disusun dengan membuat rencana biaya satuan satuan

⁴³ Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 117-118.

pendidikan untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan, apakah satuan pendidikan memiliki dana dan dari mana dan diperoleh, membuat rencana pendanaan satuan pendidikan yang berisikan rencana sumber pendapatan satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan urutan kepastian perolehan dana, dan menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan dengan memperhatikan aturan penggunaan dana dari pemberi dana.⁴⁴ Hal tersebut ditujukan agar pemanfaatan dana madrasah dialokasikan secara efektif dan efisien. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, hal ini merupakan bentuk nilai kemandirian dan kesederhanaan yang selalu ditanamkan di pesantren.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa MA Darul Huda menyusun RKM dan RKTm sebagai perencanaan pemenuhan mutu yang dijadikan rambu-rambu dalam pengelolaan program, implementasi, *monitoring* dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur, sebagai dorongan dalam peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan, dan bertujuan untuk membantu mengatur keuangan madrasah, merespon tuntutan partisipasi masyarakat, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Rencana kerja MA Darul Huda disusun berdasarkan hasil dari identifikasi

⁴⁴ Ibid, 118-119.

dan analisis kondisi madrasah, harapan pemangku kepentingan, dan tantangan madrasah. Meliputi perumuskan rencana strategis madrasah yang dilakukan melalui enam langkah yaitu menetapkan sasaran, merumuskan program, menentukan indikator keberhasilan, dan menentukan kegiatan, menetapkan penanggungjawab dan menyusun jadwal kegiatan. Madrasah juga menyusun anggaran untuk tiap program dan kegiatan yang disesuaikan dengan sumber dana dalam perumusan rencana kerja madrasah. Nilai pesantren yang dicerminkan madrasah pada tahap ini adalah nilai moralitas, nilai kemandirian, nilai kesederhanaan, nilai tanggung jawab, nilai demokrasi, nilai kebersamaan, nilai kepemimpinan. Nilai moralitas dan kemandirian menjadi nilai nilai yang paling dominan di antara beberapa nilai-nilai pesantren yang dicerminkan.

D. Pelaksanaan pemenuhan mutu madrasah berbasis nilai-nilai pesantren

Program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam RKM dan RKTm akan menjadi acuan pelaksanaan pemenuhan mutu namun terkadang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya karena keterbatasan waktu dan tempat atau kondisi madrasah yang lain. Pada langkah pemenuhan standar, pihak sekolah memerlukan adanya standar dan pedoman pemenuhan mutu

dari pihak eksternal yaitu pemerintah sebagai acuan.⁴⁵ Dalam buku *Sistem Penjaminan Mutu Internal* menjelaskan bahwa implementasi atau pelaksanaan mutu merupakan realisasi program dan kegiatan yang telah dirancang dalam dokumen rencana pemenuhan mutu.⁴⁶

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa MA Darul Huda telah melakukan langkah penjaminan mutu dengan baik. Madrasah juga telah menerapkan prinsip sistematis karena dalam pelaksanaannya menggunakan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan nilai pesantren yang berupa kemandirian.

Kemandirian madrasah dalam melakukan penjaminan mutu juga ditunjukkan pada keberlangsungan kegiatan yang dijalankan. Kegiatan dalam rangka pemenuhan mutu MA Darul Huda akan dirancang oleh penanggung jawab dan tim yang sudah ditunjuk dalam rapat yang membahas konsep kegiatan, teknis kegiatan, bidang-bidang kegiatan dan penanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan, madrasah dapat melakukan tahap berikut:⁴⁷

1. Menetapkan penanggung jawab kegiatan

⁴⁵ Ridwan Abdullah Sani et.al., *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33.

⁴⁶ Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 133.

⁴⁷ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 133.

2. Penanggung jawab menyusulkan tim organisasi pelaksana dan pihak-pihak yang dilibatkan
3. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan
4. Menetapkan bukti fisik yang mendukung keterlaksanaan kegiatan
5. Program kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu agar memperoleh capaian yang signifikan.

Hal tersebut menunjukkan kesuaian tindakan madrasah dengan hal yang seharusnya dilakukan dalam penjaminan mutu. Prinsip sistematis dan berkelanjutan yang diterapkan adalah sistematis dan berkelanjutan. Selain kemandirian yang tercermin dalam hal ini, juga terdapat sebuah tanggung jawab yang sudah sepatasnya dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan yang dibebankan tugas untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan madrasah dengan melakukan perencanaan yang jelas.

Kegiatan yang dilaksanakan akan dipantau oleh kepala madrasah dan sebelumnya akan ada sosialisasi tentang kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya juga memerlukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar kegiatan berjalan lancar. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Ridlwan Abdullah Sani et.al terkait rencana yang telah ditetapkan, pelaksanaannya dan hasil pemantauan program dan kegiatan akan selalu disosialisasikan

kepada seluruh pemangku kepentingan.⁴⁸ Dalam penjaminan mutu juga memerlukan pelatihan bagi pelaksana kegiatan. Pelatihan akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan karena terkait dengan pemahaman kegiatannya.⁴⁹ Hal tersebut menyiratkan nilai tanggung jawab terhadap kegiatan madrasah dengan adanya pemantauan dari atas pada pelaksana kegiatan. Selain itu, menunjukkan kebersamaan para pemangku kepentingan madrasah dalam proses sosialisasi guna keberhasilan penjaminan mutu.

Sesuai dengan penjelasan di atas, kegiatan yang terlaksana akan dilaporkan terkait pelaksanaan kegiatan, hasil, kendala dan rekomendasinya kepada madrasah yaitu kepala madrasah, guru dan seluruh pemangku kepentingan lembaga melalui pertemuan resmi seperti rapat guru, PWM dan rapat internal pondok. Hal tersebut menunjukkan pembuktian penanggung jawab kegiatan beserta tim dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Seperti yang sudah disebut sebelumnya bahwa pelaksanaan pemenuhan mutu memerlukan bukti fisik dalam

⁴⁸ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 139.

⁴⁹ Deden Makbulloh, *Pendidikan Islam dan Sistem Pejaminan Mutu*, 92-95.

pelaksanaan kegiatan.⁵⁰ Hal ini mengisyaratkan nilai tanggung jawab terkait kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu di MA Darul Huda memerlukan profesionalisme para pelaku dan pelaksana kegiatan, manajemen madrasah yang transparan, akomodatif dan demokratis serta keterlibatan dan dukungan orang tua murid, masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh agama berupa sumbangan dana, tenaga dan pikiran. Selain itu, memerlukan dukungan dari pemerintah terkait kebijakan pendidikan. Hal ini selaras dengan penjelasan terkait pemenuhan mutu bahwa pelaksanaan pemenuhan mutu memerlukan komitmen dari para pemangku kepentingan satuan pendidikan.⁵¹ Penjaminan kualitas membutuhkan orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan pada bidang yang dibutuhkan dalam perancangan.⁵² Hal ini juga menunjukkan nilai kebersamaan para pemangku kepentingan karena penjaminan mutu memerlukan dukungan semua elemen baik dari pelaku internal maupun eksternal.

⁵⁰ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 133.

⁵¹ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 139.

⁵² Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013) 262-263.

Selaras dengan nilai kebersamaan di atas, dalam pelaksanaan pemenuhan mutu, madrasah memerlukan beberapa kegiatan penunjang yang didukung oleh pengurus pondok dan pengasuh. Hal tersebut menunjukkan prinsip penjaminan mutu yaitu mutu bukan hanya menjadi tanggungjawab pimpinan melainkan menjadi tanggung jawab semua orang dalam organisasi.⁵³ Penjaminan mutu memuat kegiatan pengendalian mutu dengan prosedur yang benar sehingga perbaikan efisiensi, produktivitas, dan probabilitas dapat tercapai.⁵⁴ Madrasah menggunakan kegiatan penunjang sebagai bentuk pengendalian mutu yang merupakan bagian dari penjaminan mutu.

Kegiatan pengendalian mutu juga dilakukan dengan meningkatkan akhlak terutama kedisiplinan melalui program penskoran dan memaksimalkan peran guru sebagai tauladan dan motivator bagi peserta didik. Dalam menerapkan sistem penjaminan mutu kepala sekolah sangat membutuhkan bantuan seluruh *stakeholder* karena sistem penjaminan mutu merupakan proses yang kompleks. Akan sangat sulit untuk dilakukan jika tidak didukung kerja yang optimal dari semua komponen

⁵³ Ridwan Abdullah Sani et.al, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33.

⁵⁴ Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan*, 262-263.

sekolah.⁵⁵ Dengan adanya kerjasama guru, murid dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mencapai keberhasilan mutu yang diharapkan. Kerjasama ini menunjukkan adanya nilai sosial dan kebersamaan yang ditunjukkan oleh madrasah. Selain itu, madrasah yang mengutamakan kedisiplinan siswa juga menunjukkan nilai moralitas serta nilai spiritual madrasah yang menghiasi kegiatan madrasah untuk memenuhi mutu.

Nilai sosial dan kebersamaan juga ditunjukkan dalam langkah madrasah yang berupaya meningkatkan kinerja guru dengan memotivasi guru, menyadarkan tugas dan tanggung jawabnya, memfasilitasi guru dengan mengadakan workshop serta memPOSISikan guru sesuai keahlian yang dimiliki. Madrasah juga melakukan tes bagi peserta didik baru untuk mengetahui kemampuan awal. Madrasah akan membangun kesadaran mutu dan komunikasi yang baik serta usaha yang maksimal dan kesabaran guna memperlancar pemenuhan mutu. Keberhasilan melaksanakan manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh iklim organisasi, yakni komunikasi dan tim kerja yang kompak.⁵⁶

⁵⁵ Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 9.

⁵⁶ Ridwan Abdullah Sani et.al, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33.

Melalui komunikasi dan kerja sama, semua orang mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan waktu yang tepat, di mana dan dengan siapa harus berhubungan/berkomunikasi.⁵⁷ Hal ini juga dilakukan madrasah dalam memperbaiki manajemennya dengan menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang jelas, evaluasi diri madrasah, sistem informasi yang baik dan beberapa kelengkapan pengelolaan yang wajib dipenuhi secara efektif dan efisien. Selain nilai sosial yang tercermin, dalam hal ini juga terdapat nilai kesederhanaan dengan lebih mementingkan pada perencanaan dan pelaksanaan serta anggaran yang efektif dan efisien sehingga meminimalisir tenaga, waktu dan biaya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan mutu, program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah program yang sudah direncanakan dalam RKM dan RKTm. Kegiatan dirancang oleh penanggung jawab dan tim yang telah dibentuk untuk kegiatan tersebut yang dipantau oleh kepala madrasah. Sebelum pelaksanaan diadakan sosialisasi. Kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh seluruh pemagku kepentingan madrasah dan kegiatan-kegiatan penunjang. Nilai pesantren yang terkandung pada tahap ini

⁵⁷ Ibid, 32-33.

adalah nilai kemandirian, nilai tanggung jawab, nilai sosial dan kebersamaan, nilai moralitas dan spiritual, dan nilai kesederhanaan. Nilai tersebut didominasi oleh nilai sosial dan kebersamaan.

E. Evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu madrasah berbasis nilai-nilai pesantren

Setelah pelaksanaan pemenuhan mutu selesai, madrasah selalu melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan rutin melalui pertemuan resmi seperti rapat guru. Evaluasi pelaksanaan mutu dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap proses pemenuhan mutu untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.⁵⁸ Penjaminan mutu biasanya membutuhkan evaluasi secara terus menerus.⁵⁹ Evaluasi formatif yang digunakan untuk memeriksa keterlaksanaan rencana pemenuhan mutu yang berjalan disatuan pendidikan yang berfokus pada keterlaksanaan input yang meliputi anggaran dan sumber daya dan keterlaksanaan proses seperti

⁵⁸ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 32-35.

⁵⁹ Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah: Membangun Sekolah yang Bermutu* (Bandung: Alfabeta, 2013) 65.

keterlaksanaan dan kualitas proses latihan.⁶⁰ MA Darul Huda sebagai lembaga pendidikan yang melakukan penjaminan mutu mengemas evaluasi terkait program dan kegiatannya dalam bentuk musyawarah. Musyawarah sendiri merupakan hal dikembangkan pesantren dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Hal ini menyiratkan nilai demokrasi sebagaimana negara selalu menggalakkannya.

Evaluasi tersebut terkait hasil kegiatan, kendala kegiatan dan solusi atau rekomendasi yang tepat. Evaluasi pemenuhan mutu sesungguhnya digunakan untuk memperbaiki tahap kegiatan atau kegiatan selanjutnya. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil kegiatan ini merupakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu memeriksa hasil dari pelaksanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil pemenuhan dengan *output*, *outcome* dan dampak pemenuhan mutu.⁶¹

Sedangkan evaluasi yang berkaitan dengan kendala kegiatan merupakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif yang digunakan untuk memeriksa keterlaksanaan rencana pemenuhan mutu yang berjalan disatuan pendidikan yang

⁶⁰ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 147.

⁶¹ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 147.

berfokus pada keterlaksanaan input yang meliputi anggaran dan sumber daya dan keterlaksanaan proses seperti keterlaksanaan dan kualitas proses latihan.⁶²

Evaluasi pemenuhan mutu yang dilaksanakan MA Darul Huda baik secara sumatif maupun formatif ini menunjukkan bahwa madrasah telah mengevaluasi secara menyeluruh. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab madrasah, penanggung jawab dan tim pelaksana dalam melakukan pemenuhan mutu untuk memenuhi hal peserta didik sebagai pengguna jasa. Hal tersebut tentu menyiratkan nilai tanggung jawab dan nilai kemandirian.

Selain terkait hasil kegiatan dan kendala kegiatan, hal yang dibahas dalam evaluasi adalah solusi dari kendala-kendala kegiatan dan hasil yang ada. Rekomendasi yang diambil berdasarkan hasil beberapa usulan guru dan dipilih yang terbaik. Hal ini selaras dengan langkah evaluasi pemenuhan mutu yang dilakukan dengan menyusun rencana evaluasi, membuat indikator dan instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi dan penyusunan rekomendasi.⁶³ Penentuan rekomendasi dengan mengambil dari beberapa usulan guru menunjukkan bahwa madrasah tidak

⁶² Ibid, 147.

⁶³ Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 32-35.

menentukan sebuah kebijakan secara sepihak dan saling menghargai pendapat walaupun tidak semua usulan dapat dijadikan keputusan akhir. Saling menghargai ini merupakan nilai sosial dan nilai moralitas yang selalu ditanamkan pesantren.

Evaluasi pemenuhan mutu MA Darul Huda diadakan dalam pertemuan resmi yang dihadiri oleh penanggung jawab dan tim dan pelaksana kegiatan. Madrasah juga memanfaatkan media sosial untuk secara cepat dan efektif. penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk mencapai biaya efektif dan membantu meningkatkan produktivitas dan dapat mencapai kepuasan pelanggan.⁶⁴ Penggunaan cara-cara modern ini menggambarkan nilai yang dianut oleh MA Darul Huda yang diterapkan di pesantrennya yaitu menggunakan metode lama yang baik dan mengambil metode baru yang lebih baik. Dalam hal ini, pemanfaatan media sosial untuk evaluasi merupakan metode baru yang diambil MA Darul Huda agar evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan nilai moralitas yang berupa perbaikan diri.

Evaluasi dilakukan MA Darul Huda tidak hanya diakhir namun juga pada tahap kegiatan awal tersebut untuk beberapa kegiatan tertentu. Evaluasi ini merupakan bentuk pengendalian

⁶⁴ Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan*, 262-263.

madrasah dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Hal ini menunjukkan kesigapan madrasah dalam penjaminan mutu. Kesigapan ini merupakan nilai yang ingin dibangun MA Darul Huda pada setiap komponen madrasah terutama peserta didik seperti tanggap terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut mengisyaratkan nilai sosial dan tanggung jawab madrasah terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pemenuhan mutu MA Darul Huda dilaksanakan secara formatif dan sumatif. Evaluasi berkaitan dengan hasil kegiatan, kendala kegiatan dan rekomendasi kegiatan. Nilai pesantren yang terkandung pada tahap ini adalah nilai demokrasi, nilai kemandirian, nilai moralitas, nilai sosial dan nilai tanggung jawab. Nilai pesantren yang dominan pada tahap ini adalah nilai tanggung jawab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan standar mutu.

Pada tahap awal penjaminan mutu ini MA Darul Huda menggunakan SNP sebagai acuan mutu dengan melakukan penyesuaian terhadap visi misi dan kondisi madrasah dan disosialisasikan kepada seluruh komponen madrasah. Penetapan standar dilakukan oleh tim pengembang madrasah yaitu kepala madrasah beserta wakil madrasah, ketua program jurusan, stag administrasi dan beberapa staf pengajar yang kompeten serta melibatkan komite madrasah dan masyarakat. Standar mutu yang ditetapkan meliputi delapan komponen standar yang diantaranya mengandung cirikhas pesantren seperti adanya kurikulum muatan lokal kaligrafi dan kajian kitab kuning.

Nilai-nilai pesantren yang muncul di antaranya adalah nilai kemandirian yang ditunjukkan dengan memiliki idealism acuan mutu tertentu, nilai tanggung jawab yang ditunjukkan dengan kemampuan mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih

baik, nilai moralitas yang ditunjukkan dengan keterbukaan dan kejujuran terhadap arah mutu madrasah, nilai sosial yang ditunjukkan dengan adanya penyesuaian terhadap visi misi dan kondisi madrasah, nilai keakraban dan kebersamaan yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk meraih tujuan secara bersama-sama. Nilai yang mendominasi pada tahap ini adalah nilai moralitas.

2. Pemetaan mutu,

MA Darul Huda memberlakukannya dengan mengadakan EDM. Data EDM diperoleh dari seluruh komponen madrasah dari peserta didik sampai yayasan. Proses EDM di MA Darul Huda dimulai dari pembentukan Tim Pengembang Madrasah, pelatihan instrumen, pelaksanaan EDM terkait kelebihan dan kekurangan serta rekomendasinya dan menetapkan prioritas terhadap rekomendasi tersebut.

Nilai pesantren yang terkandung pada tahap ini adalah nilai moralitas, nilai kebersamaan, nilai keilmuan dan nilai demokrasi. Nilai moralitas pada tahap ini lebih banyak muncul dengan adanya cara-cara baru madrasah dalam memperbaiki mutu, kepercayaan diri madrasah dalam mencapai mutu, serta kejujuran dalam pelaksanaan EDM.

3. Perencanaan pemenuhan mutu.

MA Darul Huda menyusun RKM (4 tahun) dan RKTm (tahunan) untuk dijadikan rambu-rambu dalam pengelolaan program, implementasi, *monitoring* dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur, sebagai dorongan dalam peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan, dan bertujuan untuk membantu mengatur keuangan madrasah, merespon tuntutan partisipasi masyarakat, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Rencana kerja MA Darul Huda disusun berdasarkan disusun berdasarkan hasil pemetaan mutu. RKM dan RKTm disusun oleh kepala madrasah beserta guru yang ditugasi, staf keuangan dan administrasi serta komite dengan enam yaitu menetapkan sasaran, merumuskan program, menentukan indikator keberhasilan, dan menentukan kegiatan, menetapkan penanggung jawab dan menyusun jadwal kegiatan.

Nilai pesantren yang dicerminkan madrasah pada tahap ini adalah nilai moralitas, nilai kemandirian, nilai kesederhanaan, nilai tanggung jawab, nilai demokrasi, nilai kebersamaan, nilai kepemimpinan. Nilai moralitas dan kemandirian menjadi nilai nilai yang paling dominan di antara beberapa nilai-nilai pesantren yang dicerminkan.

4. Pemenuhan mutu.

Setelah melakukan perencanaan mutu madrasah akan merancang kegiatan berdasarkan RKM dan RKTM. Kegiatan dirancang oleh penanggung jawab yang ditunjuk dalam RKM dan RKTM serta tim yang telah dibentuk untuk kegiatan tersebut yang dipantau oleh kepala madrasah. Sebelum pelaksanaan diadakan sosialisasi. Kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh seluruh pemagku kepentingan madrasah dan kegiatan-kegiatan penunjang serta manajemen.

Nilai pesantren yang terkandung pada tahap ini adalah nilai kemandirian, nilai tanggung jawab, nilai sosial dan kebersamaan, nilai moralitas dan spiritual, dan nilai kesederhanaan. Nilai tersebut didominasi oleh nilai sosial dan kebersamaan.

5. Evaluasi pemenuhan mutu.

Setelah melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan mutu MA Darul Huda melaksanakan evaluasi secara formatif dan sumatif yang berkaitan dengan hasil kegiatan, kendala kegiatan dan rekomendasi kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui pertemuan resmi dan media sosial untuk evaluasi cepat. Evaluasi dilakukan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan terlaksana namun juga setelah tahap pertama kegiatan untuk kegiatan tertentu seperti penilaian semester.

Nilai pesantren yang terkandung pada tahap ini adalah nilai demokrasi, nilai kemandirian, nilai moralitas, nilai sosial dan nilai tanggung jawab. Nilai pesantren yang dominan pada tahap ini adalah nilai tanggung jawab.

Secara umum sistem penjaminan mutu internal di MA Darul Huda didasari nilai moralitas yang baik. Nilai moralitas ini sesuai dengan prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu internal. Sinergi antara nilai dan prinsip ini akan menjadikan sistem penjaminan mutu internal semakin baik

B. Saran

Berdasarkan uraian analisis sistem penjaminan mutu MA Darul Huda, peneliti merekomendasikan saran untuk madrasah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran akan standar mutu yg ditetapkan pada seluruh elemen madrasah yaitu peserta didik, guru, orang tua peserta didik, komite madrasah dan masyarakat sekitar.
2. Mengadakan audit mutu secara menyeluruh agar mengetahui secara rinci mutu yang belum tercapai dan akar masalah yang menghambat keberhasilan pencapaian mutu.
3. Mengembangkan program dan kegiatan dari acuan mutu yang dianut dan peluang yang ada sehingga tidak hanya terjamin namun juga meningkat.

4. Meminimalisir pembatalan dan penundaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sehingga penjaminan mutu tercapai sesuai target.
5. Mengembangkan instrumen evaluasi program dan kegiatan sehingga dapat diketahui secara jelas peningkatan hasil kegiatan serta keefektifan dan efisiensi kegiatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani et.al, Ridlwan. *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*. Tangerang: Tsmart Printing. 2018
- Abdullah Sani et.al, Ridwan. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015
- Aly, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta: pustaka pelajar. 2011
- Anwar, Khoirul. "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 1.1. 2018
- Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2008
- Arifin, Zainal *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Diva Press. 2012
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011
- Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Penjaminan Mutu Pendidikan, *Konsep, Regulasi, Dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan*. tt.
- E. Mulyasa, H. *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Fattah, Nanang. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Rosda. 2012
- Fuad, Muskinul. *Model Pengembangan Kepribadian Muslim di Pesantren*. Yogyakarta: Lontar Mediatama. 2018
- Hadi, Amirul. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1998
- Harian Bhirawa, *BAN S/M Minta Sekolah Tuntaskan Akreditasi*, <http://harianbhirawa.com/2018/11/ban-sm-minta-sekolah-tuntaskan-akreditasi/>, 14 November 2018
- Idrus, Ali. *Manajemen Pendidikan Global: Visi, Aksi dan Adaptasi*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2009
- Juliandi, Azuardi/ *Metodologi Penelitian*. Medan: Umsu Press. 2014
- Karwati dan Donni Juni Priansa, Euis. *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah: Membangun Sekolah yang Bermutu*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah. *“Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.”* t.tp: 2017
- Kusnandi. *Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan*, *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* .1.2. 2017

- Ma'mur Asmani, Jamal. *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan*.
Jogjakarta: Diva Press. 2013
- Made Alit Mariana, I. et.al. *Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Refleksi Pengelolaan Pendidikan di Bali*.
Denpasar: LPMP Provinsi Bali. 2013
- Makbulloh, Deden. *Pendidikan Islam dan Sistem Pejaminan Mutu*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan*. Yoyakarta: Kalimedia. 2015
- McClaran, Anthony. *Quality Assurance in Higher Education (Risk Management: Implementation)*
- Media Indonesia, *55% Sekolah dan Madrasah Terakreditasi B*,
<https://mediaindonesia.com/read/detail/204145-55-Sekolah-Dan-Madrasah-Terakreditasi-B>, 31 Agustus 2019
- Muchlis Solichin, Mohammad. "Pembelajaran Karakter Berbasis Nilai-Nilai Pesantren: Studi atas Pondok Pesantren Al-Is'af Kalabaan, Guluk-guluk Sumenep".
Nuansa. 14.2. 2017
- Mulayāsana, Dedy. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*.
Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003
- Mulyana, Rohmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*.
Bandung: Alfabeta, 2011

- Narbuko dan H. Abu Ahmadi, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007
- Nihwan. Pendidikan Pesantren dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Pendidikan Islam. t.tp: tt
- OECD, *Quality and Recognition in Higher Education*. 2004
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar dan Menengah, [Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf](http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf). 10 Desember 2018
- Roskina Mas, Sitti. *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..* Yogyakarta: Zahir Publishing. 2017
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2006
- Saputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama. 2013
- Sridana et.al., Nyoman. "Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA)". *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. 1.1. 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008
- Suratno. "Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah dalam Upaya Pengembangan Program Akademik Unggulan". *Media Manajemen Pendidikan*. 1. 2. 2018

- Syafe'I, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. 8.1. 2017
- Umar, Yusuf *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu* (Bandung: Refika Aditama, 2016) 6-7
- Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014
- W. Munawir, A. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Lengkap* (Surabaya: pustaka progresif, 1997) 397
- Yasin, Fatah. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2008
- Yusron Maulana El-Yunusi, Muhammad. "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri: Studi Kasus Pesantren Tebuireng Jombang dan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo". Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017
- Zazin, Nur. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011